

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



NGADI
TONI SOETOPO
SUKO BANDIYONO
MASYHURI IMRON



LEUSER CITA PUSTAKA
LIPI
COREMAP-LIPI

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Penulis :

Ngadi
Toni Soetopo
Suko Bandiyono
Masyhuri Imron

Layout :

Puji Hartana

Desain Cover :

Puji Hartana

ISBN :

978-602-8942-54-6



LEUSER CITA PUSTAKA

PT. LEUSER CITA PUSTAKA (Anggota IKAPI)

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 16, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7810076, Fax: (021) 7810076

Bekerjasama dengan



LIPI



COREMAP-LIPI

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI dan COREMAP-LIPI

Jln. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430
Telp. 62-21-64713850, Fax: 62-21-64711948
Website: <http://oseanografi.lipi.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan buku bunga rampai ini. Buku berjudul "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar" ini merupakan tulisan bunga rampai berdasar hasil penelitian BME aspek social-ekonomi terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2011. Penelitian tersebut merupakan tahapan terakhir dari rangkaian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada kurun waktu 2006-2011 meliputi penelitian awal (T.0), penelitian tahap pertengahan (T.1) dan penelitian tahap akhir (T.2).

Buku bunga rampai ini terdiri dari tujuh tulisan yang memberikan informasi tentang realisasi program penyelamatan sumber daya terumbu karang serta perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengambil kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terlaksananya penulisan buku ini telah melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para informan: masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di Buki, Bungaiya, Bontobulaeng dan Bontobaru. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para

pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit pelaksana COREMAP di Kabupaten Selayar, CRITC Kabupaten Selayar dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Desember 2011

Tim peneliti

ABSTRAK

Buku bunga rampai ini ditujukan untuk menganalisis perkembangan pendapatan penduduk dan realisasi program penyelamatan sumber daya terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Data yang digunakan untuk analisis didasarkan pada hasil penelitian COREMAP bekerja sama dengan PPK LIPI tahun 2011. Penelitian dilakukan di kawasan daratan Pulau Selayar (Kecamatan Buki dan Bungaiya) serta kawasan pulau kecil (Kecamatan Pasimasunggu Timur). Analisis dilakukan pada tiga titik waktu yaitu tahun 2006, 2008 dan 2011.

Hasil analisis menunjukkan selama empat tahun terakhir (2006-2011), terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga di Desa Buki dan Bungaiya dari 798 ribu (tahun 2006) menjadi 1,04 juta (tahun 2011) atau 5,99 persen per tahun. Permasalahan distribusi pendapatan terjadi di kedua desa tersebut karena terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi antara pendapatan terendah dan tertinggi. Di sisi lain terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga di kawasan Pasimasunggu Timur tahun 2006-2008 sebesar 21,47 persen atau 7,13 persen per tahun.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai persepsi bahwa prasarana COREMAP II (village grant, public awareness dan pengawasan) telah berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka. Responden di kawasan daratan dan di kawasan pulau kecil yang menyatakan bahwa prasarana COREMAP II bermanfaat masing-masing sebesar 85,25 persen dan 93,85 persen. *Seed fund* di kedua kawasan telah digulirkan kepada masyarakat, meskipun menghadapi kendala terutama ketidakmampuan masyarakat untuk mengembalikan dana tersebut. Hanya *seed fund* di Desa Buki yang menunjukkan tingkat pengembalian yang tinggi karena dikelola oleh LKM yang pengurusnya memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi sekaligus sebagai tokoh masyarakat setempat.

Kata kunci : Pendapatan, Manfaat Prasarana dan *Seed Fund*, Daratan Pulau Selayar Dan Pulau Kecil

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
Bab I : POTENSI PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	1
<i>Oleh : Ngadi</i>	
A. Keadaan Umum	1
B. Potensi Perikanan Laut	3
C. Program Penyelamatan Terumbu Karang	7
Daftar Pustaka	10
Bab II : REALISASI PROGRAM PENYELAMATAN SUMBER DAYA TERUMBU KARANG	11
<i>Oleh : Toni Soetopo dan Suko Bandiyono</i>	
A. Pengantar	11
B. Penyadaran Masyarakat	12
C. Pengawasan	18
D. Pengelolaan Berbasis Masyarakat (CBM)	26
E. Penutup	39
Daftar Pustaka	41
Bab III : PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN KEGIATAN EKONOMI DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	43
<i>Oleh : Ngadi dan Toni Soetopo</i>	
A. Pengantar	43
B. Perkembangan Penduduk	44

	C. Kegiatan Ekonomi: Dinamika Tenaga Kerja dan Mata Pencaharian	54
	D. Kesejahteraan Masyarakat	58
	E. Penutup	61
	Daftar Pustaka	62
Bab IV	: PERKEMBANGAN PENDAPATAN PENDUDUK DIKAWASAN DARATAN PULAU SELAYAR DAN PULAU KECIL	63
	<i>Oleh : Ngadi dan Toni Soetopo</i>	
	A. Pengantar	63
	B. Pendapatan di Kawasan Daratan Pulau Selayar	65
	C. Pendapatan di Kawasan Pulau Kecil	79
	D. Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan	88
	E. Penutup	99
	Daftar Pustaka	100
Bab V	: DANA BERGULIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT	103
	<i>Oleh : Masyhuri Imron dan Ngadi</i>	
	A. Pengantar	103
	B. Kegiatan <i>Seed Fund</i> (Dana Bergulir) di Desa Buki dan Desa Bungaiya	104
	C. Kegiatan <i>Seed Fund</i> di Desa Bontobulaeng dan Desa Bontobaru, Pasimasunggu Timur	112
	D. Perkembangan Pendapatan Penerima <i>Seed Fund</i>	122
	E. Penutup	124
	Daftar Pustaka	126

Bab VI	: PENGELOLAAN DAN PERSEPSI PRASARANA COREMAP	129
	<i>Oleh : Suko Bandiyono dan Masyhuri Imron</i>	
	A. Pengantar	129
	B. <i>Village Grant</i>	131
	C. Program COREMAP II Lainnya	141
	D. Persepsi Masyarakat tentang Manfaat COREMAP	145
	E. Penutup	162
	Daftar Pustaka	163
Bab VII	: IMPIKASI KEBIJAKAN	165
	<i>Oleh : Suko Bandiyono, Ngadi, Toni Soetopo dan Masyhuri Imron</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Banyak rumah tangga perikanan menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun 2009	2
Tabel 1.2.	Produksi perikanan laut menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2009	5
Tabel 1.3.	Trend Perkembangan Tutupan Karang Hidup Di Kabupaten Kepulauan Selayar Baik Di Lokasi Plot Permanen Dan Di DPL 2006-2011	9
Tabel 2.1.	Kegiatan Patroli Laut Oleh COREMAP II Kabupaten Kepulauan Selayar	22
Tabel 3.1.	Jumlah Dan Tingkat Pertambahan Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kecamatan 2006-2009	49
Tabel 3.2.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Selayar Menurut Kecamatan, Tahun 2009	51
Tabel 3.3.	Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Di Kawasan Pasimasunggu Timur Dan Buki-Bungaiya, Tahun 2011	52
Tabel 3.4.	Keadaan Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011	55
Tabel 3.5.	Distribusi Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010	56

Tabel 3.6.	Distribusi Penduduk Yang Bekerja Di Bontomatene Dan Pasimasunggu Timur Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2011	57
Tabel 3.7.	Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2009	60
Tabel 4.1.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Di Buki dan Bungaiya Kabupaten Selayar Tahun 2006, 2008 Dan 2011	67
Tabel 4.2.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Di Buki Dan Bungaiya Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011	71
Tabel 4.3.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Di Buki Dan Bungaiya, Kabupaten Selayar, Tahun 2006, 2008 Dan 2011	73
Tabel 4.4.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Di Buki Dan Bungaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2006-2011	74
Tabel 4.5.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Dari Kegiatan Kenelayanan Di Buki Dan Bungaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)	75
Tabel 4.6.	Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Di Buki Dan Bungaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar	77
Tabel 4.7.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Di Kawasan Pasimasunggu Timur Kabupaten Selayar Tahun 2006-2011	81
Tabel 4.8.	Statistik Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Di Kawasan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Selayar, Tahun 2006-2011 (Persen)	85

Tabel 4.9.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Di Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2006-2011	87
Tabel 4.10.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Di Bontobaru Dan Bontobulaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar	90
Tabel 4.11.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Dari Kegiatan Kenelayanan Di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)	93
Tabel 4.12.	Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Di Bontobaru Dan Bontobulaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar	94
Tabel 4.13.	Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Kec. Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar	96
Tabel 5.1.	Penerima Dana LKM Di Desa Buki Dan Bungaiya, Tahun 2011	105
Tabel 5.2.	Penggunaan Dana Bergulir Oleh Masyarakat Di Buki Dan Bungaiya Tahun 2011	111
Tabel 5.3.	Penerima Dana LKM Di Pasimasunggu Timur, Tahun 2011	117
Tabel 5.4.	Persentase Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Pemanfaatannya	118
Tabel 5.5.	Persentase Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Pemanfaatannya	119

Tabel 5.6.	Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Perkembangan Usaha, Di Lokasi Pasimasunggu Timur, Kabupaten Selayar	120
Tabel 5.7.	Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir Menurut Perkembangan Hasil Usaha, Di Lokasi Pasimasunggu Timur Kabupaten Selayar	120
Tabel 5.8.	Statistik Pendapatan Anggota Pokmas Di Desa Buki Dan Bungaiya, Tahun 2009 Dan 2011	123
Tabel 5.9.	Pendapatan Penerima <i>Seed Fund</i> Tahun 2011 (N30)	124
Tabel 6.1.	Penggunaan Dana <i>Village Grant</i> Desa Bontobulaeng	136
Tabel 6.2.	Penggunaan Dana <i>Village Grant</i> Desa Bontobaru	138
Tabel 6.3.	Persepsi Tentang <i>Village Grant</i> Menurut Jenis Pemanfaatan Di Desa Buki, 2011	147
Tabel 6.4.	Persepsi Responden Tentang Penyadaran Masyarakat Menurut Jenis Pemanfaatan Di Desa Buki, 2011	149
Tabel 6.5.	Persepsi Responden Tentang Manfaat Pengawasan Laut Di Desa Buki, 2011	150
Tabel 6.6.	Persepsi Responden Tentang <i>Village Grant</i> Menurut Jenis Pemanfaatan Di Desa Bungaiya 2011	152
Tabel 6.7.	Persepsi Tentang Penyadaran Masyarakat Menurut Jenis Pemanfaatan Di Desa Bungaiya 2011	153

Tabel 6.8.	Persepsi Manfaat Pengawasan Laut Menurut Jenis Kegiatan Di Desa Bungaiya 2011	154
Tabel 6.9.	Persepsi Tentang <i>Village Grant</i> Menurut Jenis Pemanfaatan Di Pasimasunggu Timur 2011	157
Tabe 6.10.	Persepsi Tentang Penyadaran Masyarakat Menurut Jenis Pemanfaatan Di Pasimasunggu Timur 2011	158
Tabel 6.11.	Persepsi Manfaat Pengawasan Laut Menurut Jenis Kegiatan Di Pasimasunggu Timur 2011	160
Tabel 6.12.	Manfaat Jenis Prasarana COREMAP II Menurut Kategori Manfaat Dan Menurut Kategori Kawasan Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011	161

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1.	Produksi Perikanan laut di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2009	4
Diagram 1.2.	Produksi Ikan di Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Bontomatene tahun 2005-2009	6
Diagram 3.1.	Distribusi penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Kecamatan, Tahun 2009	45
Diagram 3.2.	Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2009	47
Diagram 3.3.	Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Kesejahteraan, Tahun 2005-2009	59
Diagram 4.1.	Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga dan Per-kapita, di Kabupaten Kepulauan Selayar 2006, 2008 dan 2011	69
Diagram 4.2.	Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Di Buki Dan Bungaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.	Mekanisme Peminjaman Dana <i>Seed Fund</i> Di Desa Bontobaru	116
Gambar 5.2.	Mekanisme Peminjaman Dana <i>Seed Fund</i> di Desa Bontobulaeng	116

**POTENSI PERIKANAN LAUT
DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

Oleh : Ngadi

A. Keadaan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba di sebelah Utara, Laut Flores sebelah Timur, Laut Flores dan Selat Makassar sebelah Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Selayar tercatat 1.357,03 km² yang meliputi 11 kecamatan. Pemerintah Daerah Selayar terbagi menjadi 11 kecamatan, sedangkan jumlah desa kelurahan sebesar 75 desa/kelurahan dengan rincian 68 desa dan 7 kelurahan.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2009 berjumlah 121.749 orang yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 18.860 orang. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, yang tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Pada tahun 2009 jumlah penduduk perempuan sebesar 64.064 orang dan laki-laki sebanyak 57.685 orang atau dengan rasio jenis kelamin sebesar 90,04 persen.

Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai potensi sumber sumber daya laut di sangat besar dan dapat dijadikan modal dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi potensi

tersebut sejauh ini belum dikelola dengan baik sehingga masih banyak penduduk di Selayar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2009 jumlah rumah tangga pra sejahtera dan sejahtera 1 di Selayar mencapai 13.831 rumah tangga. Jika dalam 1 rumah tangga terdapat 4 anggota rumah tangga, maka jumlah penduduk prasejahtera dan sejahtera 1 di daerah ini mencapai sekitar 55.324 jiwa. Berdasarkan data statistik, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2009 mencapai 7889, sehingga terdapat sekitar 31.556 jiwa, atau sekitar 25,9 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS, 2010).

Tabel 1.1.
Banyak Rumah Tangga Perikanan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2009

No	Kecamatan	Laut	Tambak	Rumput laut
1	Pasimaranmu	537	0	214
2	Pasilambena	904	0	138
3	Pasimasunggu	460	167	264
4	Taka Bonerate	587	0	40
5	Pasimasunggu Timur	359	155	0
6	Bontosikuyu	1210	110	36
7	Bontoharu	724	111	0
8	Benteng	70	2	0
9	Bontomanai	316	7	0
10	Bontomatene	465	0	114
11	Buki	347	1	0
Total		5979	553	806

Sumber : BPS, Kabupaten Selayar Tahun 2010

Peran penting sumber daya laut terhadap perekonomian penduduk dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk yang sebagian besar tergantung pada laut. Pada tahun 2009 terhadap sekitar 5.979 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki mata pencaharian utama dari perikanan laut, sedangkan tambak sebanyak 553 rumah tangga dan rumput laut 806 rumah tangga (tabel 1.1). Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian dari sub sektor

perikanan laut tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Bontosikuyu yaitu sebanyak 1.210 rumah tangga. Jumlah rumah tangga yang memiliki mata pencaharian dari perikanan laut selalu meningkat dari tahun ke tahun karena sebagian anggota rumah tangga tersebut akan mandiri membentuk rumah tangga baru dengan mata pencaharian yang sama dengan orang tua.

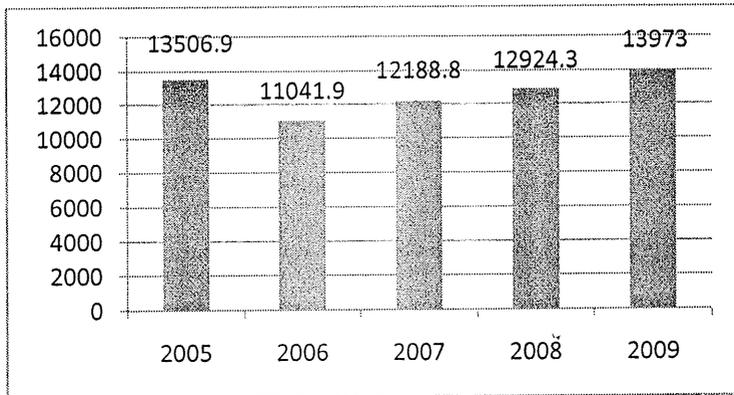
Perikanan tambak hanya berkembang di empat kecamatan diantaranya Kecamatan Pasimasunggu Timur. Hal ini berkaitan dengan kondisi topografi suatu daerah sehingga ada daerah yang cocok untuk pengembangan tambak dan ada yang tidak. Di sisi lain rumput laut baru berproduksi dalam dua tahun terakhir meskipun jenis tanaman ini sudah diujicoba dalam beberapa tahun yang lalu. Sebagian uji coba rumput laut tidak memberikan hasil yang optimal. Hal ini juga berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan penduduk yang belum terbiasa melakukan budidaya rumput laut. Selain itu kondisi iklim di daerah setempat juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan rumput laut. Salah satu kecamatan yang berhasil mengembangkan rumput laut adalah Kecamatan Bontomatene dengan 114 rumah tangga pada tahun 2009.

B. Potensi Perikanan Laut

Kapasitas produksi perikanan laut di Kabupaten Kepulauan Selayar bersifat fluktuatif. Pada tahun 2005 produksi perikanan laut mencapai 13,5 ribu ton kemudian menurun menjadi 11 ribu ton pada tahun 2006 dan kembali meningkat menjadi 13,97 ribu ton pada tahun 2009. Produksi perikanan laut ini berhubungan dengan berbagai faktor seperti peralatan tangkap, populasi ikan, maupun kondisi iklim. Peralatan tangkap yang digunakan penduduk di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tampaknya tidak mengalami perkembangan yang cepat. Sebagian besar nelayan tetap menggunakan peralatan tangkap yang sederhana seperti jaring, pancing, sero dan bubu. Sero merupakan salah satu alat tangkap yang penggunaannya sudah berkurang karena hasil tangkap dari alat ini terus menurun. Seperti yang terjadi di Kecamatan Buki, alat tangkap sero sudah tidak ditemui lagi di daerah ini.

Armada tangkap yang digunakan nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar juga tidak mengalami pergeseran. Sebagian besar nelayan menggunakan perahu mesin dengan kapasitas 5-8 PK, sehingga mereka hanya melaut pada jarak sekitar 2 mil dari pantai. Dalam kondisi demikian, nelayan setempat tidak bisa memanfaatkan potensi perikanan di laut dalam. Kebiasaan menggunakan armada tangkap yang memiliki kapasitas kecil ini membuat masyarakat sulit menggunakan armada tangkap yang besar karena biaya operasional yang tinggi dan waktu melaut yang lebih lama. Dengan kondisi demikian, bantuan perahu dari DKP yang memiliki kapasitas cukup besar tidak dapat dimanfaatkan penduduk.

Diagram 1.1
Produksi Perikanan laut di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2005-2009



Sumber : BPS Tahun 2010

Faktor alam yaitu gelombang kuat, pancaroba dan gelombang lemah merupakan faktor utama yang berdampak pada fluktuasi hasil perikanan laut. Pada waktu musim gelombang tenang sebagian besar nelayan dapat melaut dalam waktu yang lama sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kondisi demikian produksi ikan menjadi melimpah yang berdampak pada rendahnya harga ikan di pasar. Pada musim tersebut biasanya nelayan sulit memasarkan hasil tangkapan dengan harga yang tinggi. Keterbatasan akses pasar menjadi kendala utama

yang dihadapi nelayan. Pada waktu musim gelombang kuat harga ikan biasanya tinggi, tetapi hasil tangkapan rendah atau nelayan sering tidak melaut karena terkendala ombak yang tinggi. Dalam kondisi demikian nelayan biasa bekerja sebagai petani tanaman pangan ataupun beternak sapi/kambing.

Tabel 1.2.
Produksi Perikanan Laut Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2009

No	Kecamatan	Laut	Rumput laut	Tambak
1	Pasimaranmu	1957,4	2192,53	0
2	Pasilambena	1325,7	716,32	0
3	Pasimasunggu	1204,6	830,47	45,58
4	Taka Bonerate	1325,8	10,5	0
5	Pasimasunggu Timur	1136,2	0	46,48
6	Bontosikuyu	1523,4	881,19	43,96
7	Bontoharu	1681,8	0	174,35
8	Benteng	94,3	0	0,15
9	Bontomanai	968,1	0	1,92
10	Bontomatene	1364,7	108,14	0
11	Buki	1391	0	0,09
Kabupaten (2009)		13973	4739,15	312,53

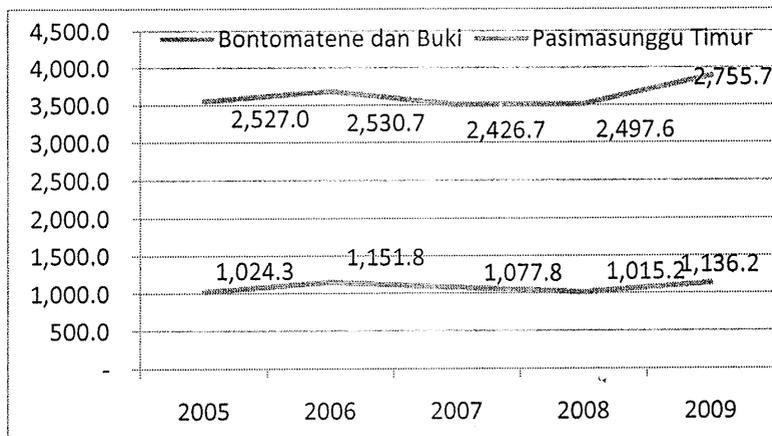
Sumber : BPS tahun 2010

Produksi ikan laut di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2009 mencapai 13.973 ton, rumput laut 4,7 ribu ton dan tambak 312 ton. Produksi ikan tertinggi terdapat di Kecamatan Pasimaranmu yaitu 1,9 ribu ton dan terendah di Kecamatan Benteng yaitu 94 ton. Produksi ikan yang rendah di Kecamatan Benteng lebih disebabkan oleh sedikitnya jumlah nelayan di daerah tersebut. Kecamatan Benteng merupakan ibu kota kabupaten sehingga sebagian besar penduduknya bekerja di sektor jasa dan perdagangan. Jumlah rumah tangga nelayan di Kecamatan Benteng pada tahun 2009 hanya 70 rumah tangga. Berbeda halnya dengan Pasimaranmu dengan jumlah rumah tangga nelayan sekitar 524 rumah tangga yang berdampak pada tingginya produksi ikan di kecamatan tersebut. Jumlah rumah tangga nelayan di Bontosikuyu mencapai 1.210 rumah tangga, tetapi produksi ikan di

kecamatan ini lebih rendah dibandingkan dengan Pasimaranmu. Hal ini menunjukkan produksi ikan per rumah tangga di daerah ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain.

Jumlah rumah tangga nelayan di Kecamatan Buki dan Bontomatene pada tahun 2009 masing-masing sebanyak 347 dan 465 rumah tangga. Kedua kecamatan ini tidak memiliki lahan tambak karena kondisi topografi daerah yang tidak mendukung. Budidaya rumput laut hanya diusahakan di Bontomatene yaitu sebanyak 114 rumah tangga. Rumput laut yang dibudidayakan di Bontomatene juga mengalami pasang surut tergantung pada kondisi iklim. Pada tahun 2010 hasil rumput laut di kecamatan ini cukup tinggi sehingga masyarakat bersemangat untuk membudidayakan kembali. Rumput laut juga pernah diuji coba di Buki, tetapi tidak berhasil sehingga masyarakat tidak berminat lagi untuk mengembangkannya.

Diagram 1.2.
Produksi Ikan di Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Bontomatene
Tahun 2005-2009



Sumber : BPS tahun 2010

Produksi ikan di Buki dan Bontomatene dari tahun 2005-2009 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2005 produksi ikan di kedua kecamatan mencapai 2.527 ton kemudian meningkat menjadi 2.530,7 ton pada

tahun 2006 tetapi menurun menjadi 2.426 ton pada tahun 2007. Fluktuasi produksi ikan di kedua kecamatan tersebut tidak terlepas dari fluktuasi keadaan musim. Nelayan bahkan merasa kesulitan untuk menentukan bulan musim gelombang tenang, pancaroba dan gelombang kuat. Ikan hasil tangkapan nelayan Buki dan Bontomatene biasanya dijual di daerah setempat baik di pasar tingkat desa maupun pasar kecamatan dan kabupaten.

Jumlah rumah tangga nelayan di Kecamatan Pasimasunggu Timur pada tahun 2009 sebanyak 359 nelayan. Berbeda dengan Kecamatan Buki dan Bontomatene, wilayah Pasimasunggu Timur cocok untuk kegiatan budidaya ikan tambak dengan jumlah rumah tangga yang mempunyai usaha tersebut sebanyak 155 rumah tangga. Hasil perikanan laut di daerah ini cukup stabil dari tahun 2005-2009. Pada tahun 2005 produksi ikan mencapai 1.024 ton, dan meningkat menjadi 1.136 ton pada tahun 2009.

C. Program Penyelamatan Terumbu Karang

Sebagai respons terhadap pengelolaan sumber daya laut yang belum optimal maka Kabupaten Kepulauan dijadikan sebagai salah satu lokasi program penyelamatan terumbu karang (COREMAP) yang telah berlangsung pada kurun waktu 2006-2010 dan telah diperpanjang sampai dengan tahun 2011. Dalam program COREMAP II, pelaksanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang telah didesentralisasi ke pemerintah kabupaten dengan sistem pendanaan yang berkelanjutan dan dikoordinir secara nasional. Pendanaan program COREMAP II juga didukung oleh dana pendamping dari Kabupaten Kepulauan Selayar, meskipun dalam persentase yang kecil. Desentralisasi kegiatan tersebut dimaksudkan agar COREMAP II dapat mendukung dan sekaligus melakukan kerjasama dalam pengelolaan (co-management) secara berkelanjutan. Tujuan pelaksanaan COREMAP II tersebut adalah untuk mengelola ekosistem terumbu karang agar dapat direhabilitasi, diproteksi dan sekaligus dapat memberi kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir serta dapat menekan tingkat kemiskinan.

Kegiatan COREMAP II dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai respons adanya kerusakan ekosistem terumbu karang yang saat ini berada dalam kategori "sedang", dengan kisaran persentase tutupan karang hidup antara 26-49 (CRITC Kabupaten Kepulauan Selayar 2010: hal 236). Hal ini berarti bahwa di beberapa desa COREMAP II kualitas terumbu karang masih ada yang bagus (di atas 49 persen) dan sebaliknya masih banyak mengalami kerusakan serius (di bawah 26 persen). Kerusakan ekosistem terumbu karang tersebut telah memperburuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dalam laporan penelitian sebelumnya (Suko Bandiyono dkk. 2010) dikemukakan bahwa kerusakan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Selayar diperkirakan mencapai 30 persen dari 2.000 hektar yang ada, padahal sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada daya dukung sumber daya laut, termasuk ekosistem terumbu karang.

Ekosistem terumbu karang merupakan "rumah ikan", yaitu tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut. Terumbu karang yang ada tersebut telah menjadi habitat kehidupan 375 jenis ikan pelagis, demersial dan ikan hias dan 4 jenis penyu (Project Management Unit Kab. Selayar. 2006 : 1, Mimeograph). Hasil penelitian CRITC-COREMAP II-LIPI (2007) menunjukkan bahwa untuk karang hidup (LC) tidak terlihat perbedaan persentase tutupan yang signifikan antara tahun 2006 dengan LC 33,48 % dan pada tahun 2007 sebesar 33,91 %. Selain itu biota CMR mengalami penurunan dari 948 individu/ha pada tahun 2006 menjadi 836 individu/ha pada tahun 2007. Hal ini tidak lepas dari penangkapan ikan yang sifatnya destruktif dilakukan oleh nelayan lokal, dan terutama oleh nelayan yang datang dari kabupaten tetangga yaitu Bulukumba, Sinjai, Bantaeng dan Jenepono (Bandiyono, dkk 2006).

Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan hasil dan dampak yang diharapkan dalam program tersebut, telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan melakukan survei aspek sosial-ekonomi pada tahun 2006, tahun 2008 dan dilanjutkan penelitian kualitatif tahun 2010. Kemudian pada bulan April 2011 telah diadakan survei terakhir Benefit Monitoring dan Evaluation

(BME). Dengan adanya survei BME tersebut dapat diketahui seberapa jauh kinerja kegiatan COREMAP II yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan bulan April 2011.

Sejalan dengan penelitian BME sosial ekonomi, juga dilakukan penelitian monitoring kesehatan terumbu karang oleh PMA-LIPI dengan mengambil sampel di 90 persen lokasi permanen plot situs terumbu karang dan di DPL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tutupan karang hidup di lokasi permanen plot sejak tahun 2006 terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 40 %, namun tutupan karang hidup di DPL justru mengalami penurunan -12 %. Penelitian evaluatif ini telah memberikan data dan informasi yang relevan baik positif maupun beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program COREMAP II. Survei BME tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan guna menentukan kebijakan COREMAP lebih lanjut khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 1.3.
Trend Tutupan Karang Hidup Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Di Lokasi Plot Permanen dan di DPL 2006-2011

Tahun	Plot permanen	DPL
2006	32	34
2007	34	36
2009	36	38
2010	43	30
2011	45	T,A
% kenaikan	40	-12

Sumber : PMA August 2011, Monthly Report

Buku bunga rampai ini merupakan kumpulan tulisan yang didasarkan pada hasil penelitian sosial ekonomi COREMAP tahun 2011 yang merupakan evaluasi akhir dari rangkaian penelitian sebelumnya. Buku ini memberikan informasi tentang aspek sosial-ekonomi masyarakat di wilayah Pulau Kecil dan daratan Pulau Selayar. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi upaya pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan

Selayar agar mampu tumbuh serasi dan mampu memecahkan masalah yang ada. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan maritim melalui pendayagunaan sumberdaya alam laut dan sumberdaya manusia dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2010. Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Angka,
- CRITC-COREMAP II Kabupaten Kepulauan Selayar. 2010. Laporan Survey Kondisi Ekosistem Terumbu Karang (*Reef Health Monitoring*). Selayar CRITC Kabupaten Kepulauan Selayar.
- PMA August 2011, Monthly Report
- Bandiyono, Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo, 2006. *Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang di Kabupaten Selayar*, Jakarta, P2O- LIPI.
- Bandiyono, Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo. 2008. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II : Kasus Kabupaten Selayar*. Jakarta, LIPI Press.

Oleh : Toni Soetopo dan Suko Bandiyono

A. Pengantar

Realisasi program penyelamatan sumber daya terumbu karang di tingkat kabupaten dapat dilihat mulai tingkat kabupaten, sampai dengan desa lokasi program. Oleh sebab itu, uraian realisasi program dalam bagian ini meliputi realisasi tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Di tingkat kabupaten pengelolaan COREMAP fase II dilakukan oleh Project Management Unit (PMU) atau *Project Implementation Unit* (PIU) yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Struktur organisasi pengelolaan COREMAP fase II meliputi beberapa komponen yaitu, kesadaran masyarakat (*Public Awareness/PA*), pengelolaan berbasis masyarakat (*Community Based Management/CBM*), pengawasan (*monitoring, controlling and surveillance/MCS*) dan pusat informasi dan pelatihan (*coralreef information and training center/CRITICs*). Selain itu untuk menjalankan kegiatan pelestarian dan pemanfaatan ekosistem terumbu karang COREMAP fase II juga melibatkan berbagai instansi terkait, seperti: Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat, Kepolisian dan TNI-AL.

Sebagai upaya untuk menyukseskan COREMAP fase II di tataran desa, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pendekatan partisipatif melalui pengelolaan berbasis masyarakat. Hal ini berarti bahwa kegiatan COREMAP fase II di desa telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan, seperti dana bergulir (*seed fund*), *village grant*, dan

pengawasan. Berkaitan dengan itu, di tingkat desa dibentuk Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK), yang kemudian membentuk 3 Pokmas, yaitu: Pokmas Koservasi/perlindungan terumbu karang, Pokmas Jender (Perempuan) dan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk mencapai keberhasilan program tersebut LPSTK dibantu oleh SETO, Fasilitator Desa dan Motivator Desa. Dalam tahun 2011 keberadaan SETO telah ditiadakan, mengingat keterbatasan dana. Pada tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Selayar keberadaan Fasilitator Desa akan dibatasi hanya 4 orang untuk memfasilitasi dan mengcover 52 desa COREMAP. Meskipun demikian, di tiap desa COREMAP masih tetap dipertahankannya keberadaan Motivator Desa (MD).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program penyelamatan terumbu karang yang dilihat dari aspek kesadaran masyarakat, kegiatan pengawasan, pengelolaan berbasis masyarakat. Dalam pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penelitian menggunakan wawancara mendalam, pengamatan (*observasi*) dan FGD. FGD dilakukan dengan stakeholder terkait, seperti Ketua LPSTK, Ketua Pokmas, Kepala Desa dan nelayan. Analisis dalam tulisan ini menggunakan deskriptif analisis.

B. Penyadaran Masyarakat

Di tingkat kabupaten kegiatan penyadaran masyarakat dilakukan melalui delapan program, yaitu : (1) sosialisasi *public awareness*; (2) pembuatan poster, kaos, *billboard* dan kalender; (3) cerdas cermat untuk SMU sederajat, (4) penulisan karya ilmiah untuk SMU sederajat; (5) *jurnal writing* untuk para wartawan; (6) pelatihan penggunaan kurikulum SD-SMA yang dilakukan secara kontraktual; (7) percetakan buku muatan lokal; (8) pameran dan konas. Kegiatan sosialisasi COREMAP II telah dilaksanakan pada tahun 2006 di semua lokasi COREMAP II yang berada di daratan pulau besar. Sedangkan sosialisasi di wilayah pulau-pulau kecil dan 10 desa COREMAP dilaksanakan pada tahun 2008.

Desa Buki

Sosialisasi kegiatan COREMAP II di Desa Buki telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Pada tahun 2008, kegiatan sosialisasi ditujukan kepada masyarakat Desa Buki yang dilakukan di pondok informasi, dengan melibatkan Fasilitator Desa, Motivator Desa, pengurus LPSTK, warga masyarakat dan aparat desa. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan oleh tim dari PA-COREMAP tingkat kabupaten. Selain dilakukan tim tingkat kabupaten, kegiatan sosialisasi di Desa Buki juga dilakukan oleh Fasilitator Desa (FD) bersama Motivator Desa (MD) dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan warga desa. Hasil nyata kegiatan sosialisasi tersebut, memperlihatkan bahwa pada umumnya warga Desa Buki telah mengetahui keberadaan COREMAP II dan mengetahui pentingnya penyelamatan terumbu karang yang saat ini kondisinya telah rusak.

Sejak tahun 2006 di Desa Buki dibangun pondok informasi yang menempati bangunan milik desa. Bangunan tersebut tadinya merupakan dari bagian sekolah yang telah telah direlokasi dengan ukuran 6 x 10 m. Untuk memperbaiki dan pengadaan perlengkapan pondok informasi telah menghabiskan dana sebesar 10 juta rupiah. Perlengkapan pondok informasi antara lain, meja, kursi dan lemari. Data dan informasi berkaitan dengan COREMAP ditempatkan/ ditempel di dinding. Kegiatan sosialisasi COREMAP lewat pondok informasi cenderung mengalami penurunan, dan pondok informasi tersebut lebih banyak ditutup sejak tahun 2008. Dalam bulan April 2011 pihak Kepala Desa Buki telah memberi izin kepada organisasi kepemudaan desa Buki yang bergerak dalam kegiatan sepakbola untuk menempati bangunan pondok informasi.

Desa Bungaiya

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Desa Bungaiya tidak berbeda dengan pelaksanaan sosialisasi yang diadakan di Desa Buki. Tahun 2008 sosialisasi diadakan di tempat pertemuan di Baruga Sejahtera oleh tim dari COREMAP Kabupaten dibantu oleh FD, LPSTK. Sosialisasi berikutnya diadakan tahun 2010 dihadiri

sekitar 40 orang warga setempat. Dalam pelaksanaan sosialisasi kendati ada respons positif dari masyarakat Bungaiya, namun karena keterbatasan waktu dan materi sosialisasi, nampaknya penerimaan pengetahuan tentang substansi COREMAP II belum sepenuhnya dapat dipahami. Meskipun demikian, pada saat penelitian tahun 2011, memperlihatkan sebagian besar masyarakat Desa Bungaiya telah mengetahui bahwa COREMAP II bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini terkait dengan keterlibatan sebagian penduduk dalam kegiatan COREMAP II, khususnya dalam proses alih pengetahuan dan kegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan tahun 2010. Melalui tatap muka masyarakat banyak yang mengetahui keberadaan pengurus LPSTK, MD dan FD, meskipun banyak menilai kegiatan mereka tidak optimal. Dalam perjalanannya, pengurus LPSTK, MD dan FD beberapa kali telah mengalami pergantian.

Pada tahun 2010, LPSTK di Desa Bungaiya telah membangun pondok informasi yang berdiri di atas tanah hibah milik M. Rosyid dengan menghabiskan dana 50 juta, yang memiliki bangunan ukuran 4x10m. Pondok informasi tersebut, sampai dengan tahun 2011 belum pernah dimanfaatkan, meskipun telah memiliki perlengkapan meja, kursi papan tulis dan lemari. Ada rencana pondok informasi tersebut akan digunakan bersama, yaitu untuk perpustakaan desa, kantor Gapoktan dan kantor LPSTK. Sebelum pondok informasi tersebut dibuat, tepatnya tahun 2006, keberadaan pondok informasi menempati bangunan milik pemerintah desa, yang bersebelahan dengan kantor desa Bungaiya. Dana sebesar 10 juta rupiah telah dimanfaatkan untuk perbaikan bangunan dan dana kontrak. Meskipun di pondok informasi telah ditempel berbagai poster data yang berkaitan dengan COREMAP, namun tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan, termasuk kegiatan LPSTK dan FD serta MD.

Desa Bontobaru

Walaupun sejak tahun 2005 COREMAP mulai diadakan di desa ini, namun belum semua masyarakat mengetahui keberadaan COREMAP. Untuk memperkenalkan kegiatan COREMAP, maka dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan

pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian terumbu karang. Sosialisasi COREMAP awalnya ditujukan kepada para pengurus LPSTK dan Pokmas oleh tim dari PA-COREMAP tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya mulai tahun 2006 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan pengurus LPSTK dibantu Fasilitator Desa (FD), dan Motivator Desa (MD). Selain pengurus LPSTK, kegiatan sosialisasi melibatkan aparat desa, karena sebagian aparat desa juga menjadi pengurus LPSTK atau Pokmas.

Hal itu dilakukan agar supaya masyarakat, terutama masyarakat nelayan mengerti dan memahami tujuan utama kegiatan COREMAP. Kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan di Balai Desa atau Pondok Informasi. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan warga desa baik pada saat ada kegiatan desa maupun pada saat sholat Jum'at. Hasil sosialisasi kegiatan COREMAP II di Desa Bontobaru memperlihatkan bahwa masyarakat desa tersebut telah mengetahui keberadaan COREMAP II. Selain itu, masyarakat mulai menyadari dan mengetahui pentingnya penyelamatan terumbu karang, yang saat ini kondisinya sudah rusak cukup parah. Penyelamatan terumbu karang penting karena terumbu karang merupakan tempat pemijahan ikan dan udang. Apabila terumbu karang menjadi baik, ikan dapat berkembang dengan baik, maka pendapatan nelayan semakin meningkat.

Pondok informasi sebagai pusat informasi tentang kegiatan COREMAP di Desa Bontobaru dibangun pada tahun 2006 yang lokasinya menempati sebagian bangunan milik desa dengan luas sekitar 9 m², dengan menghabiskan biaya sekitar Rp 10 juta. Biaya tersebut antara lain, untuk pengecatan, dan pembelian meja-kursi dan almari. Kegiatan sosialisasi COREMAP melalui Pondok Informasi saat ini memperlihatkan mengalami penurunan, hal tersebut karena fasilitator desa, sering tidak berada di lokasi, sementara motivator desa dan pengurus LPSTK kurang memiliki inisiatif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan observasi tahun 2008 dan 2011 dan wawancara dengan pengurus LPSTK dan Kepala Desa Bontobaru serta Motivator Desa, menyebutkan bahwa sarana dan prasarana di dalam Pondok

Informasi kurang memadai, alat peraga untuk sosialisasi (leaflet, poster, buku panduan) yang berkaitan dengan program COREMAP jumlahnya sangat terbatas, bahkan sangat minimal. Selain itu, terbatasnya peralatan (mesin ketik, megaphone, alat tulis kantor dan fasilitas meja kursi) dapat mengganggu kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi kegiatan COREMAP kepada masyarakat. Bahkan sejak tahun 2008 pondok informasi lebih banyak tutup, karena kurang aktifnya pengurus LPSTK.

Untuk membantu pembangunan Desa, COREMAP, selain membangun pondok informasi juga memberi dana pembangunan desa berupa dana “*village grant*” setiap Desa sebesar Rp 50 juta. Dana tersebut di Desa Bontobaru sudah turun dua kali pada tahun 2008 dan 2010. Di Desa Bontobaru dana *village grant* yang pertama dipergunakan untuk membangun fasilitas TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur’an) dan pengerasan jalan sekitar desa, dan drainase, serta pembuatan talut pemecah ombak. Pada tahap kedua diergunakan untuk MCK, jaringan pipa sarana air bersih dan sistem drainase desa.

Desa Bontobulaeng

Sosialisasi kegiatan COREMAP II di Desa Bontobulaeng dilakukan sejak tahun 2006. Sosialisasi COREMAP pada awalnya dilakukan dan ditujukan kepada pengurus LPSTK dan Pokmas oleh tim dari PA- COREMAP Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya pada tahun 2008 kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pengurus LPSTK dibantu Fasilitator Desa (FD) dan Motivator Desa (MD) yang ditujukan kepada masyarakat. Selain pengurus LPSTK kegiatan sosialisasi melibatkan aparat desa, karena sebagian aparat desa menjadi pengurus LPSTK atau Pokmas. Selain itu kegiatan sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat seperti guru dan tokoh agama. Hal itu dilakukan agar supaya masyarakat, terutama masyarakat nelayan mengerti dan memahami tujuan utama kegiatan COREMAP yaitu penyelamatan terhadap terumbu karang. Kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan di Pondok Informasi, di Balai Desa dan di Masjid. Pondok Informasi di Desa Bontobulaeng lokasinya menjadi satu dengan kantor Desa dengan menempati sebagian ruang Kantor Desa.

Proses sosialisasi juga dilakukan dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan warga desa baik pada saat ada kegiatan desa maupun pada saat sholat Jum'at. Hasil sosialisasi kegiatan COREMAP II di Desa Bontobulaeng memperlihatkan bahwa masyarakat desa tersebut sebagian besar telah mengetahui keberadaan dan kegiatan COREMAP II. Selain itu, hasil sosialisasi yang dilakukan pengurus LPSTK bersama dengan Pokmas, Fasilitator dan Motivator Desa memperlihatkan saat ini masyarakat mulai menyadari dan mengetahui pentingnya penyelamatan terhadap terumbu karang, yang saat ini kondisinya sudah rusak cukup parah. Penyelamatan terumbu karang sangat penting karena terumbu karang merupakan tempat pemijahan ikan dan udang, apabila terumbu karang dapat diselamatkan dan menjadi lebih baik, ikan dapat berkembang dengan baik, sehingga pendapatan nelayan semakin meningkat dan menjadi lebih sejahtera..

Pondok Informasi sebagai pusat informasi tentang kegiatan COREMAP di Desa Bontobulaeng dan Desa Bontobaru dibangun hampir bersamaan pada tahun 2006 yang menempati sebagian bangunan kantor desa dengan luas sekitar 12 m² . Pondok informasi dibangun menghabiskan biaya sekitar Rp 10 juta, antara lain membangun tambahan ruang, menyekat ruang, pengecatan dan pembelian meja-kursi, almari dan papan nama. Kegiatan sosialisasi COREMAP melalui pondok informasi sejak tahun 2008 - 2011 sangat menurun dibandingkan tahun 2006/2007, karena Seto (senior fasilitator), dan Fasilitator Desa sering tidak berada di lokasi, sementara Motivator Desa dan pengurus LPSTK kurang memiliki inisiatif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan sejak tahun 2009 pondok informasi jarang dipergunakan sebagai tempat sosialisasi, tetapi kadang-kadang masih dipakai oleh pengurus LPSTK untuk kegiatan rapat.

Berdasarkan observasi tahun 2008 maupun 2011 dan hasil wawancara dengan Ketua LPSTK, Ketua BPD dan Kepala Desa Bontobulaeng, menyatakan bahwa sarana dan prasarana di dalam Pondok Informasi kurang memadai, alat peraga untuk sosialisasi (leaflet, poster, buku panduan) jumlahnya sangat terbatas, bahkan

sangat minimal. Peralatan untuk kegiatan Pondok Informasi, seperti mesin ketik, megaphone, alat tulis kantor dan fasilitas meja kursi juga jumlahnya terbatas sehingga mengganggu kegiatan sosialisasi dan menyampaikan informasi kegiatan COREMAP kepada masyarakat, terutama program MPA dan dana bergulir.

C. Pengawasan

Dalam laporan penelitian tahun 2010 (Suko Bandiyono, dkk, 2010) menulis, pada tataran kabupaten, bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh COREMAP II dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan di DPL, pengawasan dalam bentuk patroli di wilayah perairan desa-desa COREMAP dan pengawasan dalam bentuk SISWASMAS (sistem pengawasan masyarakat). Untuk kegiatan patroli, COREMAP II di Kabupaten Kepulauan Selayar menyediakan empat kapal yang dikelola di empat UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan) yang terdapat di pulau-pulau, yaitu UPTD Pasimasunggu, UPTD Pasimasunggu Timur, UPTD Takabonerate dan UPTD Pasilambena. Kapal-kapal patroli tersebut berukuran panjang 15 meter dan lebar 2 meter, dan berkapasitas 15 GT. Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan, kapal-kapal tersebut juga dilengkapi dengan teropong dan GPS.

Untuk biaya operasional, seperti pengadaan BBM untuk patroli, biayanya seharusnya dianggarkan dari APBD. Akan tetapi, karena biaya untuk operasional kapal-kapal tersebut pada tahun 2008 belum dianggarkan, maka biaya operasional diambilkan dari dana *illegal fishing* dan *illegal logging* yang dianggarkan ke setiap desa oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang jumlahnya untuk masing-masing desa sebesar 10 juta rupiah.

Di wilayah pulau-pulau yang lain di luar kecamatan UPTD tidak disediakan kapal patroli secara khusus, karena wilayah itu dianggap termasuk dalam rute pengawasan kapal patroli DKP. Untuk pengawasan di lokasi COREMAP II yang berada di wilayah daratan tidak disediakan kapal patroli khusus, kegiatan patroli dilakukan dengan menyewa kapal, yang dananya berasal dari APBD. Oleh

karena itu, kegiatan patroli tidak dapat dilakukan secara kontinyu. Menurut informasi dari DKP, kegiatan patroli akan dilakukan, jika sedang banyak terjadi kegiatan *illegal fishing*. Pengawasan pada umumnya hanya dilakukan satu tahun sekali, bersamaan dengan patroli yang dilakukan oleh pejabat DKP Kabupaten Kepulauan Selayar. Terbatasnya kegiatan patroli karena adanya berbagai kendala yang dihadapi, antara lain: terbatasnya anggaran, terbatasnya personil pengawasan dan terbatasnya sarana (kapal) untuk melakukan kegiatan pengawasan, sehingga PMU harus meniasati dalam menggunakan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan di setiap lokasi COREMAP II. Personil yang melakukan pengawasan dibentuk dengan SK KPA /Kepala Dinas Kelautan dengan anggota 3 orang.

Selain patroli, kegiatan pengawasan juga dilakukan melalui siswasmas (sistem pengawasan masyarakat), dengan pembentukan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas). Akan tetapi, pembentukan siswasmas itu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, karena siswasmas ini sebenarnya bukan program COREMAP II melainkan program Departemen Kelautan dan Perikanan. Karena itu tidak semua lokasi COREMAP II terdapat siswasmas, karena siswasmas tidak dibiayai oleh COREMAP II maupun DKP, tetapi biayanya berasal dari swadaya masyarakat dan pemerintah desa.

Siswasmas dimaksudkan untuk mendukung keberadaan sistem pengelolaan sumberdaya laut secara terpadu yang berbasis masyarakat, yang mengacu pada program Departemen Kelautan dan Perikanan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2000. Beberapa pertimbangan penerapan siswasmas adalah sebagai berikut. Pertama, wilayah perairan yang tergolong luas, dan memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Kedua, keterbatasan jumlah personil yang harus melakukan pengawasan. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat pemerintah, baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten maupun dari aparat keamanan yang terkait. Tiga permasalahan tersebut menimbulkan akibat yang saling terkait, sehingga pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Oleh karena itu, peran

serta dari masyarakat dalam melakukan pengawasan lingkungan pesisir sangat diperlukan.

Peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan, karena banyak masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai, sehingga memungkinkan untuk mengawasi lingkungannya setiap saat. Karena itu jika mereka dilibatkan dalam pengawasan, maka perusakan lingkungan dapat diketahui dengan lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu, mengacu pada pengalaman yang terjadi di beberapa tempat lain, beberapa komunitas terbukti telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan laut dan sumberdaya secara tradisional. Sistem yang dikembangkan oleh beberapa komunitas masyarakat pesisir itu ternyata cukup bermanfaat bagi upaya pelestarian lingkungan, dan pengawasan terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, masyarakat pesisir merupakan potensi besar yang dapat diberdayakan untuk membantu tugas pemerintah dalam mengelola sumberdaya laut. Dengan demikian, siswasmas dianggap perlu untuk dilakukan, dengan cara memberdayakan masyarakat pantai untuk melakukan pengawasan sumberdaya pesisir yang ada di sekitarnya. Dengan partisipasi masyarakat dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap sumberdaya pesisir, diharapkan beban pemerintah menjadi berkurang, dan perusakan sumber daya kelautan dapat diminimalisasi.

Sesuai dengan namanya, Siswasmas memiliki tugas untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang ada di laut, baik penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penangkapan jenis sumber daya yang dilindungi, maupun pelanggaran aturan-aturan yang lain, seperti pelanggaran zonasi penangkapan dan pencurian ikan oleh nelayan asing. Kelompok pengawasan itu selain terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, juga dilengkapi dengan seksi-seksi, seperti: seksi data dan informasi, seksi pengembangan usaha dan SDM, seksi pengawasan dan keamanan dan seksi manajemen dan organisasi.

Dalam praktiknya, kelompok pengawasan tidak harus melakukan penjagaan kawasan pesisir secara khusus, seperti

melakukan patroli laut, melainkan melakukan tindakan tertentu jika kebetulan ada yang melihat terjadinya pelanggaran. Untuk itu mereka dapat menegur langsung pelaku pelanggaran, atau melaporkannya kepada aparat terkait. Untuk mengefektifkan kegiatan MCS, dilakukan pelatihan yang diadakan pada tahun 2005, pelatihan "*Investigasi Destructif fishing*", yang diikuti oleh fasilitator dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk melakukan gerakan penekanan terhadap tindakan *destructive fishing*. Dalam pelatihan itu diajarkan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait *destructive fishing*, strategi penanganan kasus *destructive fishing*, metode pembuktian ciri-ciri fisik (organ dalam dan organ luar organisme yang ditangkap dengan menggunakan bom dan bahan kimia).

Selain pelatihan tersebut, dua jenis pelatihan lainnya juga pernah diadakan pada tahun 2005, yaitu: pelatihan operator dan perawatan kapal dan pelatihan monitoring ekosistem terumbu karang. Pelatihan operator dan perawatan kapal dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang sistem pengoperasian dan perawatan mesin kapal yang efektif dan efisien. Materi yang diajarkan adalah pengenalan GPS dan aplikasinya, perawatan kapal dan navigasi kelautan. Adapun pelatihan monitoring ekosistem terumbu karang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel yang terlibat dalam monitoring ekosistem terumbu karang di seluruh wilayah program COREMAP II Kabupaten Kepulauan Selayar. Materi yang diajarkan antara lain metode *reef check*, pengenalan alat dasar selam dan kondisi terumbu karang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menurut informasi dari DKP, kegiatan patroli hanya dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (potasium, bom) atau jika terjadi kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh pejabat DKP Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Kegiatan patroli laut oleh COREMAP II Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Tanggal	Lokasi	Peserta	Waktu	Kapal	Temuan
1	Sep-09	Perairan Selayar, Kec. Takabonerate, Bontosikuyu	10	5 hari		
2	Apr-10	Perairan Kayuadi-Jampea	10	5 hari	Kapal Reaksi Cepat COREMAP II	-
3	16 Juni 2010	Perairan Tambolongan, Appatanah, Polassi & sekitarnya	10	5 hari	Kapal Reaksi Cepat COREMAP II	Ditemukan 1 Pelaku pengeboman & 3 ABKnya
4	6 Oktober 2010		10	4 hari	Joloro nelayan	Pengeboman
5	13 Oktober 2010	Perairan Benelohe dan sekitarnya	10	3 hari	Joloro nelayan	
6	22 Oktober 2010	Perairan Takabonerate dan sekitarnya	10	7 hari	Armada DKP	
7	2-6 Nov 2010	Perairan Laiyolo Baru, Dusun Timur	10	5 hari	Kapal patroli kec. Bontosikuyu	Kepemilikan Kompresor

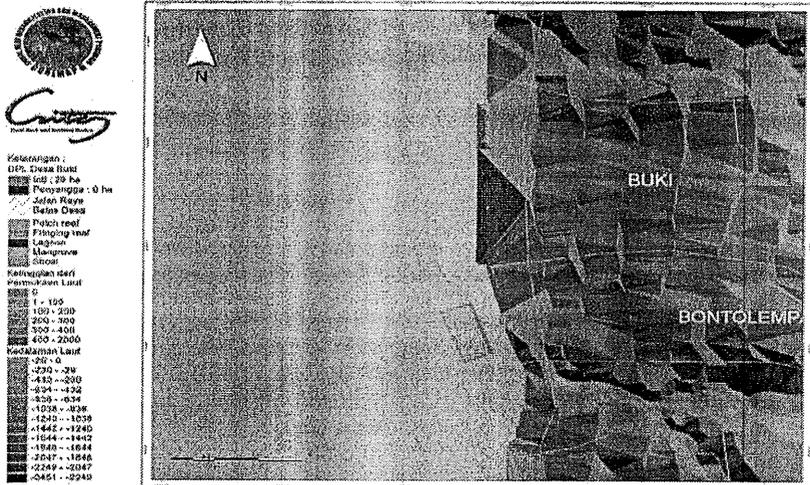
Sumber : COREMAP II Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk mengefektifkan kegiatan pengawasan keberadaan kapal patroli perlu diperbanyak. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak COREMAP II Kabupaten Kepulauan Selayar menghimbau agar sebagian dana *village grant* yang diterima oleh desa-desa lokasi COREMAP II dialokasikan untuk pembuatan kapal patroli, sehingga bisa digunakan untuk melakukan pengawasan di lokasi DPL masing-masing. Akan tetapi, hal itu sifatnya hanya himbauan, karena pada dasarnya *village grant* dapat digunakan untuk membangun berbagai

prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa, sesuai dengan keputusan masyarakat desa itu. Karena itulah tidak semua desa COREMAP II mengalokasikan *village grant* yang diterima untuk membuat kapal patroli. Bagi yang tidak memiliki kapal patroli, kegiatan pengawasan lebih mengandalkan pada kapal patroli yang dimiliki oleh UPTD yang ada di kecamatan.

Desa Buki

Berdasarkan hasil penelitian Survey Kondisi Ekosistem Terumbu Karang oleh Critc Kabupaten Kepulauan Selayar (2010 : 33-35) menunjukkan bahwa kondisi ekosistem terumbu karang di Desa Buki berada dalam kondisi yang buruk dengan jumlah persentase tutupan karang hidup hanya sebesar 44 persen. Komposisi tutupan karang terdiri dari Acropora 18 persen dan komponen Non Acropora sebesar 26 persen. Adapun komponen non coral yang menyusun ekosistem ini berjumlah 56 persen dengan komposisi penyusun, yaitu DCA sebesar 34 persen, Algae 2 persen, Pasir 18 persen, dan Pasir Berlumpur 2 persen.

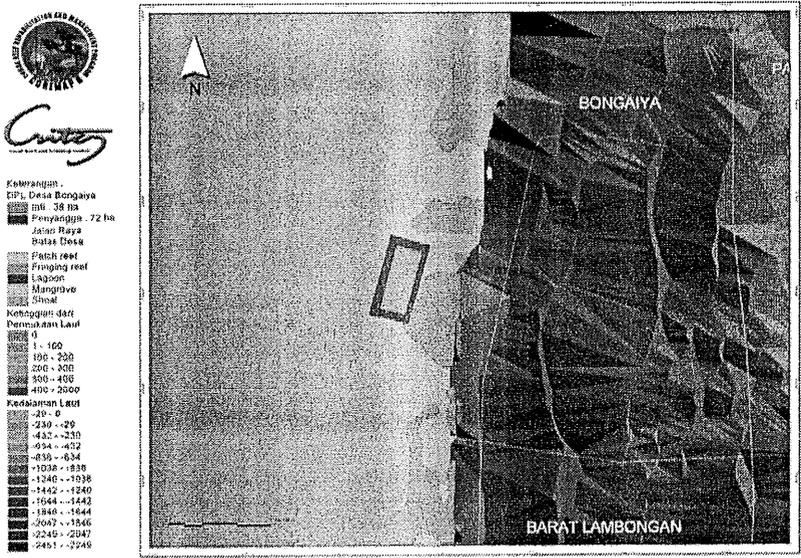


Jika dibandingkan dengan kondisi tutupan karang tahun 2009 dengan tahun 2010, terjadi penurunan sebesar 2 persen untuk

komponen karang hidup dari 48 persen pada tahun 2009 menjadi 46 persen. Tetapi apabila dilihat dari komponen-komponen penyusunnya, terjadi penurunan pada komponen Acropora dari 20 persen pada tahun 2009 menjadi 18 persen pada tahun 2010. Di samping itu tidak terjadi perubahan pada komponen non acropora di mana persentase tutupan karang tetap sebesar 26 persen.

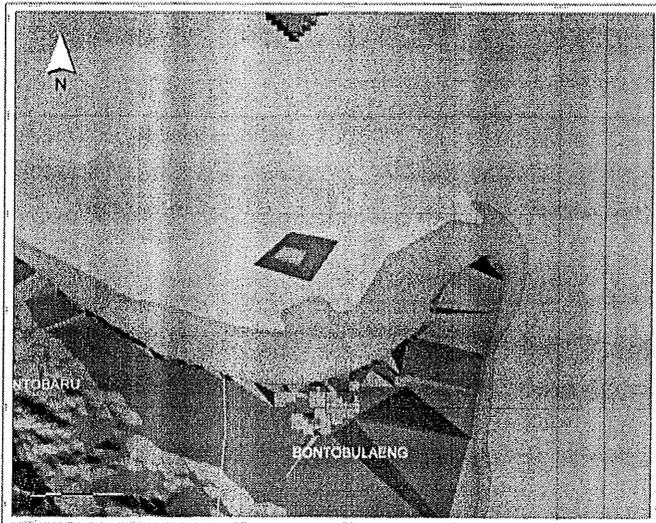
Desa Bungaiya

Hasil Survei Kondisi Ekosistem Terumbu Karang (2010 : 82-83), menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di DPL Desa Bungaiya termasuk kategori baik dengan persentase karang hidup sebesar 60 persen. Karang hidup tersebut didominasi oleh Karang Lunak sebesar 42 persen dan non acropora sebesar 18 persen. Jika dibandingkan dengan persentase karang hidupnya, maka persentase karang mati di daerah ini relative kecil sebesar 28 persen, yang didominasi oleh koral mati (*dead coral*), alga sebesar 12 persen, karang mati 16 persen dan komponen *fleshy seaweed* sebesar 2 persen.



Desa Bontobaru

Hasil Survey Kondisi Ekosistem Terumbu Karang (2010 : 50) memperlihatkan bahwa kondisi terumbu karang di Desa Bontobaru termasuk kategori sedang dengan persentase sebesar 26 persen. Karang hidup yang terdapat di lokasi ini hanya non acropora. Tingkat kematian karang sangat tinggi yaitu sebesar 54 persen yang didominasi oleh patahan karang sebesar 42 persen, *dead coral alga* sebesar 12 persen dan *dead coral* sebesar 2 persen. Komponen subtrak yang lain sebesar 18 persen, yang terdiri dari pasir 16 persen dan subtrak lain sebesar 2 persen.



Desa Bontobulaeng

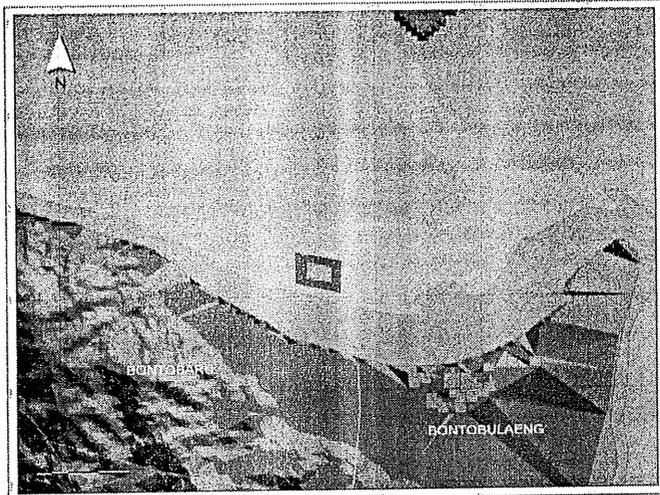
Kondisi ekosistem terumbu karang di wilayah DPL Desa Bontobulaeng tergolong buruk dengan persentase karang hidup hanya 14 persen yang terdiri 6 persen karang acropora, 4 persen non acropora dan 4 persen soft coral. Persentase karang mati di lokasi ini sangat tinggi mencapai 48 persen yang terdiri dari 26 persen *dead coral alga* dan 22 persen patahan karang (ruble). Sedangkan

komponen subtrak yang lain berupa pasir sebesar 38 persen (Critc 2010 : 49-50).



Keterangan

0-12 ha	DPL Desa Boninbaru
13-42 ha	Penyusung
43-100 ha	Jalur Sempit
101-200 ha	Batas Desa
201-300 ha	Perahu
301-400 ha	Pesanggrahan
401-500 ha	Lempungan
501-600 ha	Mangrove
601-700 ha	Strait
701-800 ha	Pembagian dari
801-900 ha	Perumahan Laut
901-1000 ha	0
1001-1100 ha	1 - 100
1101-1200 ha	100 - 200
1201-1300 ha	200 - 300
1301-1400 ha	300 - 400
1401-1500 ha	400 - 500
1501-1600 ha	500 - 600
1601-1700 ha	600 - 700
1701-1800 ha	700 - 800
1801-1900 ha	800 - 900
1901-2000 ha	900 - 1000
2001-2100 ha	1000 - 1100
2101-2200 ha	1100 - 1200
2201-2300 ha	1200 - 1300
2301-2400 ha	1300 - 1400
2401-2500 ha	1400 - 1500
2501-2600 ha	1500 - 1600
2601-2700 ha	1600 - 1700
2701-2800 ha	1700 - 1800
2801-2900 ha	1800 - 1900
2901-3000 ha	1900 - 2000



D. Pengelolaan Berbasis Masyarakat (CBM)

Dalam manajemen COREMAP II telah ditentukan bahwa semua desa yang menjadi obyek kegiatan CBM harus memiliki kelembagaan LPSTK. Selanjutnya LPSTK membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdiri, Pokmas Konservasi/pengawasan, Pokmas Jender, dan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pembentukan lembaga tersebut harus melibatkan masyarakat desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dengan bimbingan SETO dan FD.

Pada tahun 2009 CBM Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pelatihan tentang pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang kepada kelompok masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan umum pelatihan ini adalah :

- (1). Memberikan pengayaan pengetahuan dan keterampilan mengenai sistem pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat.

- (2) Menggali dan memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan terumbu karang berkelanjutan.

Adapun tujuan khusus pelatihan yaitu :

- (1) Memahami konsep banding dan komponen sistem pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan.
- (2) Memiliki wawasan dalam dalam melaksanakan pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan.

Peserta pelatihanterdiri dari (1) Tokoh masyarakat dan Pokmas yang memiliki peran dalam pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. (2) Aparat pemerintah terkait dari Kabupaten Kepulauan Selayar dan stakeholder lainnya dari COREMAP II. Pelatihan dilaksanakan pada Bulan Agustus-Desember 2009, bertempat di kota Benteng –Selayar. Materi yang diberikan antara lain terdiri : (1) Pengelolaan Konservasi laut berbasis masyarakat, (2). Pembelajaran Implementasi COREMAP II. Peserta terdiri dari Staf PMU, COREMAP II Kab. Kepulauan Selayar, Anggota LPSTK dan Pokmas yang berasal dari 19 desa.

Desa Buki

Pembentukan LPSTK di Desa Buki dilakukan pada tahun 2005 yang pelaksanaannya bertempat di kantor desa dengan mengundang masyarakat setempat yang dianggap potensial untuk dipilih sebagai sebagai pengurus LPSTK. Pembentukan LPSTK diawali dengan penjelasan dari SETO yang didampingi oleh FD dan MD tentang maksud dan tujuan pembentukan LPSTK. Dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Buki kemudian diadakan pemilihan secara langsung demokratis untuk memilih Ketua LPSTK dan ketua-ketua Pokmas.

Dalam kenyataan yang dipilih menjadi pengurus LPSTK adalah elit desa, yang belum tentu memiliki niat untuk menduduki jabatan tersebut, karena telah sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Ketua LPSTK yang dipilih oleh masyarakat pada tahun 2005 mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha, sehingga kurang optimal dalam mengembangkan LPSTK. Pada tahun 2007 ketua LPSTK diganti oleh

Pak Fachrudin yang mempunyai kegiatan sebagai nelayan tangkap tradisional. Pada saat kami wawancarai ternyata Ketua LPSTK baru yang mempunyai latar belakang nelayan tradisional, pengetahuan tentang kegiatan COREMAP II di desa tersebut cukup memadai dan mempunyai keinginan untuk memajukan kegiatan COREMAP. Ia juga pernah ikut studi banding ke Jakarta tahun 2009. Namun demikian, kegiatan LPSTK mengalami hambatan, karena kendala pendanaan, sehingga rapat dengan ketua-ketua Pokmas tidak pernah dilakukan. Dalam hal MD, FD dan SETO jarang berada di lokasi COREMAP, sehingga tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan pengurus LPSTK. Hal itu, karena lemahnya tanggungjawab atau dedikasi, meskipun secara formal mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dalam kontrak kerja.

Pokmas jender yang anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga, sampai dengan tahun 2011 tidak pernah aktif meskipun beberapa orang anggotanya pernah menerima pelatihan tentang bagaimana berusaha dalam memanfaatkan potensi lokal, antara lain teknologi pembuatan baso ikan, pembuatan kerupuk dan pembuatan minyak kelapa. Setelah mengikuti pelatihan, kelompok jender di Desa Buki telah menerima bantuan peralatan masak antara lain berupa kompor minyak tanah, panci, ayakan tepung, dan penggorengan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh MD dan FD, terhadap kelompok jender tidak berjalan sesuai dengan program COREMAP. Selain itu, kemauan dari kelompok jender untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif juga sangat lemah.

LKM yang mengurus dana bergulir pengurusnya dipilih dalam forum rapat desa yang dihadiri oleh masyarakat, pengurus LPSTK, dan aparat pemerintah desa Buki. Hasil pemilihan memutuskan bahwa Pak Usman (pensiunan guru agama di SD) dipilih menjadi ketua LKM. Ia sudah dua kali menerima pelatihan pengelolaan LKM yang diselenggarakan COREMAP di kota Benteng. Sampai bulan Maret tahun 2011 Pak Usman masih mengetuai pengelolaan dana simpan pinjam, meskipun ia berkeinginan untuk diganti. Di Desa Buki dana bergulir telah turun dua kali masing-masing 25 juta rupiah. Dana yang bergulir di masyarakat masih memanfaatkan dana tahap pertama.

Dana tahap pertama cair tahun 2008, dan langsung dibagikan kepada peminjam yang sudah dua tahun menunggu, masing-masing satu juta rupiah. Dalam kenyataan peminjam bukanlah kelompok tetapi adalah perorangan. Adapun dana tahap ke dua turun tahun 2010 sebesar 25 juta masih disimpan di Bank Rakyat Indonesia. Untuk mencegah agar para peminjam bersedia mengembalikan pinjaman, diwajibkan untuk menyerahkan tanggungan berupa surat tanah, surat BPKB atau perhiasan emas. Pada tahap pertama dana *seed fund* digulirkan peminjam dikenakan bunga 1 persen, kemudian pada tahun 2010 bunga pinjaman dinaikkan menjadi 1,5 persen sebulan. Waktu peminjaman dibatasi selama 10 bulan dan dapat diperpanjang setelah peminjam melunasi pinjamannya.

Desa Bungaiya

Di Desa Bungaiya struktur organisasi dalam LPSTK tidak berbeda dengan desa lain yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Selain LPSTK terdapat Pokmas yang meliputi Pokmas Pengawasan/konservasi, Pokmas Jender dan Pokmas UEP. Pembentukan kepengurusan tersebut terjadi pada tahun 2005. Kegiatan LPSTK dan Pokmas selama periode 2006-2011 nampaknya tidak optimal, mengingat adanya berbagai kendala seperti tidak ada honor bagi mereka, kerusakan joloro, dan lemahnya pembinaan oleh FD dan MD. Ketua LPSTK juga disibukkan dengan pekerjaan sebagai pedagang, meskipun kadangkala sebagai nelayan tangkap.

Program yang masih berlangsung sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah *seed fund* yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro (LKM). Kepengurusan LKM ini terdiri dari satu orang ketua dibantu satu orang bendahara dan seorang sekretaris. Pengurus LKM memperoleh honor yang diberikan setiap bulan yang diambil dari bunga pinjaman. Di Desa Bungaiya dana *seed fund* tahap pertama turun pada November 2008 sebesar 23 juta rupiah dan dana tahap ke dua turun pada November 2010 sebesar 24,3 juta rupiah. Dana tersebut ternyata tidak sebesar anggaran yang seharusnya diterima untuk tiap desa baik pada tahap satu maupun tahap dua masing-masing 25 juta rupiah. Kalau di Desa Buki dana *seed fund* diterima

penuh masing-masing tahap sebesar 25 juta rupiah. Mengapa di Desa Bungaiya telah mengalami pengurangan ?. Hal itu, kemungkinan dipergunakan untuk biaya transportasi pengurusan dana bergulir tersebut ke kota Benteng.

Dana *seed fund* tersebut baik tahap satu maupun tahap ke dua telah digulirkan pada perorangan yang membutuhkan. Jumlah peminjam untuk dana tahap pertama sebanyak 23 orang, masing-masing besar pinjaman sebanyak 1 juta rupiah. Adapun untuk tahap ke dua jumlah peminjam sebanyak 25 orang. Para peminjam tersebut diwajibkan menyerahkan tanggungan antara lain berupa surat BPKB, surat pemilikan rumah, dan perhiasan. Mereka yang meminjam pada umumnya digunakan untuk tambahan modal usaha dagang, usaha rumput laut, usaha pande besi dan usaha ternak sapi. Peminjaman dibatasi waktunya maksimal untuk 10 bulan dengan bunga 2 persen sebulan. Setiap bulan peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam termasuk bunganya.

Pokmas Jender di Desa Bungaiya sampai saat ini (2011) tidak mempunyai kegiatan, meskipun telah menerima pelatihan dan bantuan peralatan. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti keterbatasan dana untuk usaha, keterbatasan pasar, tidak adanya pembinaan usaha dan tidak biasa berusaha secara kelompok. Masing-masing anggota Pokmas jender disibukkan dengan kegiatan rumah tangga. Pasar di desa tersebut hanya buka sekali dalam seminggu selama 3 jam, mulai pukul 7.00 dan tutup pada pukul 10.00. Apabila terdapat kelompok jender dapat menghasilkan produk tertentu, perhitungan secara ekonomi pasti tidak layak, akan merugi, karena jumlah konsumen atau pembeli sedikit sekali.

Desa Bontobaru

Pengelolaan berbasis masyarakat dilakukan agar masyarakat merasa ikut memiliki terhadap program COREMAP. Dengan ikut memiliki, diharapkan masyarakat ikut secara aktif berpartisipasi, sehingga diharapkan program COREMAP lebih berhasil. Pengelolaan berbasis masyarakat agar supaya berjalan dengan efektif, maka

COREMAP melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang pentingnya menyelamatkan terumbu karang. Selain itu, disosialisasikan kepada masyarakat menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, sehingga kerusakan sumberdaya (terumbu karang) dapat dicegah. Sehingga populasi ikan yang berada di kawasan terumbu karang sekitar desa dapat semakin berkembang biak, karena terumbu karang merupakan tempat pemijahan ikan dan udang. Apabila ikan dapat berkembang biak, maka dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan dalam jangka panjang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program COREMAP telah dilaksanakan oleh LPSTK, Fasilitator Desa, dan Seto kepada masyarakat di Desa Bontobaru. Namun demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh LPSTK, Seto, maupun Fasilitator Desa kurang berjalan optimal, karena Seto dan Fasilitator sering tidak berada di lokasi COREMAP, mereka sering berada di kota Benteng. Akibatnya berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan COREMAP, terutama tentang penyelamatan dan pelestarian terumbu karang, larangan penggunaan obat bius dan bom, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, dan usaha ekonomi produktif tidak sampai ke masyarakat, atau penjelasannya tidak sampai tuntas. Masyarakat memerlukan pendampingan agar supaya program-program yang dilaksanakan pokmas dapat berjalan dengan lancar.

Seperti halnya di desa lain, ada dua program yang diberikan kepada desa Bontobaru oleh COREMAP untuk mendukung pengelolaan yang berbasis masyarakat, yaitu pemberian *village grant*, dana simpan pinjam (*seed fund*). Program tersebut memiliki satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa yang terkena program COREMAP. Pemberian dana tersebut, dengan asumsi bahwa perusakan terumbu karang akan sulit dihindari jika kondisi masyarakat masih miskin, karena dengan kemiskinan masyarakat akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun dengan merusak sumber daya laut, termasuk terumbu karang. Untuk melaksanakan kegiatan

tersebut COREMAP membentuk beberapa kelembagaan antara lain LPSTK, Pokmas, LKM serta mendirikan Pondok Informasi.

Di Desa Bontobaru selain LPSTK, terdapat Pokmas yang terdiri dari Pokmas konservasi, Pokmas Jender, dan Pokmas UEP. Pembentukan kepengurusan kelembagaan tersebut dilakukan pada tahun 2005. Kegiatan LPSTK dan Pokmas pada awalnya berjalan cukup baik. Namun demikian mulai tahun 2007 – 2011 kegiatan LPSTK dan Pokmas kurang berjalan optimal karena adanya berbagai hambatan, seperti tidak ada honor untuk pengurus, terbatasnya dana operasional untuk pengawasan, kerusakan jolor untuk pengawasan dan lemahnya pembinaan oleh FD dan MD. Selain itu, Ketua LPSTK juga disibukkan dengan pekerjaan sebagai pedagang dan sopir angkutan desa, sehingga kurang optimal mengurus organisasi. Begitu pula kegiatan pokmas tidak berjalan dengan baik karena kepengurusan yang tidak berjalan dan seringnya fasilitator tidak berada di lokasi sehingga pendampingan tidak berjalan dengan baik.

Pokmas usaha ekonomi produktif sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tidak berjalan, karena pengurus pokmas tidak memiliki inisiatif dan agenda program upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Pokmas Jender, seperti halnya di desa lain, sampai saat ini tidak memiliki kegiatan, meskipun telah menerima pelatihan. Hal ini terjadi karena berbagai masalah, seperti keterbatasan dana untuk usaha, keterbatasan pasar, tidak adanya pembinaan usaha dari FD maupun MD, dan anggota pokmas disibukkan dengan kegiatan mengurus rumah tangga. Sedangkan kegiatan pokmas konservasi saat ini berhenti, karena kapal (jolor) yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan mesinnya rusak, saat dalam proses perbaikan, dan kekurangan anggaran operasional untuk membeli bahan bakar.

Program yang masih berlangsung sampai saat ini (2008- 2011) antara lain kegiatan dana bergulir (*seed fund*) dan *village grand*. Untuk melaksanakan *seed fund*, LPSTK membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bertugas menyalurkan pinjaman uang kepada anggota Pokmas atau masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi syarat untuk dapat menerima pinjaman. Kepengurusan

LKM terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dan dibantu oleh satu dua orang penagih pinjaman. Dana *seed fund* turun dalam dua tahap. Tahap pertama tahun 2008 sebesar Rp 25 juta dan tahap ke dua tahun 2010 Rp 25 juta rupiah. Dana tersebut selanjutnya dipinjamkan kepada masyarakat atau anggota Pokmas dengan besaran antara Rp 500 ribu – Rp 1 juta rupiah. Lama pinjaman dibatasi selama 10 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 1,5 persen.

Dana *seed fund* tersebut baik tahap satu dan tahap ke dua telah dipinjamkan pada perorangan yang membutuhkan. Jumlah peminjam tahap pertama sebanyak 23 orang, masing-masing meminjam 1 juta rupiah. Sementara itu, tahap ke dua jumlah peminjam mencapai 25 orang. Para peminjam tersebut diwajibkan menyerahkan tanggungan berupa surat pemilikan rumah, dan perhiasan. Mereka yang meminjam pada umumnya digunakan untuk modal usaha dagang makanan kecil, dan usaha menjahit.

Untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatan COREMAP, LPSTK di desa Bontobaru dengan bimbingan fasilitator telah menyusun Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), yaitu menentukan daerah perlindungan laut (DPL) yang lokasinya sebelah barat Pulau Batu. RPTK di desa Bontobaru sudah selesai dibuat, dan telah disahkan melalui peraturan desa (perdes). Kawasan DPL di desa Bontobaru saat ini sudah memiliki peta dan tanda batas yang membatasi zonasi dalam DPL. Namun demikian, sebagian tanda-tanda DPL tersebut telah hilang, karena terbawa ombak, tertabrak kapal atau sengaja dihilangkan oleh oknum nelayan. Anggaran untuk pembuatan peta batas dan batas wilayah zonasi sebesar Rp 5 juta yang dibagi dua dengan Desa Bontobulaeng, masing-masing memperoleh anggaran sebesar Rp. 2,5 juta rupiah. Penentuan lokasi DPL di Desa Bontobaru merupakan usulan masyarakat, dilakukan survei oleh CRITICs, bersama LPSTK dan aparat desa, dan apabila lokasi DPL dianggap layak, CRITICs merekomendasi untuk disetujui dan dibuatkan Perdes. RPTK tersebut, di dalamnya diatur berbagai larangan yang harus dipatuhi nelayan yang berda di sekitar kawasan DPL antara lain : (1) tidak boleh melintas; (2) tidak boleh memancing; (3) tidak boleh membuang jangkar.

Untuk menjaga agar supaya larangan tersebut tidak dilanggar nelayan, dibuat sanksi bagi yang melanggar melalui Perdes. Nelayan dan masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi denda uang, untuk pelanggaran ke satu dan kedua sebesar Rp. 500 ribu. Selanjutnya untuk melanggar yang ketiga kalinya, sanksinya diserahkan kepada keputusan Pemerintah Desa. Bagi nelayan atau masyarakat yang merusak terumbu karang dengan melakukan pengeboman atau menggunakan potasium sianida untuk menangkap ikan, sanksinya langsung diserahkan kepada Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Desa Bontobulaeng

Pengelolaan berbasis masyarakat dilakukan agar masyarakat merasa ikut memiliki terhadap program COREMAP. Dengan ikut memiliki, diharapkan masyarakat ikut secara aktif berpartisipasi, sehingga diharapkan program COREMAP lebih berhasil. Pengelolaan berbasis masyarakat agar supaya berjalan dengan efektif, maka COREMAP melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang pentingnya menyelamatkan terumbu karang. Selain itu, disosialisasikan kepada masyarakat menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, sehingga kerusakan sumberdaya (terumbu karang) dapat dicegah. Agar supaya populasi ikan yang berada di kawasan terumbu karang sekitar desa dapat semakin berkembang biak, karena terumbu karang merupakan tempat pemijahan ikan dan udang. Apabila ikan dapat berkembang biak, maka dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program COREMAP telah dilaksanakan oleh LPSTK, Fasilitator dan Seto kepada masyarakat di Desa Bontobulaeng. Namun demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh LPSTK, Seto, maupun Fasilitator Desa kurang berjalan optimal, karena Seto dan Fasilitator sering tidak berada di lokasi COREMAP, mereka sering berada di kota Benteng. Sementara itu, Motivator Desa kurang memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi, karena berbagai faktor, antara lain kesibukan

mencari nafkah sebagai pedagang beras dan merangkap sebagai penanggung jawab PNPM (2010), sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pada pokmas. Akibatnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan COREMAP, terutama tentang penyelamatan dan pelestarian terumbu karang, larangan, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (obat bius dan bom), dan program usaha ekonomi produktif (UEP) tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak sampai ke masyarakat. Sementara itu, masyarakat masih memerlukan pendampingan agar supaya program-program yang dilaksanakan pokmas dapat berjalan dengan lancar, terutama program UEP. Karena program UEP sangat penting bagi masyarakat nelayan sebagai alternatif memperoleh dan meningkatkan pendapatan, agar supaya tidak mengeksploitasi sumber daya laut yang berlebihan.

Seperti halnya di desa Bontobaru, ada dua program yang diberikan kepada desa Bontobulaeng oleh COREMAP untuk mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya laut yang berbasis masyarakat, yaitu pemberian *village grant*, dana simpan pinjam (*seed fund*). Program tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa yang terkena program COREMAP. Pemberian dana dilakukan, dengan asumsi, bahwa perusakan terumbu karang akan sulit dihindari jika kondisi masyarakat masih miskin. Karena dengan kemiskinan masyarakat akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun dengan cara merusak sumber daya laut. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut COREMAP membentuk beberapa kelembagaan antara lain LPSTK, dan Pokmas, LKM serta mendirikan Pondok Informasi.

Di Desa Bontobulaeng pembentukan LPSTK dilakukan pada tahun 2006 bertempat di kantor desa dengan mengundang tokoh masyarakat, pengurus BPD, aparat desa, dan anggota masyarakat. Pembentukan LPSTK diawali dengan penjelasan dari SETO, FD dan MD tentang pentingnya pembentukan LPSTK dan Pokmas. Selanjutnya dengan difasilitasi Kepala Desa dan BPD, dilakukan pemilihan pengurus LPSTK, Sekretaris, Bendahara dan Ketua

Pokmas, Ketua LPSTK, dan Ketua Pokmas, dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan suara terbanyak. Sekretaris dipilih dengan suara terbanyak kedua dan suara terbanyak ketiga menjadi Bendahara. Pada awal terbentuknya lembaga-lembaga di atas sosialisasi program COREMAP berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Namun demikian sejak tahun 2007 intensitas sosialisasi mulai berkurang, bahkan jarang dilakukan, karena adanya berbagai hambatan, seperti Fasilitator tidak berada di lokasi, Ketua LPSTK dan Pokmas sibuk dengan kegiatan pekerjaan masing-masing. Dengan kesibukan tersebut, pengurus LPSTK dan Ketua Pokmas tidak memiliki waktu yang cukup untuk sosialisasi, sehingga rapat koordinasi antar pengurus jarang dilakukan. Karena lemahnya koordinasi antara LPSTK dan Pokmas menyebabkan berbagai program COREMAP tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu, FD dan SETO juga jarang melakukan pertemuan bersama dengan LPSTK, dan Pokmas, hal tersebut kemungkinan kurangnya dedikasi dan tanggungjawab terhadap program, yang secara formal telah tertulis dalam kontrak kerja.

Pokmas jender yang pengurus dan anggotanya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, sejak dibentuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 tidak pernah aktif, karena tidak memiliki program dan tidak ada pendampingan baik dari Fasilitator, Motivator maupun Seto. Hal tersebut karena Fasilitator jarang ada di lokasi desa COREMAP, walaupun di lokasi biasanya hanya beberapa hari, selebihnya berada di kota Benteng. Desa Bontobulaeng telah menerima bantuan peralatan masak antara lain berupa kompor minyak tanah, panci, ayakan tepung, dan penggorengan. Hal ini menunjukkan bahwa selain pembinaan kelompok jender oleh MD dan FD tidak berjalan dengan baik, juga kemauan dan motivasi kelompok jender untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang berbasis potensi sumberdaya lokal sangat lemah.

LKM merupakan lembaga yang dibentuk oleh LPSTK dengan tujuan untuk mengelola dana bergulir (*seed fund*). Ketua LKM dipilih oleh Ketua LPSTK dalam rapat desa yang dihadiri oleh masyarakat, LPSTK, dan pengurus Pokmas desa Bontobulaeng. Untuk

mengembangkan LKM, pengurus LKM sudah mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan LKM di Benteng. Di Desa Bontobaru dan Bontobulaeng telah menerima dana bergulir (*seed fund*) sebanyak dua kali masing-masing 25 juta rupiah pada tahun 2009 dan 2010. Dana bergulir tahap pertama telah cair tahun 2009 dan telah dipinjam oleh masyarakat. Dana tahap ke dua sebesar Rp. 25 juta yang turun tahun 2010 langsung dibagikan kepada peminjam. Besaran pinjaman nilainya Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 4 juta. Para peminjam pada umumnya bukan anggota Pokmas, tetapi perorangan yang memiliki usaha perdagangan. Pinjaman tersebut pada umumnya dipergunakan untuk menambah modal usaha, seperti menambah modal untuk membuat kue dan membeli bahan kain untuk memperbesar usaha menjahit. Untuk mencegah agar para peminjam mau mengembalikan pinjaman, diwajibkan untuk menyerahkan tanggungan berupa surat tanah atau perhiasan emas. Lama pinjaman 10 bulan dan dapat diperpanjang apabila telah melunasi pinjamannya. Dengan bunga pinjaman sebesar 1,5 persen sebulan.

Pembentukan LPSTK (Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang) diharapkan dapat menjadi wadah masyarakat untuk turut serta dalam mengelola terumbu karang, yang berbasis masyarakat, sehingga kegiatan LPSTK idealnya harus melibatkan semua unsur masyarakat. Untuk pelaksanaan program COREMAP, LPSTK di Desa Bontobulaeng, seperti halnya di Desa Bontobaru menyusun Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), yaitu menentukan daerah perlindungan laut (DPL) dan rencana pengelolaan. RPTK di Desa Bontobulaeng saat ini sudah selesai disusun, dan telah disahkan melalui peraturan desa (Perdes). Penyusunan Perdes di desa tersebut penyusunannya dibantu oleh konsultan yang dikontrak oleh DKP Kabupaten Kepulauan Selayar. Lokasi DPL Desa Bontobulaeng di Kawasan Taka Dapa.

Kawasan DPL di Desa Bontobulaeng saat ini sudah memiliki peta dan tanda batas zonasi yang membatasi DPL. Namun demikian, saat ini tanda-tanda tersebut hilang, karena terbawa ombak, tertabrak *joloro* atau sengaja dihilangkan oleh nelayan. Anggaran untuk pembuatan peta dan batas wilayah zonasi pada tahun 2008 sebesar Rp

5 juta yang dibagi dua dengan desa Bontobaru, masing-masing memperoleh anggaran sebesar Rp. 2,5 juta rupiah. Penentuan lokasi DPL di Desa Bontobulaeng merupakan usulan masyarakat, disurvei oleh CRITICs, bersama LPSTK dan aparat desa. Apabila lokasi DPL dianggap layak, selanjutnya CRITICs merekomendasi untuk disetujui dan dibuatkan Perdes. LPSTK dalam menyusun rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK), di dalamnya berisi berbagai larangan yang tidak boleh dilakukan nelayan di kawasan DPL, antara lain : (1) tidak boleh melintas; (2) tidak boleh memancing; (3) tidak boleh membuang jangkar.

Untuk menjaga agar supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut, dibuat mengenai sanksi bagi yang melanggar yang dituangkan melalui Perdes, menjadi dengan rencana pengelolaan DPL. Pelanggaran terhadap larangan tersebut baik oleh masyarakat maupun nelayan akan diberikan sanksi berupa denda uang untuk pelanggaran ke satu dan kedua sebesar Rp. 500 ribu. Selanjutnya apabila nelayan tersebut masih melanggar untuk ketiga kalinya, sanksi akan diserahkan kepada keputusan Kepala Desa. Sementara itu, nelayan atau masyarakat yang merusak terumbu karang dengan melakukan pengeboman atau menggunakan potasiun sianida sanksinya langsung diserahkan kepada Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Untuk melaksanakan program COREMAP, selain dibentuk Pokmas Jender dan UEP di Desa Bontolebang dibentuk Pokmas Konservasi. Pokmas Konservasi bertugas melakukan pengawasan terhadap terumbu karang di kawasan DPL. Pokmas konservasi Desa Bontobulaeng sejak dibentuk sampai tahun 2011 jarang melakukan pengawasan ke kawasan DPL, karena Desa Bontobulaeng sampai saat ini (2011) belum memiliki perahu untuk melakukan patroli di kawasan DPL. Sebelumnya di kawasan Pasimasunggu Timur pada tahun 2008 memiliki kapal patroli yang dikelola oleh UPTD Perikanan Kecamatan Pasimasunggu Timur. Namun demikian, sejak tahu 2009 UPTD di kawasan ini dihapuskan, digabungkan dengan Kec.Pasimasunggu, karena kapal patroli ditarik kembali oleh DKP, sehingga pada saat ini tidak ada lagi kegiatan patroli yang dilakukan Pokmas Konservasi di Desa Bontobulaeng.

Untuk membantu pembangunan Desa, COREMAP memberi dana pembangunan desa berupa “*village grant*” masing-masing Desa sebesar Rp 50 juta. Dana tersebut di Desa Bontobulaeng sudah turun dua kali pada tahun 2008 dan 2010. Di Desa Bontobulaeng dana *village grand* yang pertama dipergunakan untuk membangun MCK, jaringan pipa sarana air bersih sepanjang 300 meter dan drainase di dua dusun yaitu Dusun Pandang dan Bontobulaeng Ujung. Dana yang kedua dipergunakan untuk membangun perpustakaan dan TPA (tempat pendidikan Al-Qur’an), serta talut pemecah ombak.

E. Penutup

Sebagai upaya untuk menyukseskan COREMAP fase II di tingkat tataran desa, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pendekatan partisipatif melalui pengelolaan berbasis masyarakat, dan telah melibatkan masyarakat secara langsung, seperti pelaksanaan dana bergulir (*seed fund*), *village grant*, dan pengawasan di sekitar DPL. Untuk melaksanakan kegiatan COREMAP, di tingkat desa, dibentuk Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK), dan membentuk 3 Pokmas, yang terdiri dari : Pokmas Koservasi/perlindungan terumbu karang, Pokmas Jender (Perempuan) dan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Kegiatan sosialisasi COREMAP II yang berada di daratan pulau besar (Desa Buki, Bungaiya) telah dilaksanakan sejak tahun 2006 di semua lokasi COREMAP II. Sedangkan sosialisasi di wilayah pulau-pulau kecil dan 10 desa COREMAP dilaksanakan pada tahun 2008. Namun demikian, sosialisasi mulai tahun 2007 – 2011 yang dilakukan LPSTK dan Pokmas kurang berjalan optimal karena adanya berbagai hambatan, antara lain FD dan SETO sering tidak berada di lokasi, mereka berada di kota Benteng, sementara MD tidak memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi. Akibatnya berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan COREMAP, terutama tentang penyelamatan dan pelestarian terumbu karang, larangan penggunaan obat bius dan bom, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, dan usaha ekonomi produktif tidak sampai ke masyarakat, atau penjelasannya tidak sampai tuntas.

Kegiatan sosialisasi COREMAP lewat pondok informasi juga cenderung mengalami penurunan, karena terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi, seperti terbatasnya bahan (leaflet, alat peraga). Selain itu, peralatan (mesin ketik, meja, kursi, almari) juga terbatas, sehingga pondok informasi tersebut lebih banyak ditutup sejak tahun 2008.

Selanjutnya kurang optimalnya kegiatan sosialisai, disebabkan karena Ketua LPSTK dan Pokmas sibuk dengan kegiatan pekerjaan masing-masing atau mengurus rumah tangga, sehingga pengurus LPSTK dan Ketua Pokmas tidak memiliki waktu yang cukup untuk sosialisasi, dampaknya rapat koordinasi antar pengurus jarang dilakukan. Karena lemahnya koordinasi antara LPSTK dan Pokmas menyebabkan berbagai program COREMAP tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu, FD dan SETO dan MD juga jarang melakukan pertemuan bersama dengan LPSTK dan pengurus Pokmas,

Kegiatan Pokmas Jender maupun UEP Pokmas yang sejak dibentuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 tidak pernah aktif, karena tidak memiliki program dan tidak ada pendampingan baik dari Fasilitator, Motivator maupun Seto. Sementara itu, Pokmas Konservasi di Desa Buki, Bungaiya, Bontobaru dan Desa Bontobulaeng sampai dengan tahun 2011 juga jarang melakukan pengawasan ke kawasan DPL, karena berbagai kendala antara lain, jolor mesinnya rusak, tidak ada anggaran untuk kegiatan pengawasan. Selain itu Desa COREMAP sampai saat ini (2011) banyak yang belum memiliki perahu (jolor) untuk melakukan patroli di kawasan DPL. Desa-desanya di atas pada umumnya sudah memiliki kawasan DPL dan sudah disahkan melalui Perdes. Dalam Perdes tersebut juga dicantumkan sanksi-sanksi yang diberikan kepada para nelayan yang melanggar aturan di kawasan DPL. Pelanggaran terhadap larangan tersebut baik oleh masyarakat maupun nelayan akan diberikan sanksi berupa denda uang. Apabila nelayan atau masyarakat masih melanggar yang merusak terumbu karang dengan melakukan pengeboman atau menggunakan potasium sianida sanksinya langsung diserahkan kepada Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Untuk membantu pembangunan Desa, COREMAP memberi dana pembangunan desa berupa “*village grant*” masing-masing Desa sebesar Rp 50 juta. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk membangun fasilitas sosial maupun ekonomi, setiap desa berbeda satu dengan lain sesuai dengan kebutuhan desa. Pemanfaatan dana *village grand* antara lain dipergunakan untuk membangun MCK, perpipaan jaringan air, turap, perpustakaan , TPA dan membangun tembok pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono, Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo, 2006. *Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang di Kabupaten Selayar*, Jakarta, P2O- LIPI.
- Bandiyono, Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo. 2008. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II : Kasus Kabupaten Selayar*. Jakarta, LIPI Press.
- BPS Kabupaten Selayar 2005. *Kabupaten Selayar Dalam Angka 2004 dan 2005*, Selayar, Kerjasama Bainslada dengan BPS.
- CRITC-COREMAP-LIPI. 2007. *Monitoring Ekologi Selayar*. Jakarta . COREMAP LIPI
- CRITC-COREMAP II Kabupaten Kepulauan Selayar. 2010. Laporan Survey Kondisi Ekosistem Terumbu Karang (*Reef Health Monitoring*). Selayar CRITC Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, 2003. “ *Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan di Kepulauan Supermonde Sulawesi Selatan*. Kerjasama COREMAP dan DFW Indonesia.
- Imron, Masyhuri (ed) 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Imron, Masyhuri, Toni Soetopo 2009. *Potret Kesejahteraan Masyarakat di Dua Desa Pesisir*. Jakarta , LIPI Press.

- Masyhuri, 1999. Ekonomi Nelayan dan Kemiskinan Struktural dalam Masyhuri (ed) : *Pemberdayaan Nelayan. Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi : telaahan terhadap sebuah Pendekatan*. Jakarta, Puslitbang Ekonomi Pembangunan LIPI.
- Mubyarto, et. Al, 1984. *Nelayan dan Kemiskinan : Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai*. Jakarta. Rajawali.
- Nugroho, Heru, 1995, Kemiskinan, ketimpangan dan Pemberdayaan dalam Awan Setya Dewanta, dkk, (ed) : *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media.
- Zulfikar, Muh, dkk. 2002. *Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan di Kepulauan Sinjai*. Jakarta, COREMAP – LIPI.



Oleh : Ngadi dan Toni Soetopo

A. Pengantar

Perkembangan penduduk suatu wilayah pada dasarnya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk alami (kematian/kelahiran) dan migrasi netto (masuk dan keluar). Perubahan penduduk akibat pertumbuhan alamiah dan migrasi neto telah menyebabkan transisi demografi, yang berdampak pada perubahan struktur penduduk, terutama penduduk usia produktif dan non-produktif. Transisi demografi di Indonesia ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dari 5,61 antara tahun 1967-1970 menjadi 2,78 antara tahun 1995-1997 kemudian tahun 2000. Di sisi lain angka kematian balita (IMR) juga mengalami penurunan dari 147 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 1967 menjadi 46 pada tahun 1997.

Transisi demografi yang telah membawa perubahan yang luas terhadap karakteristik penduduk termasuk peningkatan proporsi angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar. Peningkatan proporsi angkatan kerja memerlukan tindakan antisipasi yaitu penyediaan lapangan kerja yang produktif sehingga angkatan kerja dapat tersalur pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Tidak tersedianya lapangan kerja yang layak akan berdampak pada tingginya pengangguran yang bermuara pada peningkatan kemiskinan. Sebaliknya jika tersedia lapangan kerja yang layak, maka angkatan kerja tersebut dapat

termanfaatkan ke kegiatan yang produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam kaitan dengan hal tersebut bagian ini bertujuan untuk menguraikan kondisi penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar dilihat dari aspek perkembangan dan kegiatan ekonomi. Data yang digunakan untuk analisis didasarkan pada data sekunder dan data primer survai sosial ekonomi masyarakat di lokasi COREMAP. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif baik dengan tabel, diagram maupun analisis trend. Perkembangan penduduk meliputi uraian tentang perkembangan penduduk secara makro dalam beberapa tahun terakhir dan perkembangan penduduk di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Buki, Bontomatene dan Pasimasunggu Timur.

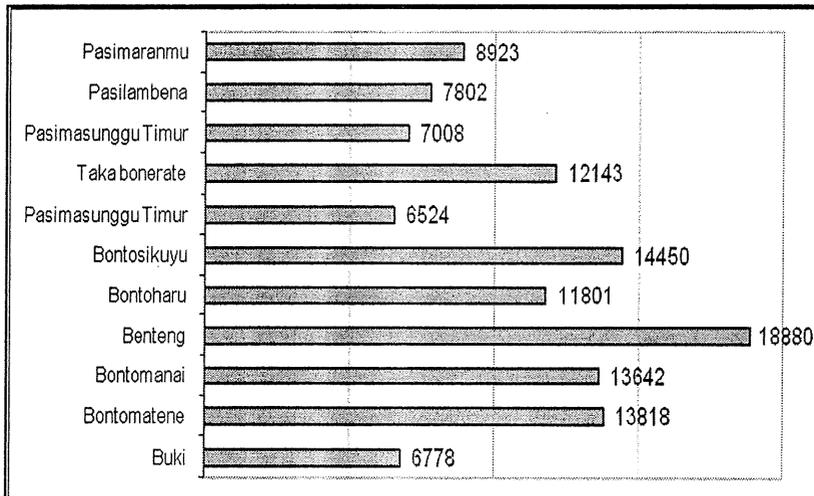
Kegiatan ekonomi dalam uraian ini meliputi keadaan angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar dan lapangan/status pekerjaan secara makro kabupaten maupun tingkat desa. Data yang digunakan dalam uraian ini adalah data hasil survei BME sosial ekonomi COREMAP, data Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Angka, Sakernas dan beberapa data relevan lainnya, sehingga definisi berbagai istilah ketenagakerjaan dan kependudukan sesuai dengan definisi yang ada dalam sumber data tersebut. Penduduk terbagi dalam dua kategori yaitu penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dan penduduk yang belum masuk usia kerja (usia 14 tahun ke bawah). Penduduk usia kerja ada yang masuk sebagai angkatan kerja yaitu orang yang mencari kerja atau bekerja dan bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja yang masih bersekolah, menjadi ibu rumah tangga, maupun lainnya seperti cacat yang menyebabkan penduduk tersebut tidak bisa masuk sebagai angkatan kerja.

B. Perkembangan Penduduk

Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2009 berjumlah 121,7 ribu jiwa yang terdistribusi dalam 11 kecamatan.

Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Benteng,- dengan penduduk berjumlah 18,88 ribu jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2649 jiwa/km². Kepadatan penduduk tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Selayar yang rata-rata tingkat kepadatan penduduknya di bawah 100 jiwa/km². Kecamatan Benteng merupakan ibu kota kabupaten, sehingga memiliki fasilitas yang lengkap baik berupa listrik, sarana dan prasarana kesehatan, sarana pendidikan, air bersih dan fasilitas lainnya serta menjadi pusat kegiatan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar. Lapangan pekerjaan di Kecamatan Benteng juga lebih bervariasi dibandingkan dengan kecamatan lainnya sehingga banyak penduduk yang bekerja dan bermukim di daerah ini.

Diagram 3.1
Distribusi penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar menurut
Kecamatan, Tahun 2009



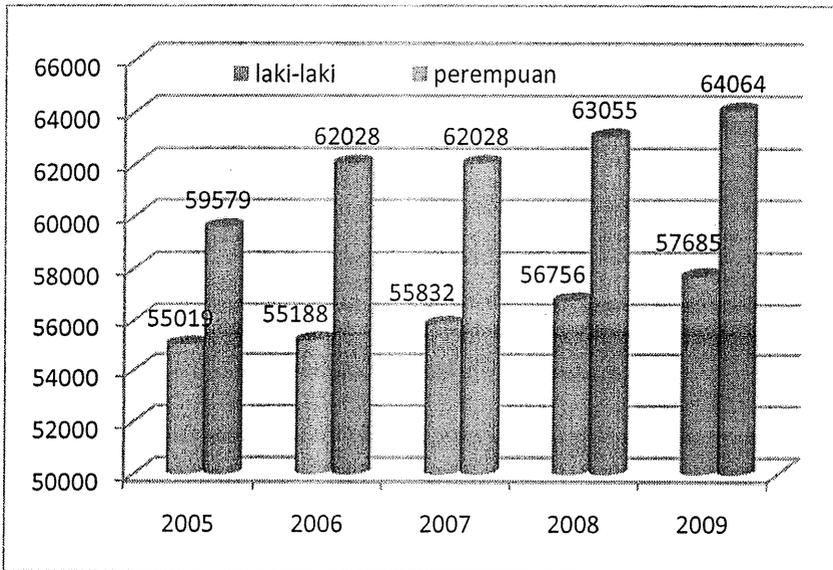
Sumber : BPS Kabupaten Selayar, tahun 2010

Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan penduduk berjumlah 6524 jiwa pada tahun 2009. Pasimasunggu Timur merupakan pecahan dari Kecamatan Pasimasunggu sebagai kecamatan induk. Kedua kecamatan berada pada pulau kecil yaitu Pulau Jampea yang memiliki keterbatasan akses informasi dan transportasi. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten yang terdiri dari banyak pulau kecil. Kendala umum yang dihadapi penduduk pulau kecil adalah adanya keterbatasan akses informasi, komunikasi, prasarana air bersih, pendidikan, dan transportasi. Keterbatasan tersebut berdampak pada kurangnya pertumbuhan ekonomi di pulau kecil yang menyebabkan sebagian besar dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, pulau kecil umumnya memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Pulau Jampea merupakan salah satu pulau yang subur, sehingga dapat ditanami padi yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani setempat bahkan dijual ke daerah lain yang tidak menghasilkan beras.

Data perkembangan penduduk menurut jenis kelamin tahun 2005-2009 menunjukkan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Kepulauan Selayar lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Kecenderungan tersebut umum terjadi di Indonesia, namun proporsi penduduk laki-laki terhadap perempuan di daerah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan proporsi di tingkat nasional. Dua hal yang dapat menjadi penyebab utama keadaan ini adalah : pertama, kecenderungan migrasi penduduk laki-laki usia kerja (umur 15 tahun ke atas) ke daerah lain guna melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan. Sebagian penduduk yang berpendidikan tinggi akan bermigrasi ke daerah lain karena menginginkan kondisi perekonomian yang lebih layak. Kedua, berkaitan dengan angka harapan hidup

penduduk laki-laki yang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Kondisi ini dapat berdampak pada lebih rendahnya jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Diagram 3.2
Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2009



Sumber : BPS Kabupaten Selayar, Tahun 2010

Tingkat pertumbuhan penduduk di tingkat kabupaten pada tahun 2006-2009 sebesar 1,15 persen per tahun. Angka pertumbuhan penduduk ini bervariasi antar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Pasilambena dari 6,8 ribu pada tahun 2006 menjadi 7,8 ribu pada tahun 2009 atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,56 persen/tahun. Tidak diketahui secara pasti penyebab pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di daerah ini, tetapi secara umum tingkat pertumbuhan

alami di Kabupaten Kepulauan Selayar hampir sama antar kecamatan, sehingga penambahan penduduk yang tinggi di Kecamatan Pasilambena kemungkinan disebabkan oleh bergabungnya penduduk dari kecamatan lain ke wilayah tersebut karena adanya integrasi wilayah ke Kecamatan tersebut.

Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun di Kecamatan Pasimasunggu Timur sebesar 0,56 persen, terendah dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepadatan penduduknya sekitar 136 jiwa/km² dengan rata-rata anggota rumah tangga berjumlah 4 orang. Kecamatan Pasimasunggu Timur terbagi dalam 4 desa yaitu Lembang Baji, Bontomalling, Bontobulaeng dan Bontobaru. Pasimasunggu Timur merupakan salah satu wilayah yang cukup terpencil dan sulit dijangkau. Transportasi ke wilayah ini masih sangat terbatas dan membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam dari Benteng ke Pasimasunggu Timur. Akses ke Pasimasunggu Timur menjadi lebih terbatas pada waktu terjadi musim gelombang kuat, karena tidak ada kapal yang berani masuk ke wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu sebab perkembangan penduduk yang rendah. Kurangnya aksesibilitas membuat penduduk dari luar tidak mau bermigrasi ke daerah tersebut bahkan sebagian penduduk lokal ingin bermigrasi ke daerah lain.

Tingkat pertumbuhan penduduk di Buki dan Bungaiya sebesar 1,12 persen pertahun. Penduduk di Kecamatan Buki dan Bontomatene memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di pulau kecil. Kecamatan Buki dan Bontomatene dilalui oleh jalan nasional yang memudahkan mereka pergi ke Benteng maupun Selayar. Kecamatan Bontomatene juga memiliki satu pelabuhan laut di Pamatata yang memudahkan mereka untuk pergi ke Bulukumba maupun Makasar. Meskipun demikian daerah ini memiliki permasalahan dalam hal kesuburan tanah. Sebagian wilayah Buki dan Bontomatena berupa tanah berbatu yang kurang subur

sehingga sulit untuk ditanami. Rendahnya daya dukung sumber daya alam menjadi sebab rendahnya migrasi masuk ke Buki dan Bontomatene. Penduduk Buki dan Bontomatene yang menyelesaikan pendidikan tinggi umumnya juga bermigrasi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan yang lebih layak sesuai tingkat pendidikan yang dimiliki.

Tabel 3.1.

Jumlah dan Tingkat Pertambahan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kecamatan 2006-2009

No	Kecamatan	Tahun 2006	Tahun 2009	Pertambahan /tahun (%)
1	Pasimaranmu	8.659	8.923	1,02
2	Pasilambena	6.863	7.802	4,56
3	Pasimasunggu	6.762	7.008	1,21
4	Taka Bonerate	11.239	12.143	2,68
5	Pasimasunggu Timur	6.416	6.524	0,56
6	Bontosikuyu	14.002	14.450	1,07
7	Bontoharu	11.474	11.801	0,95
8	Benteng	17.973	18.860	1,65
9	Bontomanai	15.914	13.642	1,12*
10	Bontomatene	17.211	13.818	
11	Buki	-	6.778	
Kabupaten Selayar		116.513	121749	1,15

Sumber : BPS. 2010

* Perkembangan penduduk di tiga kecamatan dijadikan satu karena sebagian penduduk Bontomanai dan Bontomatene menjadi penduduk Buki

Luas wilayah Kecamatan Buki sebesar 82,73 km², terbagi menjadi 5 desa yaitu : Kohala, Bontolempangan, Balang Butung, Lalang Bata dan Buki. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Lalang Bata yaitu 146 jiwa/km², sedangkan terendah terdapat di Desa Balang Butung yaitu 59 jiwa/km². Sebagian besar wilayah Buki berupa perbukitan yang ditumbuhi tanaman semak. Rata-rata anggot

rumah tangga di Buki sebesar 4 orang, artinya program keluarga berencana cukup berhasil di daerah ini yaitu 2 anak cukup. Penduduk yang tinggal dekat dengan laut, pada umumnya bekerja sebagai nelayan, dan penduduk yang tinggal jauh dari laut umumnya bekerja sebagai petani dan peternak. Waktu tempuh kendaraan bermotor dari Buki ke Benteng sekitar 30 menit, sehingga aksesibilitas penduduk di daerah ini cukup mudah.

Kecamatan Bontomatene memiliki luas sebesar 159,92 km² yang terbagi dalam 11 desa diantaranya adalah Desa Bongaiya sebagai desa yang mendapatkan program penyelamatan terumbu karang (COREMAP). Kepadatan penduduk di Bontomatene tahun 2009 sebesar 86 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi terdapat di Desa Tanete (245 jiwa/km²) dan terendah di Desa Bongaiya (33 jiwa/km²). Rata-rata anggota rumah tangga di Kecamatan Bontomatene sama dengan wilayah kabupaten yaitu 4 jiwa per rumah tangga. Bongaiya sebenarnya merupakan permukiman bedol desa yang terjadi karena adanya jalan nasional yang melintasi desa tersebut. Pada awalnya penduduk di desa ini tinggal di lokasi yang agak jauh, kemudian dipindahkan disepanjang jalan nasional yang telah dibangun agar jalan lebih termamfaatkan dan penduduk memiliki akses transportasi yang lebih mudah. Migrasi masuk ke daerah ini relatif kecil karena daya dukung sumber daya alam yang rendah. Sebagian besar wilayah Bontomatena khususnya Bongaiya adalah batu karang yang sulit untuk diolah dan dijadikan lahan pertanian.

Sex rasio yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 90,04 artinya setiap ada 100 penduduk perempuan ada sekitar 90 orang penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dilihat sex ratio berdasar kelompok umur, maka dapat dilihat bahwa pada usia 0-14 tahun seks ratio lebih tinggi dari 100, artinya jumlah laki-laki pada

umur 0-14 tahun lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Setelah umum 14 tahun rasio jenis kelamin menjadi di bawah 100 artinya jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan sebagian penduduk laki-laki yang telah memasuki usia kerja memilih untuk keluar dari desa dan kabupaten mereka guna mencari pekerjaan yang mereka inginkan. Pada umur 60 tahun ke atas, rasio jenis kelamin bahkan kurang dari 80, hal ini disebabkan sebagian tingkat kematian penduduk laki-laki pada usia tersebut lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan angka harapan hidup perempuan di daerah ini lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 3.2.
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Selayar
Menurut Kecamatan, Tahun 2009

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex ratio
1	Pasimaranmu	4.128	4.795	8.923	86,09
2	Pasilambena	3.844	3.958	7.802	97,12
3	Pasimasunggu	3.300	3.708	7.008	89,00
4	Taka	5.817	6.326	12.143	91,95
	Bonerate				
5	Pasimasunggu Timur	3.047	3.477	6.524	87,63
6	Bontosikuyu	6.926	7.524	14.450	92,05
7	Bontoharu	5.679	6.122	11.801	92,76
8	Benteng	8.805	10.055	18.860	87,57
9	Bontomanai	6.597	7.045	13.642	93,64
10	Bontomatene	6.385	7.433	13.818	85,90
11	Buki	3.157	3.621	6.778	87,19
	Selayar	57.685	64.064	121.749	90,04

Sumber : BPS Kabupaten Selayar, Tahun 2010

Daerah-daerah yang tanahnya tandus seperti Buki dan Bontomatene rasio jenis kelaminnya kurang dari 90 yang menunjukkan tingkat mobilitas penduduk laki-laki di daerah tersebut

lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Kurangnya daya dukung lapangan pekerjaan membuat sebagian angkatan kerja di daerah ini berusaha mencari pekerjaan di daerah lain. Kondisi ini juga didukung oleh akses transportasi ke daerah lain yang relatif mudah. Secara umum penduduk Buki dan Bontomatene merasa bahwa mereka harus mengubah hidup dengan keluar daerah dengan bekerja sebagai pegawai negeri maupun swasta.

Tabel 3.3.

Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Di Kawasan Pasimasunggu Timur Dan Buki-Bungaiya, Tahun 2011

Kelompok Umur	Pas-timur		TOTAL	Buki-Bungaiya		Total
	LK	P		LK	P	
0-4	6,75	6,44	6,61	3,69	5,68	4,65
5-9	14,29	12,27	13,21	8,20	6,11	7,19
10-14	10,32	13,68	12,01	9,84	9,61	9,73
15-19	9,33	9,46	9,31	10,66	6,55	8,67
20-24	7,74	5,84	6,81	8,61	6,99	7,82
25-29	5,75	7,85	6,81	10,66	7,42	9,09
30-34	5,36	8,65	7,01	7,79	5,68	6,77
35-39	9,52	9,66	9,71	4,10	8,30	6,13
40-44	4,96	8,25	6,61	4,10	8,30	6,13
45-49	9,33	6,04	7,71	5,74	5,68	5,71
50-54	6,75	4,23	5,51	7,79	9,17	8,46
55-59	4,17	1,81	3,00	2,87	5,68	4,23
60-64	2,18	3,22	2,70	8,20	5,68	6,98
65+	3,57	2,62	3,00	7,79	9,17	8,46
N	281	278	559	244	229	473
0-14	31,35	32,39	31,83	21,73	21,40	21,57
15-64	65,08	64,99	65,17	70,52	69,45	69,99
65+	3,57	2,62	3,00	7,79	9,17	8,46
DP	53,66	53,87	53,46	41,86	44,02	42,91

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2011

Proporsi penduduk menurut umur di kedua kawasan lokasi penelitian menunjukkan kecenderungan proporsi yang berbeda. Proporsi penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) di Pasimasunggu Timur sekitar 32 persen, sedangkan di Buki-Bungaiya

sekitar 21 persen. Data ini menunjukkan bahwa penduduk di kawasan daratan pulau besar sudah mengarah ke penduduk tua yang ditandai dengan rendahnya proporsi penduduk usia muda (belum produktif). Sementara itu proporsi penduduk usia muda di kawasan pulau kecil masih tinggi yang mencerminkan belum berhasilnya program keluarga berencana di daerah ini. Tingginya proporsi penduduk usia muda berimplikasi pada berbagai kebijakan daerah seperti penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang harus memperhitungkan jumlah penduduk yang membutuhkannya.

Tingginya penduduk usia muda secara langsung berimplikasi pada besarnya angka dependency ratio di Pasimasunggu Timur dan Buki- Bungaiya. Angka dependency ratio di kawasan Pasimasunggu Timur sebesar 53,5 artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban penduduk usia tidak produktif sebanyak 54 orang, sedangkan di Buki-Bungaiya nilai dependency ratio sebesar 42,9. Dalam kondisi tersebut angka dependency ratio di Buki-Bungaiya sudah mencapai titik sangat rendah bahkan lebih rendah dari perkiraan terjadinya window of opportunity di tingkat nasional yang baru akan terjadi pada tahun 2020-2025. Titik terendah angka beban ketergantungan di tingkat nasional diperkirakan akan bernilai 44 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban penduduk usia tidak produktif sebanyak 44 jiwa.

Penduduk Kecamatan Pasimasunggu Timur terdiri dari etnik yang berasal beberapa kabupaten antara lain, Bulukumba, Jeneponto, Sinjai, Takalar dan Makasar. Di Desa Bungaiya terdapat beberapa keluarga yang berasal dari Maluku, sebagai pengungsi akibat konflik Ambon. Latar belakang pekerjaan mereka pada umumnya ditugaskan sebagai guru (SD,SLTP,SMU) dan sebagai paramedis. Jumlah dan komposisi penduduk di dua Kecamatan dapat dilihat dalam tabel di bawah.

C. Kegiatan Ekonomi: Dinamika Tenaga Kerja dan Mata Pencaharian

Penduduk dapat dibagi dalam kelompok penduduk usia kerja (15 ke atas) dan penduduk di luar usia kerja (kurang dari 15 tahun). Penduduk usia kerja kemudian terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan atau penduduk yang termasuk pengangguran. Penduduk bekerja adalah penduduk yang melakukan kegiatan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya (Ngadi, 2005). Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pekerjaan merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi perekonomian penduduk sehingga aspek-aspek tersebut dibahas dalam bagian ini.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2009 sebanyak 54.996 orang. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 49.478 orang (89,97 persen) sedangkan sisanya (10,03 persen) berstatus sebagai penganggur. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup tinggi, setingkat dengan angka pengangguran di Indonesia. Sektor pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebab dari jumlah tersebut sekitar 58,27 persen angkatan kerja bekerja di sektor pertanian. Pertanian di daerah ini didominasi oleh pertanian tanaman pangan, perikanan dan kenelayanan. Tingginya angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian ini menunjukkan tingkat perkembangan sektor manufaktur dan jasa yang masih rendah. Sektor

manufaktur merupakan sektor terbanyak kedua dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 17,19 persen.

Tabel 3.4.
Keadaan Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011

No	Jenis kegiatan	Jumlah	Persentase
1	Angkatan kerja	54.996	100
	- Bekerja	49.478	89,97
	- Pengangguran	5.518	10,03
2	Bukan angkatan kerja	32.651	100
	- Sekolah	6.503	19,92
	- Mengurus RT	22.162	67,88
	- Lainnya	3.986	12,21

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2010

Dominasi lapangan kerja sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar dimana sekitar 56,4 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi pilihan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk karena sektor yang lain belum berkembang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai dengan potensi wilayah yang sebagian besar merupakan lautan, maka penduduk yang bekerja di sektor pertanian di daerah ini didominasi oleh subsektor perikanan yang sangat tergantung pada sumber daya laut. Potensi laut di Kepulauan Selayar masih sangat tinggi namun pengelolaannya belum maksimal sehingga sebagian besar penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemanfaatan sumber daya laut yang belum maksimal berhubungan dengan penggunaan sarana prasarana serta teknologi yang masih rendah. Nelayan setempat juga kalah bersaing dengan nelayan dari luar Kepulauan Selayar yang mempunyai armada tangkap lebih modern dan lengkap. Pendapatan subsektor perikanan pada dasarnya bersifat fluktuatif karena terdapat musim gelombang laut yang terjadi di daerah tersebut. Pada waktu musim gelombang kuat

nelayan tidak berani melaut karena ombak terlalu tinggi. Oleh sebab itu sebagian besar nelayan juga berprofesi sebagai petani tanaman pangan maupun peternak. Pilihan mata pencaharian ini disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam masing-masing desa.

Tabel 3.5
Distribusi Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010

No	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
1	Pertanian	29.475	56,4
2	Pertambangan dan penggalian	91	0,2
3	Industri pengolahan	2.647	5,1
4	Listrik, gas dan air	79	0,2
5	Bangunan	2.690	5,2
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	6.190	11,9
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	1.362	2,6
8	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	190	0,4
9	Jasa kemasyarakatan	9.499	18,2
		52.223	100,0

Sumber : Sakernas (2010), Pusdatinaker (2010)

Sebagian besar nelayan di Desa Buki dan Bungaiya lebih memilih untuk beternak sapi dan bercocok tanam tanaman keras sebagai alternatif mata pencaharian yang lain. Pilihan ini sesuai dengan kondisi alam di daerah Buki dan Bungaiya yang sebagian besar berupa hutan/semak belukar yang belum terolah menjadi lahan pertanian. Ternak yang dimiliki penduduk biasanya dilepas untuk mencari makan sendiri di alam bebas dan pada musim kemarau akan datang sendiri ke kandangnya untuk dijual ataupun diberi makanan. Berbeda halnya dengan penduduk Pasimasunggu Timur yang memilih untuk bercocok tanam padi sebagai mata pencaharian di luar perikanan laut. Kegiatan bercocok tanam . padi di desa ini bahkan menjadi pekerjaan utama penduduk, sedangkan perikanan hanya menjadi pekerjaan sampingan saja.

Tabel 3.6.

Distribusi Penduduk Yang Bekerja Di Bontomatene dan Pasimasunggu Timur Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2011

No	Lapangan pekerjaan	Buki - Bungaiya		Pasimasunggu Timur	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Perikanan tangkap	48	39,7	45	34.88
2	Pertanian	27	22,3	42	33.33
3	Industri pengolahan	1	,8	-	
4	Perdagangan	9	7,4	1	0,77
5	Jasa	17	14,0	5	3.8
6	Lainnya	19	15,7	26	20.15
Total		121	100,0	129	100

Sumber : Data Primer, Survai Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2011

Sektor lain yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor jasa kemasyarakatan yaitu sebesar 18,2 persen yang terdiri dari PNS, kepolisian, ABRI, aparat desa dan sebagainya. Sektor ketiga yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel yang menyerap sekitar 11,9 persen tenaga kerja. Sektor-sektor yang lain hanya menyerap sedikit tenaga kerja karena belum berkembang dengan baik. Rencana pendirian kilang minyak di daerah selayar guna memenuhi permintaan minyak di daerah timur Indonesia juga tidak/belum terlaksana karena berbagai kendala fisik, sosial maupun kelayakan ekonomi.

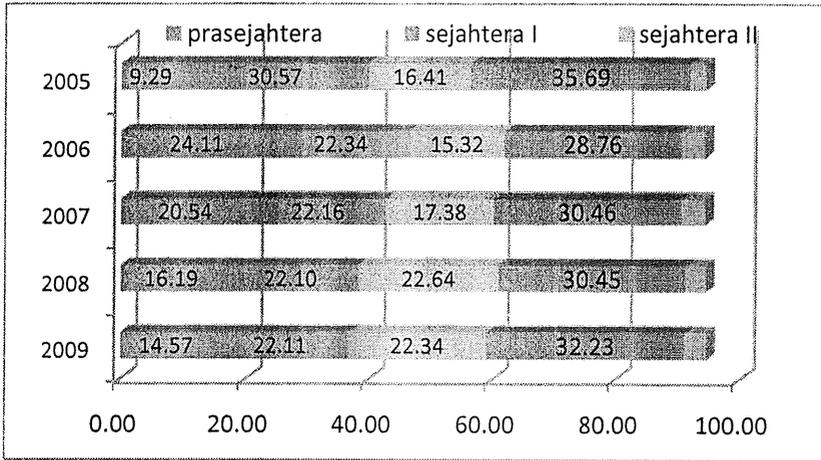
Berdasar data survai di Pasimasunggu Timur dan Buki-Bungaiya, sebagian besar penduduk di dua lokasi tersebut memiliki pekerjaan di bidang perikanan tangkap. Hal itu disebabkan kedua kawasan ini memiliki wilayah laut yang sangat luas, dan sebagian besar penduduk pesisir bekerja sebagai nelayan. Sementara itu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian (petani dan perkebunan)

juga cukup besar masing-masing sebesar 22 persen dan 33 persen. Besarnya penduduk yang bekerja di lapangan pekerjaan pertanian di Kecamatan Psimasunggu Timur, karena daerah ini memiliki lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang cukup luas (1.900 Ha), sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai petani. Kecamatan Pasimasunggu Timur merupakan penghasil beras dan jambu mede yang cukup besar, yang sebagian besar dijual antar pulau atau dibawa ke Kota Benteng. Sedangkan penduduk dua Kecamatan yang memiliki pekerjaan dibidang jasa relatif tinggi, antara lain sebagai pegawai pemerintahan daerah dan kepolisian.

D. Kesejahteraan Penduduk

Kondisi perekonomian penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar salah satunya dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan yang dibagi menjadi 5 kelompok yaitu prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3 dan sejahtera 3+. Penduduk prasejahtera dimaksudkan sebagai penduduk yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka termasuk sandang dan pangan. Proporsi penduduk prasejahtera di Kabupaten Kepulauan Selayar ternyata cukup tinggi dan berfluktuasi mulai tahun 2005-2009. Tahun 2005 proporsi penduduk prasejahtera sebesar 9,29 persen sedangkan tahun 2009 sekitar 22,13 persen. Perbedaan persentase yang cukup besar ini tampaknya lebih disebabkan oleh sistem pendataan penduduk dan bukan disebabkan oleh kemerosotan pembangunan di Kepulauan Selayar. Berbagai program pembangunan seperti PNPM mandiri dan kebijakan pengentasan kemiskinan dari pusat dan daerah masih belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah pulau kecil.

Diagram 3.3.
Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Kesejahteraan, Tahun 2005-2009



Sumber : BPS Kabupaten Selayar (2010)

Jumlah penduduk prasejahtera yang tinggi sejalan dengan angka kemiskinan di daerah yang masih tinggi. Pada tahun 2009 persentase rumah tangga miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 23,25 persen. Kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin lebih dari 30 persen adalah Kecamatan Takabonerate dan Bontoharu. Takabonerate merupakan daerah yang ditetapkan sebagai taman nasional sehingga kelestariannya dilindungi oleh negara. Akan tetapi, status taman nasional tersebut sama sekali belum berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga kemiskinan di daerah ini masih tinggi. Akses ke Kecamatan Takabonerate masih sangat sulit dan diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mencapai kecamatan tersebut. Hal ini berdampak pada kurangnya minat wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mempromosikan keberadaan takabonerate akan tetapi usaha tersebut belum dapat meningkatkan kedatangan wisatawan secara signifikan. Takabonerate merupakan salah satu

kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas 221,07 km² dan terbagi menjadi 8 desa dengan kepadatan penduduk mencapai 55 jiwa/km². Sebagaimana daerah pulau kecil yang lain, penduduk setempat mengalami kesulitan dalam kaitan dengan akses informasi, komunikasi, air bersih dan penerangan.

Tabel 3.7.

Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2009

No	Kecamatan	RT miskin	RT	Persentase
1	Pasimarannu	544	2.434	22,35
2	Pasilambena	418	1.647	25,38
3	Pasimasunggu	432	1.980	21,82
4	Pasimasunggu timur	481	1.763	27,28
5	Taka bonerate	926	2.994	30,93
6	Bontosikuyu	1.161	4.395	26,42
7	Bontoharu	993	3.098	32,05
8	Benteng	715	6.372	11,22
9	Bontomanai	702	3.552	19,76
10	Buki	475	1.775	26,76
11	Bontomatene	1.040	3.906	26,63
		7.887	33.916	23,25

Sumber : BPS Kabupaten Selayar (2010)

Hanya ada satu kecamatan yang persentase penduduk miskinnya di bawah 15 persen yaitu Kecamatan Benteng. Kecamatan ini merupakan ibukota dari Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki kelebihan dalam hal sarana prasarana seperti komunikasi, transportasi, dan penerangan. Tahun 2009 kepadatan penduduk di Benteng sebesar 2.649 jiwa/km², dan merupakan kecamatan dengan penduduk paling padat di kabupaten tersebut. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Sementara itu, kecamatan-kecamatan lain di daratan Pulau Selayar masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi seperti Buki, Bontomatene dan Bontosikuyu. Tingginya angka kemiskinan di kabupaten ini menunjukkan bahwa potensi alam yang tersedia di daerah ini belum

tergarap secara optimal bahkan cenderung eksploitatif yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

E. Penutup

Berdasar karakteristik distribusi menurut lokasi, penduduk Kepulauan Selayar terdistribusi pada pulau-pulau kecil yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten (Benteng). Pertumbuhan penduduk tingkat kabupaten pada tahun 2005-2009 sekitar 1,15 persen/tahun, dengan angka kemiskinan yang masih tinggi yaitu 23,25 persen rumah tangga. Potensi utama yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah sumber daya laut. Akan tetapi sejauh ini sumber daya laut belum dikelola secara optimal sehingga masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lokasi permukiman yang tersebar dan jauh dari jangkauan menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan di tingkat kabupaten. Biaya operasional menuju ataupun dari lokasi-lokasi tersebut sangat tinggi dan memerlukan waktu yang lama. Kondisi ini berdampak pada jalannya pembangunan di pulau kecil termasuk untuk berkordinasi dengan satuan pemerintah di tingkat desa. Informasi yang akan disampaikan ke aparat tingkat desa atau kecamatan kadang baru sampai beberapa hari bahkan beberapa minggu.

Terlepas dari semua hambatan yang ada di daerah tersebut, Kabupaten Kepulauan Selayar sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pengelolaan sumber daya alam tidak akan terlepas dari kemampuan sumber daya manusia, sehingga hal penting yang perlu dilakukan adalah investasi yang cukup untuk pengembangan sumber daya manusia. Fasilitas pemerintah daerah terhadap nelayan maupun petani tanaman pangan memang diperlukan, tetapi fasilitas tersebut semestinya dilakukan pada kegiatan-kegiatan

yang dapat meningkatkan kaulitas SDM. Ibarat fasilitasi untuk pemancing, maka jangan diberikan ikannya tetapi berikan kail agar nelayan tersebut dapat berusaha sendiri untuk mencari ikan dilaut. Fasilitasi pemerintah daerah harus memperhatikan aspek kemandirian nelayan, dan jangan sampai nelayan maupun petani justru semakin tergantung pada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Selayar. 2010. Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Angka tahun 2010. BPS Kabupaten Selayar
- Bandiyono Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo. (2006). Aspek Social Ekonomi Terumbu Karang di Kabupaten Selayar. Jakarta : P3O-LIPI/
- _____ (2008). Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di lokasi Coremap II : Kasus Kabupaten Selayar. Jakarta : COREMAP-LIPI
- Bandiyono Suko. Ngadi, Toni Soetopo, Masyuri. (2009). Implementasi Coremap di Kabupaten Selayar: Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi. Jakarta : COREMAP-LIPI
- CRITC COREMAP II. 2010. Laporan Akhir Survey Kondisi Sosial Ekonomi. Kabupaten Kepulauan Selayar: 2010.
- Ngadi. 2005. Pengangguran dan Setengah Penganggur di Indonesia 1996-2004 : Konsep, Isu, dan Implikasi Kebijakan, dalam Warta Demografi Universitas Indonesia, Jakarta
- Pusdatinaker. 2010. Data dan informasi ketenagakerjaan di Indonesia, www.nakertrans.go.id

Oleh : Ngadi dan Toni Soetopo

A. Pengantar

Pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor berhubungan dengan pendapatan penduduk seperti kapasitas produksi, aksesibilitas, pemasaran hasil dan kebijakan pemerintah. Sebagai daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut, maka kapasitas produksi perikanan laut merupakan faktor utama yang berdampak pada kondisi pendapatan penduduk. Produksi perikanan laut di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar tergantung pada kondisi gelombang yaitu kuat, lemah dan pancaroba. Fluktuasi hasil produksi perikanan laut akan berdampak pada fluktuasi pendapatan masyarakat khususnya nelayan.

Aksesibilitas penduduk di pulau besar dan kecil merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat pendapatan. Aksesibilitas penduduk di Pulau Selayar (Kecamatan Bontomatene dan Buki) lebih baik dibandingkan dengan aksesibilitas penduduk di Pulau Kecil (Kecamatan Pasimasunggu Timur). Penduduk di pulau kecil dapat pergi ke Kota Benteng dengan alat transportasi perahu kayu dengan waktu berlayar yang tidak menentu. Jika terjadi ombak besar dan penumpang tidak memenuhi kuota, perjalanan

dengan perahu kadang dibatalkan. Berbeda halnya dengan penduduk di Kecamatan Buki dan Bontomatene yang dapat pergi ke Benteng dengan waktu tempuh 30 menit dengan menggunakan alat transportasi angkutan umum maupun sepeda motor. Mobilitas penduduk Buki dan Bungaiya ke Kota Makasar dan Kabupaten Bulukumba juga lebih mudah karena setiap hari ada kapal yang berlabuh di Pelabuhan Pamatata.

Pengukuran pendapatan penduduk dalam penelitian ini didasarkan pada nilai uang yang didapat dari penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki. Pendapatan penduduk juga dapat berupa kiriman uang maupun pendapatan dari gaji pensiun. Pendapatan rumah tangga dan perkapita menjadi variabel penting karena menjadi salah satu indikator sosial ekonomi untuk mengukur tingkat keberhasilan COREMAP. Secara eksplisit disebutkan salah satu indikator COREMAP adalah pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2010). Indikator lain adalah paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiary*) merasakan dampak positif program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status ekonomi mereka.

Data yang digunakan untuk mengukur perkembangan pendapatan penduduk dalam dihitung berdasarkan data survai yang dilakukan pada tiga titik waktu yaitu tahun 2006 (t0), 2008 (t1), dan 2011 (t2). Responden untuk mengukur pendapatan penduduk di tiga titik waktu tersebut merupakan responden yang sama, kecuali ada yang meninggal dunia atau pindah tempat, maka responden diganti dengan rumah tangga terdekat. Pendapatan penduduk diuraikan menurut lokasi (kepulauan dan daratan) yang meliputi perubahan pendapatan secara keseluruhan, dan pendapatan khusus dari kegiatan kenelayanan. Perubahan pendapatan secara umum belum sepenuhnya

mencerminkan pengaruh COREMAP karena sebagian penduduk bekerja di luar pekerjaan yang berbasis terumbu karang dan tidak mendapatkan dana bergulir. Oleh sebab itu, pengaruh COREMAP dapat dilihat pada perkembangan pendapatan khusus untuk rumah tangga yang mendapatkan dana bergulir.

B. Pendapatan di Kawasan Daratan Pulau Selayar

Secara umum selama empat tahun terakhir (2006-2011), terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga di Desa Buki dan Bungaiya dari 798 ribu (tahun 2006) menjadi 1,04 juta (tahun 2011) atau 5,99 persen per tahun. Permasalahan distribusi pendapatan terjadi di kedua desa tersebut, sehingga terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi antara pendapatan terendah dan tertinggi. Tahun 2006 pendapatan minimum rumah tangga sebesar 16 ribu rupiah per bulan, sementara itu pendapatan tertinggi pada tahun tersebut mencapai 2,7 juta rupiah. Kesenjangan yang sama terjadi pada tahun 2011, dimana pendapatan terendah sebesar 40 ribu rupiah per bulan dan pendapatan tertinggi mencapai 5,21 juta/bulan. Pendapatan terendah tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar harus didapat dari bantuan orang lain maupun kiriman. Perbedaan pendapatan penduduk tersebut dapat terjadi karena perbedaan akses pengelolaan sumber daya alam. Daerah Bungaiya dan Buki merupakan daerah yang sebagian besar berupa bebatuan tandus yang tergantung pada air hujan. Tidak semua tanaman dapat tumbuh dengan baik di daerah ini termasuk padi. Beberapa jenis tanaman yang biasa ditanam penduduk adalah tanaman keras seperti mede, kelapa, serta sukun dan tanaman musiman seperti jagung, tomat, cabe dan kacang hijau.

Penduduk Buki dan Bungaiya yang bekerja sebagai petani, tidak bisa mengandalkan hasil budidaya tanaman tetapi mereka lebih banyak tergantung pada peternakan (sapi dan kambing). Peternakan sapi dan

kambing didukung oleh lahan semak belukar yang sangat luas, sehingga peternak tidak perlu memberi pakan secara khusus pada ternak yang mereka miliki. Ternak sapi biasa dibiarkan mencari makan sendiri ke semak belukar dan pulang ke kandang setelah beberapa bulan hidup di belantara, yaitu pada musim kemarau. Pada waktu musim kemarau ternak akan pulang ke kandangnya karena kekurangan air minum. Pada saat itulah pemilik ternak memberikan air secukupnya kepada ternak mereka. Semakin besar jumlah kepemilikan ternak penduduk semakin kaya karena harga sapi bisa mencapai lebih dari 6 juta per ekor. Namun demikian, tidak semua penduduk juga memiliki ternak, karena keterbatasan modal dan akses sehingga terdapat disparitas pendapatan antara penduduk yang kaya dan miskin.

Sebagian penduduk di Buki dan Bungaiya bekerja sebagai nelayan baik nelayan jaring, pancing maupun teripang. Kendala yang dihadapi nelayan secara umum berhubungan dengan musim. Pada waktu musim gelombang tenang nelayan dapat mencari ikan ke laut dengan waktu yang lebih panjang sehingga hasil yang mereka dapat juga lebih besar. Hal ini berbeda dengan musim gelombang kuat dimana nelayan tidak berani melaut karena faktor resiko keselamatan jiwa dan kapal. Ketika musim gelombang kuat ini membuat sebagian nelayan bekerja sebagai petani. Ada juga nelayan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan, sehingga jika musim ombak besar terjadi di sebelah timur pulau Selayar, mereka mencari ikan di sebelah barat. Demikian pula sebaliknya, jika ombak besar terjadi di sebelah barat mereka mencari ikan di daerah timur. Keterbatasan alat tangkap untuk melaut yang dimiliki serta semakin menurunnya populasi ikan di laut menjadi sebab rendahnya pendapatan nelayan di kedua desa lokasi penelitian.

Peningkatan pendapatan penduduk Buki dan Bungaiya pada tahun 2011 salah satunya dapat dikaitkan dengan perubahan musim

angin yang cukup bersahabat untuk melaut. Pada tahun 2010, masa angin laut tenang lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar 6 bulan. Keadaan ini berpengaruh pada tingginya jumlah bulan nelayan melaut dan berhasilnya budidaya rumput laut di Bungaiya. Keberhasilan budidaya rumput laut ini telah mendorong warga untuk melakukan budidaya serupa pada tahun 2011 ini, tetapi harus menunggu sampai keadaan air laut tenang. Dari aspek pekerjaan yang lain, tidak ada perubahan yang signifikan antara tiga titik waktu tersebut sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan/ pendapatan penduduk.

Tabel 4.1.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga di Buki dan Bungaiya
Kabupaten Selayar Tahun 2006, 2008 dan 2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (RP)		
		2006	2008	2011
1	Pendapatan per kapita/bulan	203.948,00	257.750,00	284.005,00
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	797.958,00	940.085,00	1.036.762,00
3	Median pendapatan	623.750,00	700.000,00	808.333,00
4	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	16.666,00	79.166,00	40.000,00
5	Pendapatan rumah tangga maximum/bulan	2.650.000,00	5.550.000,00	5.208.333,00
	N	100	120	121
	Garis kemiskinan		158.050,00	180.355,00
	Selisih dengan garis kemiskinan		99.700,00	103.650,00

Sumber : - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006
 - Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Peningkatan pendapatan penduduk di Buki dan Bungaiya tersebut belum memperhatikan faktor inflasi di daerah, sehingga

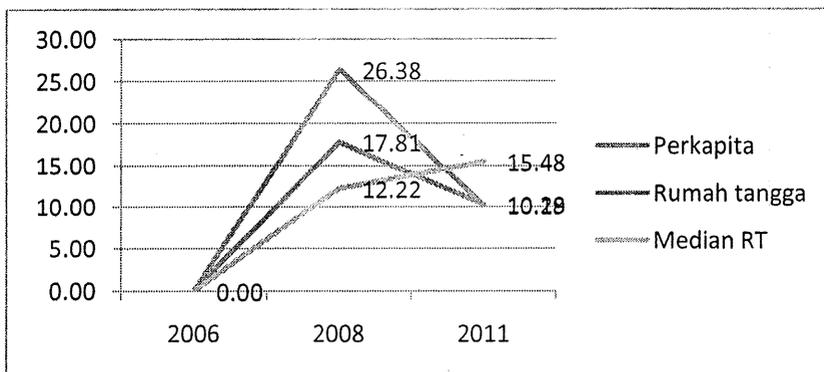
belum mencerminkan perkembangan pendapatan secara riil di masyarakat. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2009 sebesar 7,89 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi di kedua desa lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten. Dengan kata lain, secara riil tingkat kesejahteraan penduduk di kedua desa tidak mengalami perubahan bahkan menurun dibandingkan dengan rata-rata tingkat kabupaten. Hal ini berbeda dengan kondisi peningkatan pendapatan tahun 2006-2009 yang lebih tinggi dari laju inflasi di daerah yaitu 7,81 persen tahun 2006 dan 5,64 persen tahun 2007, sehingga secara riil terjadi peningkatan pendapatan penduduk di lokasi studi. Akan tetapi peningkatan pendapatan riil ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi di daerah yang mencapai 7,59 persen pada tahun 2009.

Jika dihubungkan dengan garis kemiskinan di Kabupaten Selayar pada tahun 2009 sebesar 180.355 rupiah, maka rata-rata pendapatan penduduk tersebut sudah lebih tinggi dari garis kemiskinan di daerah. Selisih rata-rata pendapatan penduduk di Buki dan Bungaiya dengan garis kemiskinan kabupaten sebesar 103 ribu rupiah. Meskipun demikian angka kemiskinan di daerah ini masih sangat tinggi karena sekitar 23,3 persen rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk dalam kategori miskin. Dibandingkan dengan pendapatan per kapita di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2009, pendapatan perkapita di Buki dan Bungaiya masih di bawah pendapatan perkapita tingkat kabupaten (293 ribu rupiah), sehingga tingkat kesejahteraan di Buki dan Bungaiya secara relatif masih di bawah desa lain di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Diagram 4.1 menunjukkan perubahan perkembangan rata-rata pendapatan rumah tangga di lokasi studi sebesar 17,81 persen pada tahun 2006-2008, dan 10,20 persen pada tahun 2008-2011. Peningkatan pendapatan tersebut belum memperhatikan tingkat

inflasi di daerah, sehingga secara riil pendapatan penduduk di kedua lokasi belum memperlihatkan peningkatan, karena inflasi selama dua tahun terakhir lebih besar dari 10 persen. Tidak adanya perubahan dalam teknologi penangkapan ikan, sarana prasarana dan pasar menjadi sebab tidak adanya peningkatan pendapatan riil di masyarakat. Berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dicanangkan pemerintah di daerah ini, namun belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program bahkan salah sasaran karena tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai contoh program pengadaan kapal penangkap ikan yang sedianya ditujukan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Kapal tersebut memiliki kapasitas tonase yang lebih besar dibandingkan dengan kapal milik nelayan, tetapi masyarakat tidak dapat menggunakan dengan alasan biaya operasional cukup tinggi, sementara hasil tangkapan tetap sama saja. Nelayan juga harus membentuk kelompok pengguna sementara, karena mereka terbiasa bekerja secara mandiri dengan bebas tanpa ikatan kelompok.

Diagram 4.1.
Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga dan Per-kapita,
di Kabupaten Kepulauan Selayar 2006, 2008 dan 2011



Sumber : Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Hasil penelitian tahun 2008 menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di perikanan laut mengalami peningkatan sebesar 14,02 persen dari tahun 2006-2008. Berdasarkan inflasi di daerah dalam dua tahun terakhir (13,45 persen), maka secara umum perekonomian penduduk yang bekerja di sektor perikanan cenderung tidak mengalami perubahan. Hal ini berhubungan dengan tidak adanya perubahan teknologi penangkapan ikan, areal penangkapan dan jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan selama dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian tahun 2011, dimana selama tahun 2008-2011 terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan sebesar 9,11 persen. Perkembangan pendapatan ini lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun yang sama, sehingga antara tahun tersebut pendapatan nelayan cenderung mengalami penurunan. Berdasar data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka tahun 2010, pertumbuhan ekonomi di daerah pada tahun 2009 berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai 7,89 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku mencapai 18,93 persen.

Nelayan di Kecamatan Buki dan Bontomatene secara umum tidak mengalami perubahan sebagai nelayan mandiri, karena masih menggunakan teknologi sederhana dalam penangkapan ikan di laut. Hasil melaut hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga bahkan kurang. Beberapa program yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir hingga saat ini belum dapat berhasil karena kurang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, bantuan pemberian kapal mesin oleh DKP yang sedianya dimaksudkan untuk modernisasi armada kapal tangkap, agar supaya nelayan dapat menangkap ikan sampai ke kawasan laut dalam. Kapal tersebut hanya digunakan oleh nelayan selama beberapa hari, selanjutnya tidak ada yang berani

menggunakannya, dengan alasan biaya operasional terlalu tinggi, sementara hasilnya tidak dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional. Sebenarnya nelayan dapat menggunakan kapal tersebut secara berkelompok, namun demikian selama ini sistem kerja kelompok cenderung hanya menimbulkan perselisihan (konflik) antar anggota. Pada akhirnya kapal tersebut tidak dapat digunakan dan untuk menghindari kerusakan karena tidak dipelihara, pengelolaan kapal diambil alih DKP.

Tabel 4.2.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga di Buki dan Bungaiya Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011

No	Lapangan pekerjaan	Mean	Median	Maximum	Minimum	N
1	Perikanan tangkap	1.010.330	816.667	5.208.333	200.000	48
2	Pertanian	859.824	416.667	2.708.333	66.667	27
3	Perdagangan	1.084.722	640.000	2.700.000	153.333	9
4	Jasa	1.219.314	900.000	2.700.000	40.000	17
5	Lainnya	1.219.281	900.000	4.200.000	41.667	20
Total		1.036.762	808.333	5.208.333	40.000	121

Sumber : Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Tahun 2006-2008 pendapatan rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di budidaya rumput laut mengalami penurunan sebesar 12 persen. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan produktivitas rumput laut, bahkan beberapa warga telah meninggalkan budidaya ini karena kurang menguntungkan. Kegagalan budidaya rumput laut terutama terjadi di Buki, sehingga warga sudah tidak berminat dan peduli dengan budidaya rumput laut. Pada tahun 2011 budidaya rumput laut kembali dilakukan oleh penduduk Desa Bungaiya, tetapi tidak dilakukan di Desa Buki. Iklim yang bersahabat untuk budidaya rumput laut yaitu laut yang tenang disertai hujan menyebabkan budidaya rumput laut di daerah ini cukup berhasil. Keberhasilan budidaya rumput laut ini seolah menjadi obat kegagalan yang terjadi sebelumnya sehingga masyarakat kembali bersemangat

untuk mengembangkan rumput laut. Meskipun demikian rumput laut tidak lagi menjadi pekerjaan utama, tetapi hanya menjadi pekerjaan sampingan.

Hasil penelitian T1 (tahun 2008) menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga di sektor pertanian tanaman pangan mengalami peningkatan sebesar 68 persen dibandingkan dengan pendapatan tahun 2006. Peningkatan pendapatan rumah tangga yang bekerja di pertanian juga terjadi pada tahun 2009-2011 yang meningkat sebesar 29,9 persen. Peningkatan yang cukup besar ini, disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sampingan di luar sektor pertanian. Perubahan pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor ini lebih dipengaruhi oleh pendapatan dari luar sektor pertanian atau adanya tambahan anggota rumah tangga yang bekerja. Rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian ini hampir semua tidak terpengaruh langsung oleh program coremap. Mengingat tanaman pangan rata-rata hanya dapat dipanen sekali dalam setahun, maka petani tanaman pangan biasanya mempunyai pekerjaan sampingan seperti beternak kambing dan/ataupun sapi.

Distribusi rumah tangga berdasarkan survei sosial ekonomi tahun 2006 menunjukkan terdapat 58 persen rumah tangga di Buki dan Bungaiya yang mempunyai pendapatan di bawah pendapatan rata-rata (798 ribu rupiah), yang secara relatif merupakan keluarga/rumah tangga miskin. Tahun 2008 proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah pendapatan rata-rata (940 ribu rupiah) meningkat menjadi 64,2 persen dan tahun 2011 menjadi sekitar 64,5 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kemiskinan di daerah penelitian yang disebabkan oleh ketimpangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Rumah tangga yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata terdapat di beberapa lapangan pekerjaan baik perikanan tangkap, pertanian tanaman pangan dan lapangan pekerjaan yang lain. Jika dikelompokkan dalam

beberapa kelompok pendapatan, distribusi pendapatan rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.

Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Buki dan Bungaiya, Kabupaten Selayar, Tahun 2006, 2008 dan 2011

No	Kelompok Pendapatan	2006	2008	2011
1	<500.000	32,0	35,0	30,6
2	500.000 – 999.999	41,0	30,8	31,4
3	1.000.000 – 1.499.999	16,0	13,3	14,9
4	1.500.000 – 1999.999	6,0	10,0	9,1
5	2.000.000 – 2.499.999	3,0	5,0	7,4
6	> 2.500.000	2,0	5,9	6,6
Total		100	100	100
N		100	120	121

Sumber : - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006

- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Distribusi pendapatan rumah tangga dari tahun 2006-2011 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki pendapatan di bawah 1 juta rupiah/bulan. Terjadi penurunan proporsi rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah 1 juta dari 73 persen pada tahun 2006 menjadi 62 persen pada tahun 2011 (tabel 4.3). Proporsi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas 2,5 juta rupiah/bulan juga mengalami peningkatan dari 2 persen pada tahun 2006 menjadi 6,6 persen pada tahun 2011. Pergeseran pendapatan ini terjadi karena sebagian rumah tangga dapat meningkatkan pendapatannya baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Keadaan ini sejalan dengan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga di Buki dan Bungaiya. Kelompok pendapatan paling bawah sekitar 31 persen, artinya tingkat kemiskinan di daerah pesisir Buki dan Bungaiya masih tergolong tinggi.

- **Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan**

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada dasarnya bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi gelombang (tenang, kuat dan pancaroba). Hasil penelitian T1 (tahun 2008) menunjukkan adanya penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan tahun 2006-2008 sebesar 2,51 persen, kemudian meningkat 5,43 persen pada tahun 2008-2011. Penurunan pendapatan antara tahun 2006-2008 relatif kecil, tetapi jika ditambah dengan inflasi selama 2 tahun yang mencapai lebih dari 11 persen maka penurunan tersebut menjadi cukup besar dan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian belum tentu penurunan pendapatan dari kegiatan kenelayanan tersebut diikuti oleh penurunan kesejahteraan, sebab sebagian dari nelayan masih memiliki pekerjaan sampingan diluar kegiatan kenelayanan. Peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayanan antara tahun 2008-2011 menjadi kurang bermakna setelah memperhatikan inflasi di daerah yang lebih besar dari peningkatan pendapatan tersebut.

Tabel 4.4.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan
di Buki dan Bungaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar,
Tahun 2006- 2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)		
		2006	2008	2011
1	Rata-rata	556.798	534.229	563.225
2	Median	400.000	386.667	466.667
3	Minimum	51.667	40.000	50.000
4	Maksimum	2.650.000	2.186.667	1.716.667
N		53	70	63

Sumber: - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006
 - Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Nelayan Desa Buki biasa melaut dalam satu wilayah penangkapan yang berdekatan dengan permukiman penduduk, sehingga dalam satu tahun mereka hanya melaut pada musim banyak ikan/gelombang tenang dan pancaroba. Kondisi berbeda terdapat di Bungaiya dimana pada waktu musim gelombang kuat sebagian dari mereka dapat berpindah di perairan laut bagian utara. Pada waktu musim gelombang kuat, ada sebagian nelayan yang tidak mempunyai pendapatan dari melaut, karena mereka tidak melaut atau melaut tetapi tidak ada hasil yang didapatkan. Beberapa sarana tangkap seperti sero bahkan rusak dan tidak dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut. Perbedaan lain bagi nelayan di kedua desa ini adalah sebagian penduduk di Bungaiya telah berhasil melakukan budidaya rumput laut, sedangkan penduduk Buki belum ada yang berhasil melakukannya. Kegagalan budidaya rumput laut di Desa Buki berlanjut hingga kini, sehingga tidak ada anggota masyarakat yang berminat untuk mengembangkannya.

Tabel 4.5.

Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan di Buki dan Bungaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)

No	Kelompok Pendapatan	2006	2008	2011
1	< 500.000	87,8	86,4	52,4
2	500.000 – 999.999	10,2	9,1	33,3
3	1.000.000 – 1.499.999	2,0	3,0	7,9
4	1.500.000 – 1.999.999	0,0	1,5	4,8
5	2.000.000 – 2.499.999	0,0	0,0	1,6
6	2.500.000 – 2.999.999	0,0	0,0	0,0
	Total	100	100	100
	N	53	66	62

Sumber : - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006
 - Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan menunjukkan bahwa lebih dari 85 persen nelayan memiliki pendapatan dari kegiatan kenelayanan kurang dari 1 juta rupiah. Jika dalam 1 rumah tangga terdapat 4 anggota rumah tangga, maka pendapatan perkapita rumah tangga dari kegiatan kenelayanan tersebut akan berada di bawah 250 ribu rupiah per bulan. Pendapatan yang kecil dari sektor kenelayanan menunjukkan pemanfaatan potensi sumber daya laut yang masih rendah di daerah ini. Dalam waktu tertentu (musim gelombang kuat) sebagian nelayan bahkan tidak melaut karena takut terhadap resiko di laut.

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan antara tahun 2006-2011 bervariasi menurut musim gelombang tenang, pancaroba dan gelombang kuat. Pendapatan tertinggi terdapat pada musim gelombang tenang yaitu mencapai 866 ribu rupiah dan terendah terdapat pada musim gelombang kuat yaitu 399 ribu rupiah. Jumlah nelayan yang melaut juga bervariasi dimana pada musim gelombang lemah terdapat 58 rumah tangga yang pergi melaut sedangkan pada musim gelombang kuat hanya ada 43 nelayan. Pada waktu musim gelombang kuat, sebagian nelayan tidak melaut dan memilih pekerjaan di luar kenelayanan, seperti bertani atau beternak. Hal tersebut karena gelombang tinggi, beresiko terhadap keselamatan jiwa nelayan. Pada waktu musim gelombang kuat, sebagian nelayan di Bungaiya berpindah lokasi peangkapan ikan, yaitu di daerah yang berdekatan dengan pelabuhan Bira. Pada tahun 2011 terjadi pergeseran musim sehingga berpengaruh terhadap kegiatan kenelayanan, dimana musim gelombang tenang terjadi cukup lama (6 bulan). Musim gelombang tenang yang lama membuat nelayan memiliki waktu lebih lama untuk melaut dan melakukan budidaya rumput laut.

Tabel 4.6.
Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Di Buki Dan Bungaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis gelombang	Tahun		
		2006	2008	2011
1	Gelombang Kuat	475.645	577.321 (28)	399.302 (43)
2	Pancaroba	479.735	696.463 (62)	542.555 (45)
3	Gelombang Tenang	1.085.784	796.098 (67)	866.465 (58)
	Gabungan	556.798	542.801 (70)	563.225 (62)

Sumber : Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, Tahun 2006, 2008 dan 2011

Keterangan : () = N

Teknologi penangkapan ikan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, sehingga perubahan pendapatan dari kegiatan kenelayanan lebih dipengaruhi faktor cuaca dan populasi ikan yang ada dilaut. Tutupan karang di laut Kepulauan Selayar dari tahun 2006-2011 mengalami peningkatan sebesar 40 persen. Meskipun demikian, peningkatan tutupan karang belum berdampak pada peningkatan populasi ikan di laut, sehingga jumlah tangkapan ikan belum mengalami perubahan. Pengeluaran sekali melaut juga tidak mengalami perubahan, artinya perubahan pendapatan juga tidak dipengaruhi oleh kondisi pengeluaran untuk sekali melaut. Faktor alam yang cukup berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan di laut adalah lama waktu musim gelombang tenang lebih lama dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 musim gelombang tenang terjadi selama 6 bulan, sehingga nelayan memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan pekerjaan dilaut.

Diagram 4.2 menunjukkan perkembangan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menurut musim di Desa Buki dan Desa Bungaiya pada tahun 2006-2011. Rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan mengalami peningkatan dari tahun 2008-2011 sebesar 3,8 persen per tahun sedangkan pada tahun 2006-

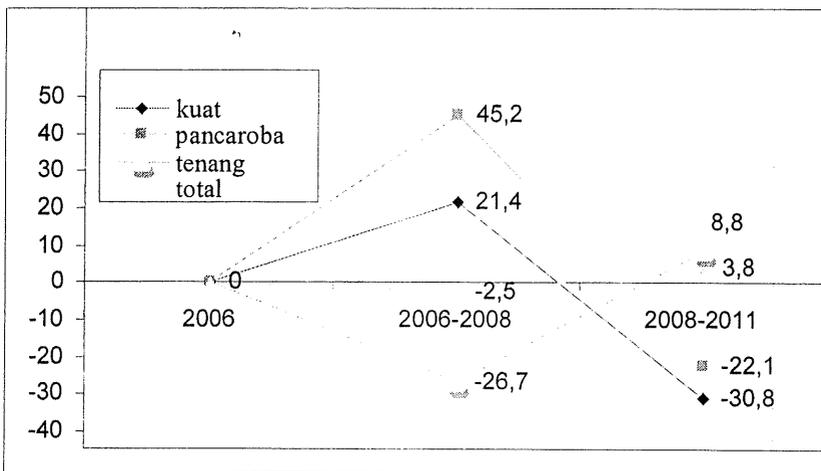
2008 mengalami penurunan sekitar 2,5 persen per tahun. Dengan memperhatikan nilai inflasi di daerah yang lebih besar dari 5 persen per tahun, maka pendapatan riil dari kegiatan kenelayanan justru mengalami penurunan pada tahun 2006-2011. Penurunan pendapatan dari kegiatan kenelayanan lebih disebabkan oleh tidak adanya perubahan teknologi penangkapan ikan. Sementara itu, populasi ikan cenderung mengalami penurunan. Sistem pemasaran hasil tangkapan di laut juga tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2006-2011. Ikan segar biasa dijual ke pasar di kota Benteng, jarang dijual ke luar Kabupaten Kepulauan Selayar, karena hasil tangkapan di laut hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan di daerah Kabupaten Selayar.

Berbeda halnya dengan hasil tangkapan nelayan yang memiliki kapal besar biasanya dijual ke luar daerah dengan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi, nelayan besar biasanya bukan berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi berasal dari Kabupaten Bulukumba. Sehingga nelayan Selayar kalah bersaing dan kurang mampu memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Mereka kalah bersaing dengan nelayan luar yang memiliki armada tangkap lebih modern dengan daya jangkauan yang lebih luas. Usaha untuk modernisasi alat tangkap ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami berbagai kendala, seperti mahalnya harga alat tangkap, termasuk waktu melaut. Nelayan Buki dan Bungaiya biasanya melaut dalam waktu yang singkat dengan menggunakan armada kapal kecil. Modernisasi peralatan melaut menuntut mereka bekerja selama beberapa hari di laut dan membutuhkan kerja berkelompok dengan biaya melaut yang lebih tinggi. Situasi ini belum menjadi kebiasaan dan budaya yang dilakukan oleh nelayan di Buki dan Bungaiya.

Ketidakmampuan untuk menggunakan armada tangkap yang lebih modern di Kabupaten Kepulauan Selayar tercermin dari tidak

dimanfaatkannya bantuan kapal dari DKP. Hal tersebut karena biaya untuk melaut sangat tinggi, rata-rata membutuhkan biaya untuk membeli bensin sekitar 150 ribu sekali melaut. Biaya tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan nelayan apabila menggunakan perahu motor kecil, yaitu sekitar 10 ribu sekali melaut. Biaya yang tinggi, tetapi dengan hasil yang kurang sesuai dengan pendapatan tersebut yang membuat sebagian nelayan tidak mau melaut dengan armada yang lebih modern.

Diagram 4.2
Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan
Menurut Musim, Di Buki Dan Bungaiya,
Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006
 - Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

C. Pendapatan di Kawasan Pulau Kecil

Pendapatan rumah tangga di Kawasan Pasimasunggu Timur dalam empat tahun terakhir 2006-2011 mengalami peningkatan yang

cukup tinggi yaitu 507.122 rupiah (2006) meningkat menjadi 1.181.390 rupiah pada tahun 2011. Kenaikan pendapatan rumah tangga tersebut dipengaruhi beberapa faktor di antaranya jumlah anggota yang bekerja, dan pekerjaan utama kepala rumah tangga. Apabila kepala keluarga (KK) memiliki pekerjaan lebih dari satu, tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga, seperti PNS (guru) memiliki pekerjaan sampingan warung (perdagangan) atau pemilik warung memiliki pekerjaan sampingan peternakan atau pertanian tanaman pangan. Peningkatan pendapatan di kawasan Pasimasunggu Timur disebabkan oleh produktivitas padi yang meningkat, sehingga petani dapat menjual beras dengan jumlah cukup banyak dengan harga jual yang relative stabil sekitar Rp. 5500 per kilo gram. Hasil panen beras dijual/dibeli kepada pedagang dari pulau (Pulau Kayuadi) dan sebagian dijual/ dikirim ke Kota Benteng. Sementara itu, hasil tangkapan ikan dari berbagai wilayah relatif banyak, masyarakat mampu memperoleh pendapatan yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Pendapatan rumah tangga di kawasan Pasimasunggu Timur memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara pendapatan rumah tangga minimum dibandingkan pendapatan maximum. Pendapatan minimum pada tahun 2006 sebesar Rp. 30.000,-, sementara pendapatan tertinggi pada tahun yang sama mencapai 2,6 juta rupiah. Kesenjangan yang sama terjadi pada tahun 2011, dimana pendapatan terendah sekitar Rp. 29 ribu, sedangkan pendapatan tertinggi mencapai 8,25 juta rupiah per bulan. Pendapatan terendah tersebut, menurut beberapa nara sumber tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut memerlukan bantuan, baik dari keluarga maupun dari pemerintah. Ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dapat terjadi karena perbedaan dalam akses informasi dan pengelolaan sumberdaya alam.

Penduduk Pasimasunggu Timur sebagian besar memiliki pekerjaan di sector pertanian sebagai petani tanaman pangan dan perkebunan (jambu mente dan kelapa). Pertanian tanaman pangan bisa panen satu atau dua kali dalam setahun, karena sawahnya merupakan sawah tadah hujan. Sementara itu, tanaman jambu mente dapat panen selama satu kali dalam setahun. Selain memiliki pekerjaan di atas, sebagian penduduk juga memiliki ternak sapi dan kambing yang berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti menyekolahkan anak, atau untuk biaya berobat. Hal itu, karena penduduk tidak dapat mengandalkan dari pendapatan hasil pertanian (pangan dan perkebunan) dan kegiatan kenelayanan.

Tabel 4.7.

Statistik Pendapatan Rumah Tangga di Kawasan Pasimasunggu Timur Kabupaten Selayar Tahun 2006-2011

No	Jenis Pendapatan	Nilai (RP)		
		2006	2008	2011
1	Pendapatan Per Kapita/Bulan	126.380,06	194.818,0	311.215,50
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	507.122,50	724.881,00	1.181.390,0
3	Median pendapatan	125.000	535.833,00	808.333,33
4	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	30.000	45.83	29.166,67
5	Pendapatan rumah tangga maximum/bulan	2.600.000,0	3.116.666	8.250.000,0
	N	100	129	129
	Batas Garis Kemiskinan		158.050,00	180.355,00
	Selisih Dengan Garis Kemiskinan		54.768,00	140.860,00

Sumber : - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006
 - Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Selain memiliki pekerjaan utama sebagian penduduk juga mempunyai pekerjaan sampingan, seperti memiliki warung (perdagangan), memelihara ternak, membuka kegiatan menjahit, atau menjadi tukang bangunan. Penduduk atau rumah tangga yang memiliki ketrampilan dan sumber pendapatan lebih dari satu, secara akumulatif memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki ketrampilan atau pekerjaan sampingan lain, sebagaimana terlihat pada Tabel 4,7.

Perbedaan yang mencolok antara pendapatan minimum dibandingkan dengan pendapatan maximum, antara rumah tangga kaya dan miskin tidak dapat terhindarkan. Hal tersebut karena perbedaan memperoleh akses informasi, kepemilikan teknologi penangkapan ikan, dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi, biasanya memiliki lebih dari satu sumber pendapatan, seperti menjadi guru (PNS) atau memiliki usaha perdagangan (warung/toko sembako), sehingga secara absolut pendapatannya menjadi tinggi. Pendapatan rumah tangga nelayan yang rendah disebabkan oleh kegiatan kenelayan masih menggunakan alat tangkap yang sangat sederhana (pancing, jaring, sero), tidak memiliki pendapatan sampingan dan tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja.

Rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan Pasimasunggu Timur pada tahun 2008 meningkat sebesar 42,9 persen dibandingkan dengan tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2008- 2011 juga memperlihatkan kenaikan cukup tinggi mencapai 63,0 persen. Pendapatan pada tahun 2006-2011 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 132,96 persen. Tingginya kenaikan pendapatan rumah tangga tahun 2008- 2011 karena pada tahun 2008 maupun 2011 di kawasan Pasimasunggu Timur sedang panen padi yang cukup melimpah, dan harga padi tinggi dan permintaan beras juga cukup tinggi. Selain itu, di kawasan ini sedang panen mede, adanya kenaikan

harga ikan hasil tangkapan laut dan kenaikan produksi maupun harga ikan hasil budidaya tambak (bandeng). Panen padi, panen jambu mede, naiknya harga ikan dan panen budidaya tambak dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga cukup signifikan pada tahun 2006-2011.

Jika dihubungkan dengan garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2009 sebesar 180.355 rupiah, rata-rata pendapatan penduduk kawasan Pasimasunggu Timur sudah lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan di kabupaten tersebut. Selisih rata-rata pendapatan penduduk di kawasan Pasimasunggu Timur dengan garis kemiskinan kabupaten adalah sebesar Rp. 140.860,00 ribu rupiah. Meskipun rata-rata pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan batas garis kemiskinan, namun demikian angka kemiskinan di daerah ini masih sangat tinggi. Apabila pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2009 sebesar Rp. 293.000, dibandingkan dengan pendapatan per kapita di kawasan Pasimasunggu Timur, terlihat bahwa pendapatan per kapita penduduk di kawasan tersebut masih di atas pendapatan per kapita tingkat kabupaten, yaitu sebesar Rp. 311.215,50,-, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Pasimasunggu Timur relatif masih lebih baik dibanding desa lain di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Nelayan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, seperti halnya nelayan di Kecamatan Bontomantene merupakan nelayan yang bekerja mandiri, tidak tergantung pada pemilik modal (bos) sehingga mereka dapat menjual hasil tangkapan ikannya secara bebas kepada penduduk atau pedagang/pengumpul atau dijual di pasar. Pemilikan alat tangkap dan penggunaan teknologi penangkapan di kawasan ini masih sangat sederhana, seperti perahu (*joloro*) dengan kekuatan 2-5 PK, pancing dan jaring. Kepemilikan alat tangkap (perahu), kemampuan melaut menjadi relatif terbatas dengan rata-rata 2-4 jam sehari. Selain itu, wilayah tangkapan ikan (*fishing ground*) juga relatif

dekat di sekitar desa sehingga hasil tangkapan sangat kecil, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Hasil tangkapan laut selain dijual pada konsumen di pasar, sebagian dikonsumsi sendiri atau diberikan kepada tetangga, karena saat ini belum banyak penduduk yang mengolah ikan menjadi ikan asin.

Peningkatan pendapatan penduduk Pasimasunggu Timur pada tahun 2011, salah satunya karena berhasilnya panen padi yang dapat dilakukan dua kali dalam setahun, sehingga produksi padi meningkat cukup tinggi. Selain itu, adanya perubahan/pergeseran musim, dimana pada tahun 2011 musim timur (angin tenang) waktunya lebih panjang sekitar 7 bulan, sehingga nelayan dapat melaut lebih lama, dan hasil ikan dan pendapatannya lebih baik dibandingkan tahun 2006. Peningkatan pendapatan rumah tangga pada tahun 2006, 2008, dan tahun 2011 tersebut belum memperhatikan inflasi yang mencapai lebih dari 5 persen per tahun, sehingga belum dapat mencerminkan peningkatan pendapatan di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2009 mencapai 7,89 persen, sementara pertumbuhan ekonomi di kawasan Pasimasunggu Timur lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten. Secara riil, tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pulau Jampea tidak mengalami perubahan secara signifikan, bahkan cenderung mengalami penurunan tingkat kesejahtraannya. Perubahan pendapatan rumah tangga di kawasan Pasimasunggu Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8 merupakan gambaran yang memperlihatkan perubahan rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan Pasimasunggu Timur tahun 2006-2008 sebesar 21,47 persen atau 7,13 persen per tahun. Pada tahun 2008-2011 juga memperlihatkan kenaikan sebesar 31,5 persen atau sekitar 10,4 persen per tahun dan pada tahun 2006-2011 menunjukkan perubahan sebesar 26,9 persen atau 5,5 persen per tahun. Peningkatan pendapatan tersebut belum

memperhatikan inflasi di tingkat Kabupaten yang dalam dua tahun terakhir yang mencapai 20 persen. Meskipun tidak adanya perubahan teknologi alat tangkap, terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, namun masih menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut kemungkinan adanya berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah digulirkan pemerintah daerah kepada masyarakat, seperti PEMP, bantuan pengadaan kapal untuk nelayan (DKP Kabupaten Kepulauan Selayar), program COREMAP (*seed fund dan village grand*) dan yang terakhir PNPM (Simpan Pinjam Kelompok). Meskipun adanya berbagai program di atas, namun implementasi program-program tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. peningkatan pendapatan, juga karena mulai berkembangnya ekonomi pasar di tingkat lokal, seperti pasar local 3 kali dalam seminggu di kawasan Pasimasunggu Timur.

Tabel 4.8.
Statistik Perubahan Pendapatan Rumah Tangga di Kawasan
Pasimasunggu Timur, Kabupaten Selayar, Tahun 2006-2011 (Persen)

No	Jenis Pendapatan	Perubahan		
		2006-2008	2008-2011	2006-2011
1	Pendapatan Per Kapita/Bulan	27,08	29,87	29,25
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	21,47	31,49	26,59
3	Median pendapatan	164,33	25,43	109,33
4	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	26,39	-18,18	-0,56
5	Pendapatan rumah tangga maximum/bulan	9,94	82,35	43,46

Sumber : - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006
 - Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Kemiskinan penduduk di suatu kawasan juga dapat dilihat dari distribusi pendapatan rumah tangga berdasarkan kelompok pendapatan. Pada tahun 2006 rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 500 ribu, cukup tinggi mencapai 68 persen, sedangkan pada tahun 2008 persentase rumah tangga yang memiliki pendapatan sama, menurun menjadi 45 persen, dan terus menurun menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2011. Penurunan proporsi rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp. 500 ribu per bulan tersebut belum dapat memperlihatkan semakin membaiknya kesejahteraan rumah tangga di Kecamatan Pasimasunggu Timur. Hal tersebut berdasarkan pengamatan masih banyak rumah tangga yang menempati rumah yang kurang layak, dinding terbuat dari anyaman bambu dengan atap rumbia, belum ada aliran listrik dan belum memiliki MCK. Meskipun terjadi penurunan proporsi rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp. 500 ribu, apabila diukur dengan batas kemiskinan yang dikeluarkan Bank Dunia sebesar 2 dollar per hari atau sekitar atau sekitar Rp 600.000,- per bulan, masih memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga di kawasan ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa di kawasan tersebut belum ada perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga, baik pada tahun 2006, 2008, maupun tahun 2011. Sementara itu, proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan menengah dan tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2006, 2008 dan 2011. Rumah tangga yang memiliki pendapatan Rp. 1 juta-Rp. 1.999.999 yang semula 14 persen meningkat menjadi 27,7 persen pada tahun 2011. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi jumlahnya juga meningkat pada tahun 2006-2011 yang semula 2 persen (2006) menjadi 11,8 persen pada tahun 2011.

Tabel 4.9.

**Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di
Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2006-2011**

No	Kelompok Pendapatan	2006	2008	2011
1	<500.000	68	45	30,0
2	500.000 – 999.999	16	32,6	28,5
3	1.000.000 – 1.499.999	10	12,4	16,9
4	1.500.000 – 1999.999	4	5,4	10,8
5	2.000.000 – 2.499.999	1	2,3	2,6
6	> 2.500.000	1	2,4	9,2
Total		100	100	100
N		100	129	129

Sumber : - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006

- Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Peningkatan rumah tangga yang memiliki pendapatan menengah dan tinggi tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kepala rumah tangga memiliki pekerjaan lebih dari satu, selain pekerjaan utama, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Sebagai contoh, seorang Kepala Rumah Tangga memiliki pekerjaan utama sebagai PNS (guru, pegawai pemerintah), memiliki pekerjaan tambahan, usaha perdagangan (warung), pertanian, perkebunan, perikanan budidaya (tambak), dan beternak sapi, kambing atau ayam. Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut, kemungkinan pada saat penelitian sedang panen padi, perkebunan atau harga ikan sedang membaik sehingga memberi sumbangan pendapatan dalam rumah tangga.

Melihat gambaran tingkat pendapatan berdasarkan kelompok pendapatan, memerlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagian besar masih banyak yang hidup di

bawah garis kemiskinan bahkan masih jauh dari sejahtera, sesuai dengan ukuran yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, dan hanya sebagian kecil penduduk yang menunjukkan tingkat kesejahteraannya relatif baik. Hal ini juga memperkuat beberapa hasil penelitian selama ini yang menyebutkan bahwa masyarakat petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dan memiliki pendapatan rendah (lihat Mashuri Imron, 2004).

Pendapatan rumah tangga kenelayan pada dasarnya memiliki pendapatan yang tidak menentu (tidak stabil) . Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pemilikan sarana perikanan, alat tangkap, wilayah tangkapan dan pengaruh musim angin barat-angin timur serta banyak hari melaut nelayan. Nelayan di kawasan Pasimasunggu Timur (desa Bontobulaeng dan Bontobaru) pada umumnya dapat melaut pada saat gelombang tenang (musim angin timur) dan musim pancaroba, sedangkan pada musim angin kencang (musim angin barat) mereka tidak dapat melaut, karena gelombang tinggi, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Untuk mengetahui pendapatan nelayan berdasarkan musim (gelombang kuat, pancaroba dan gelombang lemah) dapat dilihat pada uraian di bawah.

D. Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayan

Rumah tangga dari kegiatan kenelayan pada dasarnya memiliki pendapatan yang tidak menentu (tidak stabil) dan bersifat fluktuatif. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pemilikan sarana dan teknologi perikanan, jenis alat tangkap, wilayah tangkapan dan jumlah hari melaut. Selain itu, dipengaruhi musim angin barat-timur, dan gelombang (tenang dan kuat). Hasil penelitian T1 (tahun 2008) dan 2011 menunjukkan adanya kenaikan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan tahun 2008-2011 yang sangat besar. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan tahun 2008-2011 yang cukup besar, tetapi adanya inflasi yang mencapai

lebih dari 11 persen dalam 2 tahun, menyebabkan peningkatan pendapatan tersebut menjadi kurang mempunyai arti. Peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayanan dari tahun ke tahun memperlihatkan kenaikan yang cukup tinggi, terutama pendapatan tahun 2011 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah. Meningkatnya pendapatan apakah seiring dengan meningkatnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Hal tersebut belum tentu, karena banak faktor yang memengaruhi antara lain inflasi dan kemampuan daya beli nelayan dan masyarakat pesisir. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan nara sumber pada tahun 2008 dan 2011 kemampuan daya beli masyarakat di kawasan ini masih relatif rendah terhadap peningkatan pendapatan tersebut.

Sebagaimana wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya, mempunyai sumber daya laut yang cukup potensial, baik ikan, teripang maupun berbagai jenis kerang-kerangan. Potensi sumber daya laut tersebut saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan yang tersedia. Kondisi serupa terjadi di wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur (lokasi di Pulau Jamepa), termasuk di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru. Laut di sekitar dua desa tersebut juga memiliki sumber daya laut yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan maupun masyarakat pesisir, karena peralatan tangkap yang dimiliki dan digunakan nelayan masih sangat sederhana. Jenis alat tangkap yang dipakai dan dimiliki nelayan/penduduk pada umumnya terdiri dari jaring, pancing, sero dan pukot. Teknologi penangkapan yang digunakan di dua desa dan di Pasimasunggu Timur memiliki kesamaan, baik sarana maupun alat tangkap yang digunakan. Karena sarana penangkapan ikan di ke dua desa masih sangat sederhana, sehingga hasil tangkapan relatif masih sedikit (rendah).

Tabel 4.10.

**Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan
Di Bontobaru dan Bontobulaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Jenis Pendapatan	Nilai (RP)		
		2006	2008	2011
1	Rata-rata pendapatan rumah tangga/bulan	569.945	365.930	1.022.618,52
2	Median pendapatan	404.166	328.333	876.666,66
3	Pendapatan rumah tangga minimum/bulan	30.000	98.333	116.666,66
4	Pendapatan rumah tangga maksimum/bulan	3.266.667	1.216.667	3.320.000,0
N		35	55	45

Sumber: - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006
 - Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011 (Tahun 2006, belum ada)

Sebagaimana disinggung di atas, nelayan di kawasan Kecamatan Pasimasunggu Timur merupakan nelayan yang mandiri, sehingga mereka bebas menjual hasil tangkapan ikan kepada para pedagang atau pengumpul dan menjual ke pasar baik di desa atau menjual ke pulau. Nelayan di Kawasan Pasimasunggu Timur, termasuk Desa Bontobulaeng dan Bontobaru merupakan nelayan tradisional yang memiliki teknologi penangkapan dan alat tangkap yang sederhana, antara lain perahu tanpa mesin dan perahu (*joloro*) yang berkekuatan 5-12 PK dengan kemampuan jelajah yang terbatas. Dengan terbatasnya kemampuan jelajah, wilayah tangkapan ikan (*ground fishing*) juga terbatas, hanya sekitar desa dan permukiman penduduk. Selain itu, kondisi musim dan gelombang juga berpengaruh terhadap jumlah hari nelayan untuk melaut. Nelayan akan melaut ketika musim angin timur/gelombang tenang dan musim

pancaroba. Pada saat musim ini terdapat banyak ikan sehingga nelayan akan memperoleh pendapatan yang cukup tinggi. Nelayan pada umumnya menjual hasil tangkapannya langsung kepada pembeli di sekitar desa atau permukiman atau membawa hasil tangkapan ke pasar tradisional ke desa terdekat. Sementara itu, apabila lokasi pasar berada di di luar pulau, ikan- ikan tersebut dibawa dengan perahu kecil yang berkekuatan 5 PK dan biasanya penjualan ikan dilakukan secara tunai agar supaya memperoleh uang secara cepat.

Jenis ikan yang dijual ke penduduk maupun pedagang relatif sedikit dan jumlahnya tidak banyak. Jenis ikan yang dijual kepada penduduk maupun pedagang di tingkat desa tersebut antara lain : ikan tembong, lure, ikan malaja, katamba, sunu (terbatas), baronang, ikan ekor kuning, cumi-cumi dan kepiting. Harga ikan di atas sangat bervariasi satu ikat (4-6 ekor) harganya sekitar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 15.000,- . Ikan yang memiliki nilai ekonomi seperti sunu dan baronang satu ikat (4 ekor) bisa mencapai Rp.50.000,-. Ikan cumi merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dibanding dengan yang lain, satu ikat harganya bisa mencapai Rp. 30.000,-. Nelayan biasanya mendapatkan hanya dalam jumlah kecil, karena cukup sulit memperolehnya dan populasinya terbatas sehingga harganya cukup mahal. Dengan harga jual ikan yang bervariasi tersebut, nelayan memperoleh uang tunai yang cukup tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Sementara itu, pada saat musim gelombang kuat, nelayan yang memiliki perahu kecil biasanya tidak berani melaut, karena angin kencang dan membahayakan keselamatan jiwanya. Akibat nelayan tidak melaut, tidak memperoleh tangkapan ikan, sehingga mereka tidak memiliki uang tunai, yang selanjutnya pendapatannya menjadi kecil (rendah). Nelayan pada saat gelombang kuat hanya menangkap ikan di sekitar desa dan permukiman untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Sebagian kecil nelayan di Pasimasunggu Timur

(Bontobulaeng dan Bontobaru) memperoleh pendapatan hari hasil budidaya perikanan berupa tambak bandeng, sehingga mampu mendongkrak pendapatan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan.

Pendapatan rumah tangga nelayan pada tahun 2011 meningkat hampir 5 kali dibandingkan pada tahun 2008 maupun tahun 2006 (lihat Bandiyono, 2008 : 132). Pendapatan tahun 2011, apabila dibanding dengan batas kemiskinan yang dikeluarkan PBB maupun Bank Dunia menunjukkan bahwa pendapatan dari rumah tangga dari kegiatan kenelayanan lebih tinggi dari batas garis miskin dari PBB dan Bank Dunia. Ini memperlihatkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Tingginya pendapatan rumah tangga nelayan tersebut, kemungkinan semakin meningkatnya produksi hasil tangkapan, populasi ikan semakin meningkat seiring membaiknya kondisi terumbu karang di dua desa tersebut (lihat Mashuri Imron, 2009) . Selain itu hasil budidaya ikan (tambak) pada tahun 2011 produksi meningkat, hal itu terlihat saat penelitian (2011) sedang terjadi panen besar, sehingga pendapatan rumah tangga meningkat secara signifikan.

Peningkatan pendapatan di Pasimasunggu Timur, sebagian nelayan berhasil menangkap ikan kerapu sunu dan baronang dan cumi-cumi. Ikan tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi karena harganya mahal yang bisa mencapai Rp 50.000,- satu ikat (4 ekor), sementara ikan baronang harga per ikat sekitar Rp.25.000,- dan cumi cukup mahal harganya mencapai Rp. 50.000,-. Penangkapan ikan sunu dan baronang dilakukan dengan cara memancing di daerah karang. Penjualan kerapu sunu, baronang dan cumi-cumi pada umumnya tidak mengalami kesulitan, karena ada pedagang yang bersedia menampung kerapu sunu, baronang maupun cumi-cumi dalam keadaan hidup maupun mati. Ikan sunu hidup biasanya oleh penampung dibawa ke kota Makasar untuk diekspor ke Hongkong, sementara ikan kerapu sunu yang mati biasanya dikeringkan untuk dijadikan ikan asin.

Untuk mengetahui disparitas pendapatan dan tingkat kemiskinan rumah tangga nelayan dapat juga dilihat dari kelompok pendapatan sebagaimana terlihat di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan dari
Kegiatan Kenelayanan di Kecamatan Pasimasunggu Timur
Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)

No	Kelompok Pendapatan	2006	2008	2011
1	<500.000	74,3	83,7	20,0
2	500.000 – 999.999	14,3	14,0	40,0
3	1.000.000 – 1.499.999	8,6	8,3	22,2
4	1.500.000 – 1999.999	2,9	0,00	11,1
5	2.000.000 – 2.499.999	0,00	0,00	4,4
6	2.500.000 – 2.999.999	0,00	0,00	2,2
Total		100	100	100
N		35	43	45

Sumber : - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006
 - Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Tabel 4.11 menunjukkan distribusi rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan menurut kelompok pendapatan kurang dari Rp. 500.000,- pada tahun 2011 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2006 dan 2008. Berkurangnya jumlah nelayan yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 500.000,- tersebut, menunjukkan ada kecenderungan perbaikan tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan dibanding tahun 2006. Sementara itu, rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan antara Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 1 juta rupiah pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 40 persen, dibanding tahun 2006 yang berjumlah sekitar 14,3 persen pada tahun 2006. Begitu pula rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan di atas Rp.1 juta rupiah sampai Rp. 3 juta meningkat secara signifikan. Peningkatan persentase rumah tangga nelayan yang memiliki

pendapatan antara Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 3 juta tahun 2011 tersebut cukup menggembirakan, karena dapat menunjukkan semakin kecilnya rumah tangga nelayan yang tergolong miskin, mengurangi tingkat kesenjangan antara rumah tangga nelayan miskin-kaya sehingga menunjukkan ada peningkatan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan menurut kelompok, kemungkinan seiring dengan semakin membaiknya hasil tangkapan ikan, meskipun dengan teknologi penangkapan dan alat tangkap yang tidak berubah sejak tahun 2008. Selain itu peningkatan pendapatan dipengaruhi budidaya perikanan (tambak bandeng) yang dilakukan oleh rumah tangga nelayan. Selain itu, kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan menurut kelompok pendapatan, dipengaruhi faktor internal, dan faktor eksternal, seperti misalnya adanya program lain, seperti PNPM, seed fund dan program lain, yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan.

Tabel 4.12.

Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Di Bontobaru Dan Bontobulaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis gelombang	Tahun		
		2006	2008	2011
1	Gelombang Kuat	135.500,00	144.634,00	325.157,00
2	Pancaroba	258.661,00	280.833,00	863.988,00
3	Gelombang Tenang	463.852,00	685.581,00	1.929.288,00

Sumber : - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006.
 - Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008 dan 2011

Pendapatan rumah tangga nelayan, selain dapat dilihat melalui rata-rata pendapatan rumah tangga dan menurut kelompok pendapatan, juga dapat dilihat berdasarkan pendapatan rumah tangga

menurut musim. Pendapatan rumah tangga nelayan menurut musim besarnya berbeda antara musim, seperti terlihat dalam Tabel 4,12.

Berdasarkan data di atas, pendapatan rumah tangga nelayan pada di kawasan Pasimasunggu Timur pada saat gelombang kuat (angin barat) relatif kecil, tetapi terus memperlihatkan kenaikan sejak tahun 2006, 2008 dan 2011. Pada saat gelombang kuat atau musim angin barat, gelombang sangat tinggi dapat mencapai 2-3 meter, angin kencang, sehingga nelayan pada umumnya tidak berani melaut karena akan membahayakan jiwa nelayan. Karena gelombang kuat dan angin kencang biasanya nelayan menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk konsumsi sendiri. Meskipun permintaan ikan tinggi, harga ikan tinggi, tetapi hasil tangkapan ikan terbatas, karena lokasi penangkapan ikan (*fishing area*) hanya di perairan sekitar desa dan permukiman, sehingga berpengaruh terhadap kecilnya pendapatan rumah tangga nelayan. Sementara itu, pada musim pancaroba memperlihatkan kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan yang cukup besar tahun 2011 dibanding tahun 2006-2011.

Pada musim pancaroba terjadi perubahan musim antara musim angin barat menuju angin timur (gelombang tenang). Pada saat musim pancaroba, biasanya kondisi gelombang berubah-ubah, kadang gelombang tinggi dan kadang gelombang tenang. Pada musim pancaroba ini sebagian nelayan mulai berani melaut dengan menyesuaikan dengan kondisi gelombang. Pendapatan rumah tangga nelayan pada saat musim pancaroba ini cenderung tinggi, ketika nelayan melaut pada saat gelombang tidak terlalu tinggi. Menurut beberapa nelayan, pada saat itu biasanya ikan banyak, sehingga nelayan memperoleh hasil tangkapan ikan yang cukup banyak, sehingga pendapatan yang diperoleh relatif tinggi dibanding pada saat musim angin barat.

Pendapatan rumah tangga nelayan saat gelombang tenang atau angin timur pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan cukup besar

dibandingkan saat gelombang kuat maupun musim pancaroba. Hal itu karena pada saat gelombang tenang merupakan kegiatan untuk melaut bagi nelayan yang paling banyak dilakukan. Pada saat gelombang tenang (angin tidak besar), sehingga nelayan mampu memperluas daerah tangkapan ikan (*fishing area*), agak jauh dari pantai, bahkan nelayan dapat melakukan penangkapan ikan di kawasan perairan yang dekat dengan pulau yang memiliki lebih banyak ikan. Selain itu, nelayan memiliki lebih lama untuk melaut. Pada saat itu nelayan, nelayan biasanya memperoleh hasil tangkapan ikan yang jumlahnya cukup banyak dan hasil penjualan juga cukup tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan pada saat musim gelombang tenang pada tahun 2011 dibanding pada tahun 2006, maupun pada musim gelombang kuat (musim angin barat) dan musim pancaroba. Pendapatan rumah tangga menurut gelombang berdasarkan tabel di atas memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan.

Tabel 4.13.

Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Kec. Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun	Rata-rata Pendapatan (Rp)		
	Gel Kuat	Pancaroba	Gel Lemah
2006	135.500	258.661	463.852
2008	144.634	280.833	685.581
2011	325.157	863.988	1.929.288
Tahun	Perkembangan Pendapatan (%)		
	Gel Kuat	Pancaroba	Gel Lemah
2006-2008	3,4	4,3	23,9
2008-2011	41,6	69,2	60,5
2006-2011	28,0	46,8	63,2

Sumber : - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, 2006
 - Data Primer, Survei BME COREMAP, 2008 dan 2011

Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan menurut Musim di Kecamatan Pasimasunggu berdasarkan data di atas sejak tahun 2006-2011 memperlihatkan kenaikan yang cukup baik. Pada musim gelombang kuat tahun 2006-2008 menunjukkan adanya perkembangan pendapatan, meskipun tidak terlalu tinggi. Hal tersebut karena pada musim gelombang kuat, angin barat sangat kencang sehingga hanya sebagian kecil nelayan yang berani melaut, hasil penangkapan ikan sedikit, hanya untuk konsumsi sendiri. Akibatnya pendapatan nelayan kecil, sehingga berpengaruh terhadap perubahan pendapatan rumah tangga nelayan. Perubahan pendapatan nelayan yang cukup tinggi terjadi pada periode 2008-2011 yang mencapai di atas 40 persen. Perubahan pendapatan nelayan tersebut kemungkinan dipengaruhi beberapa hal, diantaranya permintaan ikan tinggi, hasil tangkapan terbatas dan harga ikan cukup tinggi, karena nelayan banyak yang tidak melaut yang disebabkan angin barat yang sangat berbahaya bagi nelayan, sehingga pendapatan nelayan meningkat.

Sementara itu, pada musim pancaroba kondisi angin laut musim masih tidak menentu, yang menimbulkan keragu-raguan sebagian nelayan untuk melaut. Pada musim pancaroba biasanya nelayan dapat memperoleh tangkapan ikan cukup banyak, terutama apabila kondisi angin relatif tenang. Permintaan ikan masih cukup tinggi, sementara harga jual ikan juga masih relatif tinggi, yang selanjutnya akan memengaruhi perubahan pendapatan nelayan. Perubahan pendapatan musim pancaroba 2008-2011 cukup tinggi mencapai lebih dari 60 persen, dibanding tahun 2006-2008. Faktor yang mempengaruhi tingginya perubahan pendapatan pada saat musim pancaroba tersebut, diantaranya hasil tangkapan tinggi, permintaan tinggi dan harga juga relatif masih tinggi. Namun demikian kemampuan nelayan untuk menyediakan hasil tangkapan ikan jumlahnya sangat terbatas (kecil).

Musim gelombang tenang (lemah) merupakan saat paling baik nelayan melaut, karena angin tidak besar, gelombang tenang, sehingga nelayan dapat melaut dengan memperluas daerah tangkapan ikan (*fishing area*), agak jauh dari pantai, bahkan nelayan dapat melakukan penangkapan ikan di kawasan perairan yang dekat dengan pulau yang memiliki lebih banyak ikan. Selain itu, jumlah hari melaut nelayan juga lebih panjang, dibanding pada musim pancaroba. Pada saat gelombang lemah biasanya nelayan memperoleh tangkapan ikan yang cukup banyak dan memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga akan mempengaruhi perubahan pendapatan seperti yang terlihat perubahan pendapatan tahun 2008-2011 yang mencapai 60 persen. Selanjutnya pada saat gelombang tenang juga terjadi perubahan pendapatan tahun 2006-2008 secara signifikan yang mencapai 63 persen. Dengan perubahan pendapatan pada musim gelombang tenang secara umum akan memengaruhi perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga di kawasan tersebut, dimana pada tahun 2011 relatif lebih baik dibanding tahun 2006 maupun 2008.

Kenaikan pendapatan dari kegiatan kenelayanan yang tercermin dari persentase perubahan lebih disebabkan oleh relatif mahalnya harga ikan, terutama jenis ikan sunu, baronang dan cumi-cumi. Sistem pemasaran hasil tangkapan di laut juga tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2006-2011. Ikan segar (sunu) biasa dijual ke pasar di kota Benteng, karena hasil tangkapan di laut hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan di daerah Kabupaten Selayar. Berbeda halnya dengan hasil tangkapan nelayan yang memiliki kapal besar biasanya dijual ke luar daerah dengan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi, nelayan besar biasanya bukan berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi berasal dari Kabupaten Bulukumba. Sehingga nelayan Selayar, terutama nelayan kawasan Pasimasunggu Timur kalah bersaing dan kurang mampu memanfaatkan potensi sumber daya perikanan secara optimal, karena keterbatasan alat

tangkap ikan yang masih tradisional. Usaha untuk modernisasi alat tangkap ikan di Pasimasunggu Timur mengalami berbagai kendala, antara lain mahalnya harga alat tangkap. Nelayan di kawasan ini biasanya hanya menggunakan perahu kecil dengan kapasitas sekitar 5,5 PK sehingga daya jelajahnya sangat terbatas. Modernisasi perahu penangkap ikan sulit dilakukan, karena kecilnya pendapatan.

E. Penutup

Perkembangan positif pendapatan masyarakat di kawasan daratan Pulau Selayar dan pulau kecil (Kecamatan Pasimasunggu Timur) merupakan keadaan yang menggembirakan. Perkembangan pendapatan masyarakat tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar yang tumbuh 7,27 persen pada tahun 2008 dan 7,89 persen pada tahun 2009. Berdasar pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan penduduk di lokasi studi sebenarnya merupakan hal yang wajar dan masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten. Kenyataan ini memberikan argumentasi bahwa peran program COREMAP di daerah penelitian terutama untuk peningkatan pendapatan penduduk masih belum menggembirakan. Tanpa program COREMAP, daerah penelitian akan tumbuh sekitar 7 persen sebagaimana terjadi di daerah Kepulauan Selayar pada umumnya.

Pengukuran keberhasilan program dengan indikator ekonomi penduduk memang cukup sulit dilakukan mengingat kegiatan yang dilakukan masih berupa program jangka pendek. Di sisi lain banyak kegiatan COREMAP yang ditujukan untuk jangka panjang seperti pelestarian terumbu karang yang dampaknya terhadap perekonomian penduduk baru dapat dirasakan dalam jangka panjang setelah COREMAP sendiri sudah berakhir. Walaupun masih banyak kekurangan berkaitan dengan program COREMAP terutama untuk

peningkatan ekonomi rumah tangga, namun kegiatan COREMAP telah meletakkan landasan yang patut diteruskan di daerah khususnya untuk mengantisipasi kerusakan ekosistem laut. Kelembagaan di tingkat desa berikut sarana prasarana yang telah ada di tingkat desa perlu dilanjutkan dan dikembangkan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kaitan ini peran pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat diperlukan sehingga terjadi keselarasan pembangunan antara berbagai sektor di daerah terutama pembangunan di daerah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Selayar. 2010. Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Angka tahun 2010. BPS Kabupaten Selayar
- BPS. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten di Indonesia tahun 2007, BPS Jakarta
- Pusdatinaker. 2010. Data dan informasi ketenagakerjaan di Indonesia, www.nakertrans.go.id
- Bandiyono Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo. (2006). Aspek Social Ekonomi Terumbu Karang di Kabupaten Selayar. Jakarta : P3O-LIPI
- _____ (2008). Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di lokasi Coremap II : Kasus Kabupaten Selayar. Jakarta : COREMAP-LIPI
- Bandiyono Suko. Ngadi, Tony Soetopo, Masyuri. (2009). Implementasi Coremap di Kabupaten Selayar: Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi. Jakarta : COREMAP-LIPI

CRITC COREMAP II. 2010. Laporan Akhir Survey Kondisi Sosial
Ekonomi. Kabupaten Kepulauan Selayar: 2010.

Ngadi. 2005. Pengangguran dan Setengah Penganggur di Indonesia
1996-2004 : Konsep, Isu, dan Implikasi Kebijakan, dalam
Warta Demografi

Oleh : Masyhuri Imron dan Ngadi

A. Pengantar

Dana bergulir (*seed fund*) di lokasi Coremap bertujuan untuk membantu masyarakat agar supaya dapat meningkatkan pendapatan, dan sekaligus membuat usaha alternatif yang diharapkan dapat mengurangi tekanan masyarakat terhadap eksploitasi sumber daya laut. Untuk merealisasikan program ini, masyarakat pesisir dengan bantuan LPSTK membentuk kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif (pokmas UEP).

Pembentukan kelompok dilakukan agar penyaluran dana, pertanggungjawaban dan pengembalian dana yang dipinjam dapat dilakukan melalui kelompok. Meskipun demikian, data lapangan menunjukkan bahwa pembentukan kelompok ini kurang efektif, karena masyarakat lebih senang bekerja sendiri, dibanding bekerja secara berkelompok. Pada akhirnya peminjaman dana bergulir dilakukan oleh perorangan, dan kelompok (pokmas UEP) yang telah dibentuk tidak berfungsi lagi. Pembentukan kelompok tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pusat.

Pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh lembaga di tingkat desa yang dibentuk COREMAP yaitu Lembaga Keuangan Mikro

(LKM). Ketua dan pengurus LKM pada dasarnya dipilih langsung oleh masyarakat melalui musyawarah di tingkat desa. LKM merupakan ujung tombak keberhasilan dana bergulir karena mereka yang menentukan anggota masyarakat yang mendapatkan dana, besar kecilnya dana, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam. Pada akhirnya dana bergulir tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program dana bergulir dan perkembangan pendapatan penerima dana bergulir di desa lokasi COREMAP. Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Teknik penelitian kuantitatif dilakukan dengan survei, menggunakan kuesioner dengan pertanyaan terstruktur. Metode kualitatif dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap guna mendukung data kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dilaksanakan dengan wawancara mendalam, pengamatan (*observasi*) dan FGD. FGD dilakukan dengan stakeholder terkait, seperti Ketua LPSTK, Ketua Pokmas, Kepala Desa dan nelayan. Analisis dalam tulisan ini menggunakan tabulasi silang dan deskriptif analisis.

B. Kegiatan *Seed Fund* (Dana Bergulir) di Desa Buki dan Desa Bungaiya

Data hasil survai menunjukkan terdapat 34 rumah tangga (27,9 persen) di Desa Buki dan Bungaiya yang telah menerima dana bergulir dari Coremap. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 25 rumah tangga/orang (73,5 persen) mengaku menerima pinjaman sebanyak 1 kali, 5 rumah tangga (14,7 persen) menerima 2 kali, dan 4 rumah tangga (11,8 persen) menerima pinjaman sebanyak 3 kali. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk usaha ekonomi produktif. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada perorangan bervariasi antara 500 ribu rupiah sampai dengan 3 juta

rupiah/orang. Besaran jumlah pinjaman, tergantung pada jumlah pinjaman yang diajukan calon peminjam, ketersediaan dana dan latar belakang ekonomi peminjam. Berdasarkan pengakuan dan wawancara dengan reponden (peminjam) menyatakan bahwa sebagian besar peminjam, sekitar 75,8 persen telah melunasi dana pinjaman. Sementara peminjam yang baru membayar sebagian sebanyak 21,2 persen dan yang belum mengembalikan sama sekali sebanyak 3 persen. Mereka yang baru mengembalikan sebagian dari dana pinjaman disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengembalikan, karena usahanya macet atau omset dan volume usahanya menurun. Meskipun belum mampu melunasi dana pinjaman, tetapi sebagian besar di antara mereka tetap akan melunasi dana pinjaman tersebut agar tidak menjadi beban di akhir nanti.

Tabel 5.1.
Penerima Dana LKM di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2011

No	Uraian	Jumlah	Persentase	N
1	RT pernah memperoleh dana bergulir dari COREMAP II	34	27,9	122
2	Berapa kali menerima dana bergulir tersebut			
	- 1 kali	25	73,5	34
	- 2 kali	5	14,7	34
	- 3 kali	4	11,8	34
3	Status pengembalian dana bergulir COREMAP I			
	- Sudah lunas	25	75,8	34
	- Sudah mengembalikan sebagian	7	21,2	34
	- Belum mengembalikan	1	3,0	34

Sumber : data primer, survey BME Coremap tahun 2011

Pengelolaan dana bergulir ditingkat desa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang dibentuk oleh LPSTK dan pengurusnya dipilih langsung oleh masyarakat. Hasil pemilihan pengurus LKM di Desa Buki memutuskan untuk memilih Bapak

Usman (pensiunan guru agama di SD) menjadi ketua LKM. Pengurus LKM didampingi oleh 1 sekretaris dan dua orang bendahara, tetapi bendahara yang aktif hanya 1 orang. Selama ini ketua LKM sudah dua kali menerima pelatihan manajemen pengelolaan LKM di DKP kota Benteng. Dana bergulir untuk Desa Buki telah diterima dan dicairkan oleh pengurus LKM sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Dana yang bergulir di masyarakat saat ini masih memanfaatkan dana yang diterima pada tahap pertama, sementara dana tahap kedua masih disimpan di BRI. Pengurus tidak berani mencairkan semua dana bergulir, karena takut adanya resiko kredit macet, seperti yang selama ini sering terjadi. Pengembalian dana bergulir tahap pertama di Desa Buki sebagian besar telah lunas, meskipun ada beberapa peminjam yang belum mampu mengembalikan pinjaman dan tergolong macet, terutama terjadi di Desa Bungaiya.

Pada awalnya, dana bergulir ditujukan untuk dipinjamkan kepada kelompok masyarakat (pokmas), namun dalam prakteknya peminjam bukan kelompok masyarakat, tetapi perorangan. Hal ini disebabkan kebiasaan dan budaya masyarakat yang memiliki kebiasaan bekerja sendiri/mandiri daripada secara berkelompok. Untuk menghindari kredit macet dana bergulir yang dipinjam secara perorangan, pengurus LKM memberi persyaratan, peminjam untuk menyertakan jaminan, dengan mewajibkan menyerahkan tanggungan berupa surat tanah, surat BPKB atau perhiasan emas. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar para peminjam bersedia mengembalikan pinjaman. Pada tahap pertama dana seed fund digulirkan, pengurus LKM mengenakan bunga 1 persen, kemudian pada tahun 2010 bunga pinjaman dinaikkan menjadi 1,5 persen sebulan. Waktu peminjaman dibatasi selama 10 bulan dan dapat diperpanjang apabila para peminjam telah melunasi pinjamannya.

Peminjam harus mengembalikan pinjaman secara bertahap yang terdiri dari cicilan pinjaman pokok dan jasa. Pengembalian dana dilakukan oleh peminjam di rumah bendahara atau pengurus LKM. Namun demikian, jika sampai batas waktu tertentu peminjam belum membayar cicilan maka pengurus akan menagih ke rumah peminjam. Sebagai contoh, seseorang meminjam 1 juta rupiah, maka dia harus menyetor uang pinjaman sebesar 100 ribu per bulan ditambah dengan uang jasa sebesar 15 ribu rupiah. Uang jasa tersebut, sebagian dipergunakan untuk memberi imbalan kepada pengurus LKM dan untuk menambah dana kas LKM.

Saat ini masyarakat Desa Buki yang telah melunasi pinjaman dana bergulir berjumlah sebanyak 25 orang dari jumlah peminjam lebih dari 50 orang. Besar dana yang dipinjam masyarakat di Desa Buki bervariasi tergantung kebutuhan peminjam yaitu antara 1- 2 juta rupiah. Peminjam harus memenuhi beberapa syarat yang diberlakukan pengurus LKM, agar supaya mendapatkan dana bergulir. Beberapa syarat tersebut antara lain, adanya jaminan berupa barang seperti emas dan BPKB motor, tidak boleh memiliki tanggungan pada pinjaman lain, memiliki latar belakang yang baik. Peminjam dapat langsung melakukan permohonan pinjaman dana kepada pengurus LKM atau kepada ketua. Jumlah pinjaman pokok per bulan rata-rata sebesar 30 juta dengan realisasi pengembalian pada bulan Desember 2010 berupa pengembalian dana pokok sebesar 13,7 juta rupiah dan jasa 2,5 juta rupiah.

Permasalahan yang dihadapi peminjam tetap saja terjadi, seperti terjadi kredit/pinjaman macet, meskipun mereka telah menyerahkan barang jaminan. Akan tetapi jumlah pinjaman macet relatif kecil, dan lebih kecil dibanding dengan desa lain di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini disebabkan oleh ketatnya pengurus dalam mengeluarkan dana pinjaman. Jika sudah jatuh waktu untuk mengembalikan pinjaman, dan peminjam belum menyerahkan cicilan

kepada pengurus, maka pengurus akan mendatangi peminjam untuk ditagih secara langsung. Peminjam yang tidak tertib akan diberikan sanksi, antara lain tidak boleh pinjam lagi, apabila belum melunasi pinjamannya. Peminjam yang tidak membayar sampai 3 kali cicilan akan diberi peringatan berupa tanda kuning. Sedangkan peminjam yang menunggak mencicil lebih dari 5 kali, pengurus akan memberikan tanda merah, sebagai tanda bahwa mereka tidak boleh meminjam lagi ke LKM. Dana pinjaman pada umumnya digunakan untuk menambah modal usaha, seperti berdagang, membuat kue, atau untuk kepentingan lain yang mendesak seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan sosial.

Desa Bungaiya

LKM di Desa Bungaiya sampai saat ini masih berjalan sebagaimana biasanya meskipun ada sebagian dana bergulir yang tidak dapat dikembalikan (macet). Pengurus LKM Bungaiya terdiri dari satu orang ketua dibantu satu orang bendahara dan seorang sekretaris. Pengurus LKM mendapat imbalan dari sebagian bunga pinjaman, tetapi nilainya masih sangat kecil, karena uang yang berputar di masyarakat masih sangat sedikit. Pada tahap awal kegiatan LKM, pengurus yang aktif mengurus dana bergulir hanya ketua, sedangkan bendahara dan sekretaris menjadi pengurus pasif dengan alasan dana yang dikelola terlalu kecil. Akan tetapi setelah ada pinjaman/kredit macet, bendahara dan sekretaris menjadi aktif dalam upaya mencegah dana pinjaman yang macet yang lebih besar.

Dana bergulir tahap pertama yang diterima LKM di Bungaiya (November 2008) sebesar 23 juta rupiah dan dana yang diterima pada tahap kedua (November 2010) sebesar 24, 3 juta rupiah. Dana tersebut saat ini telah digulirkan seluruhnya pada masyarakat, meskipun pada tahap pertama dana bergulir pengembaliannya banyak yang macet, karena tidak ada jaminan dari peminjam. Pengurus LKM masih

mengandalkan kepercayaan dan pengetahuan perilaku peminjam, namun ternyata cara tersebut tidak berjalan dan banyak peminjam yang tidak mengembalikan dana pinjamannya.

Dana bergulir sedianya diberikan pada kelompok masyarakat, namun dalam prakteknya dana bergulir diberikan secara perorangan. Tanggung jawab pengembalian dana diberikan pada perorangan dan bukan kelompok. Berdasarkan data dari LKM tahun 2010 jumlah peminjam untuk dana tahap pertama sebanyak 23 orang, masing-masing mendapat 1 juta rupiah. Adapun untuk tahap ke dua jumlah peminjam sebanyak 25 orang. Para peminjam tersebut diwajibkan menyerahkan tanggungan, antara lain berupa surat BPKB, surat pemilikan rumah, dan perhiasan. Mereka yang meminjam antara lain digunakan untuk usaha dagang, usaha rumput laut, usaha pande besi dan usaha ternak sapi. Peminjaman dibatasi maksimal untuk 10 bulan dan dikenakan bunga 2 persen sebulan. Setiap bulan peminjam harus mengembalikan pinjaman pokok ditambah bungainya.

Dana yang digulirkan untuk tahap pertama sebesar 23 juta dengan jumlah pinjaman antara 340 ribu dan 4 juta rupiah. Peminjam dana sebesar 4 juta rupiah ini sebenarnya adalah ketua LKM sendiri. Hal tersebut, karena melihat ada dana menganggur dan belum ada warga yang berkeinginan untuk mendapatkan pinjaman. Agar supaya dana (uang) tidak menganggur, selanjutnya uang tersebut dipinjam oleh ketua LKM. Hingga saat ini dari 23 orang peminjam tahap pertama, sebanyak 6 orang telah meminjam sebanyak 2 kali, dan 1 orang meminjam 3 kali, dan sisanya meminjam 1 kali. Minat masyarakat untuk meminjam dana bergulir tersebut sebenarnya cukup tinggi, tetapi dana yang tersedia jumlahnya sangat terbatas, sehingga tidak semua permintaan dana dapat dipenuhi oleh pengurus LKM. Selain itu, peminjam harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pengurus LKM sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran, terlihat cukup

banyak peminjam yang tidak dapat mengembalikan dana angsuran tersebut. Peminjaman pada tahap pertama terdapat 10 orang yang tidak mampu mengembalikan angsuran, dengan total dana yang tidak kembali mencapai 19 juta rupiah, sedangkan sisanya sebanyak 13 orang telah melunasi angsuran. Meskipun terjadi kredit/pinjaman macet yang jumlahnya cukup besar, pengurus LKM tetap berusaha untuk meminta agar peminjam dapat melunasi hutangnya.

Berdasar data dari LKM dapat diketahui bahwa saat ini terdapat 53 orang yang memanfaatkan dana bergulir Coremap, dengan total dana berjumlah 46,3 juta rupiah. Dengan adanya jaminan barang, diharapkan proses pengembalian dan bergulirnya dana menjadi lebih baik karena masing-masing peminjam memiliki tanggung jawab yang lebih baik. Dana pinjaman Coremap pada umumnya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga terutama untuk modal usaha ekonomi produktif. Pemanfaatan dana bergulir yang terbesar (sekitar 18 orang responden) adalah untuk usaha perdagangan, khususnya perdagangan di pasar dan menyediakan aneka barang kebutuhan sehari-hari. Sementara, sebagian responden yang lain sebanyak 10 orang menggunakan dana pinjaman untuk usaha industri rumah tangga seperti membuat kue dan pengolahan ikan asin. Karena jumlah dana bergulir yang dipinjam relatif terbatas, dana tersebut pada umumnya hanya digunakan untuk melengkapi dana yang sudah tersedia.

• **Jenis dan Perkembangan Usaha**

Jumlah responden rumah tangga yang mendapatkan pinjaman dana bergulir COREMAP sebanyak 19 rumah tangga, dan sebagian besar 68,4 persen peminjam menggunakan dana tersebut untuk usaha perdagangan baik sebagai modal dagang, warung maupun untuk usaha dagang keliling. Peminjam pada umumnya sudah memiliki usaha yang telah berjalan, sehingga dana pinjaman digunakan untuk tambahan

modal usaha. Sebagian peminjam juga menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan perikanan tangkap seperti memperbaiki sarana produksi, modal melaut, dan mesin kapal. Sebagian yang lain (26,3 persen) menggunakan dana untuk membeli atau memperbaiki sarana produksi perikanan tangkap. Sebagian besar peminjam menyatakan bahwa dana pinjaman tersebut cukup bermanfaat bagi mereka, tetapi jumlahnya masih sangat kecil, sehingga sulit untuk meningkatkan pendapatan. Tidak semua ajuan calon peminjam dana dapat dipenuhi oleh LKM, tetapi tergantung pada latar belakang peminjam, ketersediaan dana dan persyaratan lain yang diajukan pengurus. Bangunan-bangunan fisik yang dibangun di Buki dan Bungaiya tampaknya tidak terkait dengan usaha ekonomi produktif masyarakat, sehingga bangunan fisik tersebut tidak dapat mendukung usaha ekonomi produktif secara langsung. Satu-satunya prasarana yang dibangun dan berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat adalah pembangunan pagar pasar desa yang mendukung kegiatan jual beli barang di pasar. Pagar desa dimaksudkan untuk menjaga agar pasar tetap bersih karena tidak ada hewan milik warga yang masuk ke dalam pasar.

Tabel 5.2.
Penggunaan Dana Bergulir Oleh Masyarakat
Di Buki dan Bungaiya Tahun 2011

No	Penggunaan	N	Persentase	Usaha masih jalan (%)
1	Usaha perdagangan (modal dagang, warung, pedagang keliling)	13	68,4	84,6
2	Kegiatan perikanan tangkap (membeli/memperbaiki sarana produksi)	5	26,3	80,0
3	Kegiatan budidaya (rumput laut, kerapu)	1	5,3	100,0
Total		19	100,0	

Sumber : Data primer, survey BME Coremap tahun 2011

Tidak semua usaha yang dijalankan masyarakat dapat berjalan lancar sebagaimana diharapkan, karena berbagai kendala yang dihadapi, termasuk persaingan dengan pedagang lain dan keterbatasan jumlah pembeli di tingkat desa. Meskipun demikian, lebih dari 80 persen usaha yang dijalankan masyarakat dapat berjalan dengan baik, sampai saat penelitian ini dilakukan. Usaha-usaha tersebut merupakan usaha skala kecil yang perkembangannya relatif lambat. Ibu Rukiyah merupakan salah satu peminjam di LKM Desa Buki dan telah meminjam selama 3 kali. Besar jasa yang harus dibayar pada periode pertama sebesar 1 persen, sedangkan pada tahap 2 dan 3 sebesar 1,5 persen. Pinjaman tahap pertama digunakan untuk berjualan sembako dan berjalan hingga beberapa tahun. Namun demikian sekarang usaha sembako sudah berhenti, karena lokasi pasar yang semula di depan rumah pindah di dekat kantor kecamatan. Oleh sebab itu, saat ini Ibu Rukiyah hanya berdagang ikan ke kota Benteng. Biaya transportasi ke Benteng sebesar 10 ribu rupiah PP dengan penghasilan rata-rata 100 ribu.sekali ke pasar. Ikan yang dibawa ke pasar merupakan ikan hasil tangkapan anak sendiri dan titipan tetangga. Orang yang menitipkan ikan akan memberikan uang jasa sebesar 15 ribu setiap hasil penjualan 100 ribu rupiah. Ia berangkat ke pasar sekitar jam 7.00 dan pulang pada jam 13.00 waktu setempat. Ikan yang didapat pada sore hari akan dimasukkan ke kulkas untuk dijual pada pagi harinya. Selain biaya transportasi, pedagang juga membayar iuran pasar yang besarnya 100 rupiah/hari.

C. Kegiatan *Seed Fund* di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Pasimasunggu Timur

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokasi desa-desa COREMAP, COREMAP memberikan bantuan berupa dana bergulir. Dana yang berasal dari COREMAP sebenarnya merupakan dana hibah

yang pengelolaannya diserahkan kepada LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang ada di setiap desa COREMAP. Namun demikian, dana hibah tersebut oleh LKM kemudian digulirkan di antara masyarakat yang membutuhkan. LKM di Desa Bontobulaeng dan Desa Bontobaru dibentuk oleh LPSTK melalui rapat yang dilakukan oleh LPSTK. Pengurus LKM bukan hanya dipilih oleh anggota Pokmas, melainkan dipilih oleh masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Susunan pengurus LKM di dua desa tersebut terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara. Oleh karena LKM itu dibentuk oleh LPSTK, maka pertanggungjawaban dana *seed fund* langsung kepada ketua LPSTK.

Di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru *seed fund* telah turun dua kali masing-masing sebesar Rp 25 juta untuk setiap desa. Sehingga jumlah dana *seed fund* yang sudah turun di setiap desa sebesar Rp 50 juta. Di desa Bontobaru dana *seed fund* telah turun pada tahun 2008 dan 2010. Sementara itu, dana *seed fund* tahap satu desa Bontobulaeng turun agak belakangan, karena keterlambatan mengajukan proposal, yaitu tahun 2009. Sedangkan dana tahap dua turun pada tahun 2010. Karena itu, pada tahun 2008 di Desa Bontobulaeng tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan simpan pinjam.

Di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, dana “simpan pinjam” yang sudah diterima oleh LKM (Lembaga Keuangan Mikro) itu selanjutnya digulirkan kepada anggota pokmas yang membutuhkan. Di Desa Bonto Baru, jumlah pinjaman maksimum pada tahun 2009 sebesar Rp 1 juta, dan pada tahun 2010 maksimum sebesar 4 juta rupiah. Untuk menggulirkan dana *seed fund* terlebih dulu diadakan rapat warga, untuk menentukan mekanisme peminjaman dan besarnya bunga yang dibebankan kepada peminjam, serta biaya honor pengelola. Di Desa Bontobulaeng maupun Bontobaru, hasil kesepakatan masyarakat, bahwa dana *seed fund* boleh dipinjamkan untuk semua masyarakat, dengan catatan bahwa pemanfaatan dana

untuk kegiatan yang bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usaha, atau untuk membeli alat tangkap perikanan. Oleh karena itu jika ada masyarakat (warga) yang ingin meminjam untuk keperluan yang bersifat konsumtif, seperti membeli TV, maka tidak akan diberi pinjaman.

Berdasarkan kesepakatan dengan para anggota Pokmas, baik di Desa Bontobulaeng maupun Bontobaru, ditentukan bahwa setiap peminjam harus memberikan jaminan, antara lain berupa emas, sertifikat tanah atau barang lainnya. Jaminan tersebut tidak diserahkan ke pengurus LKM, tetapi tetap disimpan oleh peminjam. Namun demikian, jika sewaktu-waktu peminjam tidak bisa membayar hutangnya, maka barang yang dijaminkan itu harus diserahkan kepada LKM. Menurut informasi narasumber, jaminan terbanyak pada umumnya berupa emas.

Aturan pengembalian yang disepakati di dua desa tersebut juga sama, yaitu pinjaman pada tahap pertama harus dibayar lunas dalam waktu 10 bulan, dengan bunga pinjaman sebesar 2,5 persen per bulan, dan dihitung secara menurun. Dengan demikian, jika seorang anggota pokmas meminjam uang sebesar Rp 1 juta, maka setiap bulan harus mengangsur Rp 100 ribu, ditambah dengan bunganya. Karena bunga yang dibebankan adalah bunga berdasarkan sisa pinjaman. Sebagai contoh, apabila pada angsuran pertama bunga yang harus dibayar sebesar Rp 25 ribu, maka pada angsuran bulan berikutnya bunganya akan berkurang Rp 2.500,- per bulan.

Pada tahap dua mekanisme pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan secara berbeda. Di dua desa ini, aturan pengembalian pinjaman pada tahap dua juga harus dibayar lunas dalam waktu 10 bulan, tetapi dengan bunga pinjaman sebesar 1,5 persen per bulan. Perbedaan yang lain adalah jika pada tahap satu bunga dihitung secara menurun, maka pada tahap dua bunga dihitung

secara flat. Jadi jika seorang anggota pokmas meminjam uang Rp 1 juta, maka setiap bulannya harus mengangsur Rp 100 ribu, ditambah dengan bunganya 15 ribu, sehingga seorang peminjam harus membayar setiap bulan sebesar Rp adalah 115 ribu selama 10 bulan. Perubahan suku bunga dari menurun menjadi flat itu dilakukan untuk mempermudah perhitungan, karena dengan sistem bunga menurun dianggap merepotkan.

Suku bunga yang masuk itu dihitung sebagai keuntungan LKM, yang kemudian dibagi untuk berbagai kepentingan. Pada tahap satu yang bunganya sebesar 2,5 persen, pembagiannya adalah sebagai berikut :

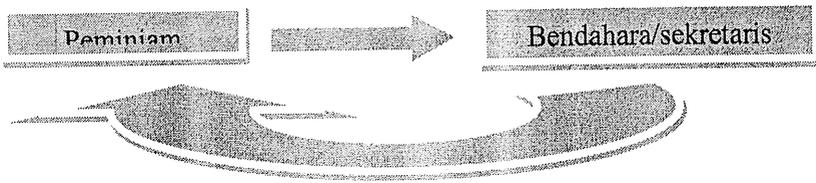
- 1% untuk tambahan modal
- 1% untuk honor pengurus
- 0,5% untuk administrasi

Adapun pada tahap dua dengan bunga 1,5 persen pembagiannya adalah sebagai berikut :

- 0,75% untuk pengurus
- 0,75% untuk tambahan modal

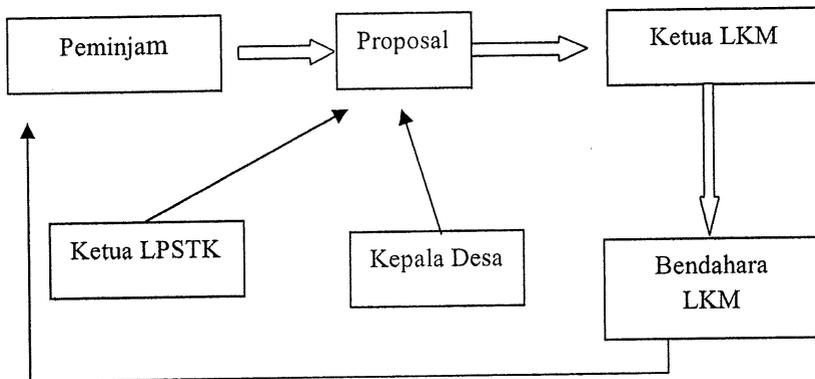
Kegiatan simpan pinjam di desa Bontobaru pada umumnya digunakan untuk membeli alat tangkap (jaring) dan kegiatan produktif yang berkaitan dengan kenelayanan. Karena jumlah dana yang terbatas, maka tidak semua anggota pokmas bisa memperoleh pinjaman. Mekanisme peminjaman di Desa Bontobaru adalah sebagai berikut. Pertama kali peminjam menghubungi bendahara LKM atau sekretaris LKM, untuk mengajukan peminjaman. Oleh bendahara/sekretaris peminjam disuruh mengisi formulir peminjaman dan formulir kesediaan memberikan jaminan. Apabila disetujui maka uang pinjaman segera dicairkan.

Gambar 5.1.
Mekanisme Peminjaman Dana *Seed Fund* Di Desa Bontobaru



Sedangkan di Desa Bontobulaeng, pengajuan pinjaman dilakukan dengan meminta formulir ke ketua LKM, dan setelah diisi harus mendapatkan persetujuan dari kepala LPSTK dan Kepala Desa. Formulir yang sudah disetujui tersebut, selanjutnya diserahkan kembali kepada ketua LKM, kemudian ketua LKM memerintahkan bendahara untuk mencairkannya.

Gambar 5.2.
Mekanisme Peminjaman Dana *Seed Fund* di Desa Bontobulaeng



Hasil survai menunjukkan terdapat 30 rumah tangga (23,3 persen) di dua desa di Pasimasunggu Timur (Desa Bontobulaeng dan Bontobaru) telah menerima dana bergulir dari COREMAP. Dari jumlah tersebut sebanyak 19 orang (63,3 persen) mengaku menerima

pinjaman 1 kali, 6 rumah tangga (20 persen) menerima 2 kali, dan 5 rumah tangga (16,7 persen) menerima pinjaman sebanyak 3 kali. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan, terutama untuk usaha ekonomi produktif. Jumlah dana yang dipinjam anggota pokmas bervariasi antara Rp 500 ribu sampai dengan Rp 3 juta per orang. Besaran jumlah pinjaman tersebut tergantung dari jumlah dana yang diajukan, ketersediaan dana dan latar belakang peminjam. Berdasarkan pengakuan responden dapat diketahui bahwa sebagian besar dari mereka (80 persen) telah melunasi dana/uang pinjaman, sedangkan sisanya sebesar 20 persen baru membayar sebagian. Jadi tidak ada rumah tangga yang sudah memperoleh pinjaman yang belum mengembalikan sama sekali. Bagi mereka yang mengaku baru membayar sebagian, umumnya tetap ingin melunasi dana pinjaman tersebut.

Tabel 5.3.
Penerima Dana LKM di Pasimasunggu Timur, Tahun 2011

No	Uraian	Jumlah	Persentase	N
1	RT pernah memperoleh dana bergulir dari COREMAP II	30	23,3	129
2	Berapa kali menerima dana bergulir tersebut			
	- 1 kali	19	63,3	30
	- 2 kali	6	20,0	30
	- 3 kali	5	16,7	30
3	Status pengembalian dana bergulir COREMAP I			
	- Sudah lunas	24	80,0	30
	- Sudah mengembalikan sebagian	6	20,0	30

Sumber : data primer, survey BME Coremap tahun 2011

Meskipun jumlah peminjam semuanya 30 rumah tangga, tetapi karena satu orang ada yang meminjam lebih dari satu kali, maka jumlah seluruh peminjaman sebanyak 41 kali, yang terdiri

peminjaman *seed fund* tahap pertama sebanyak 30 kali, dan tahap kedua sebanyak 11 kali. Sedikitnya frekwensi penerima dana bergulir COREMAP II disebabkan ada 1 orang yang menerima dana bergulir dengan jumlah yang sangat besar, sebesar Rp 10.000.000,-.

- **Jenis dan perkembangan usaha**

Dilihat dari pemanfaatan pinjaman dana bergulir, persentase terbesar digunakan untuk usaha perdagangan, sebanyak 29 orang atau 79,3persen. Pemanfaatan pinjaman dana bergulir untuk kegiatan perikanan tangkap sebesar 18,2 persen atau empat orang. Selain itu, pemanfaatan pinjaman dana bergulir untuk kegiatan ekonomi lain adalah untuk usaha peternakan, sebanyak satu orang (4,8 persen). Adapun untuk pemanfaatan yang bersifat non ekonomi, pada umumnya digunakan untuk biaya pendidikan dan konsumsi rumah tangga, masing-masing satu orang peminjam atau 4,8 persen.

Tabel 5.4
Persentase Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir menurut Pemanfaatannya

No	Pemanfaatan Dana Bergulir	Jumlah	Persentase	N
A Kegiatan ekonomi :				
1	Usaha Perdagangan	23	79,3	29
2	Kegiatan perikanan tangkap	4	18,2	22
3	Kegiatan Budidaya (rumput laut,kerapu,dll)	-	0,0	21
4	Peternakan dan pertanian	1	4,8	21
B Kegiatan Non Ekonomi :				
1	Biaya pendidikan	1	4,8	21
2	Perbaikan rumah	-	0,0	21
3	Konsumsi rumah tangga	1	4,8	21

Sumber : Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Peminjaman dana bergulir untuk kegiatan ekonomi, untuk usaha perdagangan, yang usahanya masih berjalan jumlahnya cukup besar mencapai 91,3 persen. Sementara itu, peminjaman dana bergulir untuk usaha perikanan tangkap, semuanya usahanya masih berjalan, yaitu sebesar 100%. Kegiatan budidaya saat ini (2011) tidak ada di Pasimasunggu Timur, sehingga tidak ada usaha budidaya perikanan (tambak) yang masih berjalan. Adapun peminjaman dana bergulir yang digunakan untuk kegiatan peternakan satu orang, dan kegiatan usahanya masih berjalan.

Tabel 5.5.
Persentase Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir menurut Pemanfaatannya

No	Jenis usaha yang masih jalan	Jumlah	Persentase	N
1	Usaha perdagangan	21	91,3	23
2	Kegiatan perikanan tangkap masih berjalan	4	100,0	4
3	Peternakan	1	100,0	1

Sumber : Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Bagi para peminjam dana bergulir yang usahanya masih berjalan, sebagian besar mengaku bahwa jenis dan komoditi usahanya tidak bertambah atau tetap. Jumlah mereka yang mengaku komoditi usahanya tidak bertambah sebanyak 28 orang atau 71,4 persen. Memang ada yang mengakui, bahwa dengan meminjam dana bergulir tersebut, jenis dan komoditi usahanya menjadi bertambah, namun jumlahnya tidak banyak, sebanyak 8 orang atau 28,6 persen.

Dilihat pada hasil usaha bagi masyarakat yang sudah menerima pinjaman *seed fund*, sebagian besar para peminjam mengaku, bahwa hasil usahanya tidak meningkat atau sama saja jika dibanding sebelum menerima dana pinjaman. Jumlah mereka yang menyatakan hal tersebut sebanyak 18 orang atau 64,3 persen Sedangkan yang mengaku hasil usahanya meningkat setelah menerima dana pinjaman *seed fund* sebanyak 10 orang atau 35,7 persen.

Tabel 5.6.
Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana bergulir menurut
Perkembangan Usaha, di Lokasi Pasimasunggu Timur,
Kabupaten Selayar

No	Perkembangan Usaha	Jumlah	Persen
1	Jenis dan komoditi usaha bertambah	8	28,6
2	Jenis dan komoditi usaha tetap	20	71,4
Total		28	100,0

Sumber : Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Tabel 5.7
Distribusi Rumah Tangga Penerima Dana Bergulir menurut
Perkembangan Hasil Usaha, di Lokasi Pasimasunggu Timur
Kabupaten Selayar

No	Hasil Usaha	Jumlah	Persentase
1	Meningkat	10	35,7
2	Sama saja	18	64,3
3	Menurun	-	-
Total		28	100,0

Sumber : Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Sebagian responden yang sudah menerima dana *seed fund* mengakui, bahwa tidak ada perkembangan hasil usaha dari dana pinjaman tersebut, karena nilai pinjaman yang relatif kecil, yaitu sebesar Rp 1 juta. Sehingga dana pinjaman tersebut tidak bisa digunakan untuk meningkatkan usaha, melainkan hanya untuk menambah modal dan memperlancar usaha. Keberadaan dana *village grant* juga tidak berpengaruh dalam perkembangan usaha. Hal itu karena tidak ada dana *village grant* yang digunakan untuk memperbaiki sarana ekonomi desa.

Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di atas, terdapat beberapa responden sekitar 35,7 persen yang hasil usahanya

mengalami peningkatan. Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan narasumber, antara lain kepala desa dan pengurus LPSTK, menyatakan bahwa peningkatan hasil usaha itu tidak karena pinjaman dana *seed fund*, tetapi karena mendapatkan bantuan pinjaman dari sumber yang lain, seperti PNPM Mandiri atau BPR Pesisir Tanadoang.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2009 di Kecamatan Pasimasunggu Timur terdapat program PNPM Mandiri yang jumlahnya cukup besar, yaitu Rp 720 juta untuk kegiatan pembangunan fisik dan Rp 180 juta untuk kegiatan simpan pinjam. Dana tersebut dapat dimanfaatkan dan dipinjam oleh masyarakat secara berkelompok, dengan cara mengajukan proposal. Di Desa Bontobaru, jumlah dana simpan pinjam yang diserap masyarakat sebesar Rp 77 juta. Adapun pada tahun 2010 jumlah dana PNPM-Mandiri simpan pinjam yang dimanfaatkan dan dipinjam masyarakat (kelompok) sebesar Rp 43.500.000,-. Sementara itu, di Desa Bontobulaeng, jumlah dana simpan pinjam PNPM –Mandiri pada tahun 2009 yang dipinjam masyarakat sebanyak Rp 26.500.000,-, dan tahun 2010 sebesar 18 juta.

Dana simpan pinjam melalui program PNPM-Mandiri tersebut, setiap rumah tangga dapat meminjam sampai dengan sebesar Rp 5 juta, dengan jangka waktu angsuran 12 bulan, dengan bunga 1 persen, lebih rendah dibanding bunga pinjaman dari *seed fund*, sebesar 1,5 persen. Dengan nilai pinjaman yang lebih besar dibanding pinjaman dari *seed fund*, menurut beberapa warga, dana PNPM itu lebih bermanfaat untuk dapat meningkatkan usaha.

Selain dana bantuan dari PNPM Mandiri, sejak tahun 2010 di Pasimasunggu Timur juga terdapat Badan Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga masyarakat memiliki akses untuk meminjam dana dari lembaga keuangan. Bunga yang ditetapkan oleh BPR tersebut

memang lebih tinggi dibanding bunga pinjaman *seed fund* maupun PNPM-Mandiri, tetapi nilai pinjamannya lebih besar, bisa mencapai 50 juta. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang memiliki usaha yang perputaran uangnya cukup tinggi, seperti pemilik warung yang menjual kebutuhan sehari-hari dan bahan bakar, mereka lebih suka meminjam dari BPR, karena dengan nilai pinjaman yang tinggi mereka bisa memiliki peluang untuk meningkatkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

D. Perkembangan Pendapatan Penerima *Seed Fund*

Dana *seed fund* yang dikelola oleh LKM pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh program penyelamatan terumbu karang untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi COREMAP. Peningkatan pendapatan tersebut dapat terjadi dengan memanfaatkan dana *seed fund* untuk kegiatan yang produktif termasuk menciptakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat. Untuk dapat memanfaatkan dana tersebut, masyarakat perlu membuat kelompok yang terdiri dari beberapa rumah tangga. Namun demikian pada akhirnya peminjaman dana ke LKM dilakukan secara perseorangan. Kelompok yang terbentuk pada awal pendirian COREMAP hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Pada tahun 2009, pendapatan rumah tangga di Buki dan Bungaiya yang memperoleh dana pinjaman bergulir bervariasi dari pendapatan rendah hingga tinggi. Secara umum rata-rata pendapatan rumah tangga yang mendapat dana bergulir lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan dana bergulir. Pendapatan perkapita dari anggota pokmas sekitar 237.054 rupiah, sementara rata-rata pendapatan rumah tangga mencapai 914 ribu rupiah. Dibandingkan dengan pendapatan seluruh penduduk, pendapatan perkapita anggota

pokmas hampir sama dengan pendapatan perkapita penduduk yang tidak menjadi anggota pokmas.

Tabel 5.8.
Statistik Pendapatan Anggota Pokmas di Desa Buki dan Bungaiya,
Tahun 2009 dan 2011

No	Pendapatan	2009	2011	Perkembangan (%)
1	Perkapita	237.054	289.45	11,1
2	Rata-rata	914.503	1.085.481	9,3
3	Median	533.333	841.667	28,9
4	Minimum	100.000	112.500	6,3
5	Maximum	2.300.000	2.700.000	8,7
N		27	34	

Sumber: Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009.

Tingkat pendapatan rumah tangga yang menjadi anggota pokmas bervariasi dari terendah (100 ribu rupiah) sampai dengan tertinggi (2,3 juta rupiah). Variasi yang hampir sama terdapat pada pendapatan penduduk yang tidak mendapat dana bergulir. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam penyaluran pinjaman dana LKM yang tidak membedakan penduduk menurut tingkat pendapatan. Semua kalangan berpenghasilan tinggi sampai rendah dapat meminjam dana asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian sebagian besar anggota pokmas berasal dari kalangan ekonomi lemah yang membutuhkan dukungan dana untuk peningkatan taraf hidup mereka. Usaha ekonomi produktif yang diusahakan bervariasi mulai dari perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa. Sampai saat ini pengembalian dana bergulir masih cukup lancar, karena peminjam harus menyerahkan agunan sebagai jaminan seperti surat/ barang berharga.

Di desa Bontobaru dana *seed fund* telah turun pada tahun 2008 dan 2010. Akan tetapi, oleh karena pada saat dilakukan survei pada tahun 2008 itu dana baru diterima oleh LKM, dan baru ada beberapa yang disalurkan, maka data pendapatan dari penerima pinjaman *seed fund* belum ada. Begitu pula di Bontobulaeng, karena *seed fund* tahap I di Desa Botobulaeng justru baru turun tahun 2009, karena pengajuannya yang terlambat, maka data pendapatan penerima pinjaman *seed fund* tahun 2008 juga belum ada.

Tabel 5.9.
Pendapatan Penerima *Seed Fund* Tahun 2011 (N30)

Statistik	Pendapatan Rumah Tangga (Rp)	Pendapatan Per Kapita Rumah Tangga (Rp)
Mean	1.256.163,89	378.755,98
Median	858.333,33	230.238,095
Minimum	166.666,67	33.333,33
Maksimum	5.566.666,67	1.855.555,56

Sumber : Data Primer, BME Sosial-Ekonomi COREMAP, 2011

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei pada tahun 2011, diketahui bahwa dari jumlah penerima *seed fund* sebanyak 30 orang di dua desa (Bontobulaeng dan Bontobaru), nilai rata-rata pendapatan mereka adalah Rp 1.256.163,-. Adapun pendapatan minimum sebesar Rp 166.666,- dan pendapatan maksimum sebesar Rp 5.566.666,-. Sedangkan nilai rata-rata pendapatan per kapita rumah tangga penerima *seed fund* sebesar Rp 378.755,-. Pendapatan per kapita rumah tangga penerima *seed fund* minimum sebesar Rp 33.333,- dan pendapatan per kapita rumah tangga penerima *seed fund* maksimum sebesar Rp 1.855.555,-. Dengan tingkat pendapatan yang sebesar itu, oleh karena tidak diketahui jumlah pendapatan mereka pada tahun 2008, maka tidak bisa diketahui apakah pendapatan penerima *seed fund* pada tahun 2011 itu meningkat atau menurun.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pada umumnya penerima dana *seed fund* itu tidak mengalami peningkatan pendapatan. Hal itu

karena jumlah dana pinjaman yang kecil, sehingga hanya bisa digunakan untuk melancarkan usaha, tetapi tidak bisa untuk meningkatkan usaha. Memang ada penerima *seed fund* yang mengaku pendapatannya meningkat dalam dua tahun terakhir, namun itu bukan karena pinjaman *seed fund*, tetapi karena bantuan dari pihak lain, seperti dari PNPM, atau pinjaman dari BPR, yang nilainya lebih besar, sehingga bisa untuk meningkatkan usaha mereka.

Peningkatan pendapatan juga karena adanya bantuan mesin ketinting dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dimulai pada tahun 2008. Dengan adanya bantuan mesin ketinting, maka mereka yang sebelumnya memancing ikan dengan menggunakan perahu dayung, mereka bisa melakukan penangkapan ikan lebih jauh sehingga hasil tangkapannya bisa lebih banyak.

E. Penutup

Dana bergulir (*seed fund*) di lokasi Coremap bertujuan untuk membantu masyarakat agar supaya dapat meningkatkan pendapatan, dan menambah modal untuk usaha alternatif yang diharapkan dapat mengurangi masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya laut. Pemberian dana bergulir di setiap desa diberikan dalam dua tahap masing-masing sebesar Rp. 25 juta rupiah. Dana bergulir selain dipinjamkan pada anggota Pokmas, juga perorangan yang membutuhkan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pengelola (LKM). Adapun jumlah orang yang meminjam masing-masing desa rata-rata sebanyak 25 orang, dengan besar pinjaman berkisar Rp. 500, - ribu rupiah samapai dengan Rp. 4 juta dengan waktu pengembalian 10 bulan bunga sebesar 1,5 persen. Pengembalian dana bergulir oleh para peminjam saat ini berlangsung lancar, sebagian besar telah melunasi, hanya terdapat beberapa orang meminjam yang belum mampu melunasi, tetapi tetap akan melunasi pinjaman tersebut.

Pemanfaatan dana bergulir oleh peminjam pada umumnya digunakan untuk menambah modal usaha perdagangan (warung), membeli peralatan perikanan tangkap, dan kegiatan ekonomi lain, seperti usaha menjahit dan usaha peternakan, serta industri rumah tangga (pembuatan kue). Berdasarkan data mereka menyatakan, meskipun mendapatkan dana bergulir, mengakui, bahwa tidak ada perkembangan hasil usaha dari dana pinjaman tersebut, karena nilai pinjaman yang relatif kecil, yaitu sebesar Rp 1 juta. Sehingga dana pinjaman tersebut tidak bisa digunakan untuk meningkatkan usaha, melainkan hanya untuk menambah modal dan memperlancar usaha. Sedangkan sebagian juga mengakui dengan adanya dana bergulir tersebut, tidak berpengaruh dengan perkembangan usaha, hanya sebagian kecil yang menyatakan bahwa usahanya meningkat.

Secara umum rata-rata pendapatan rumah tangga yang mendapat dana bergulir lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan dana bergulir. Di Desa Buki dan Bungaiya pendapatan perkapita penerima dana bergulir anggota pokmas sekitar Rp. 237.054 rupiah, sementara rata-rata pendapatan rumah tangga mencapai Rp. 914 ribu rupiah. Sementara itu, di kawasan Pasimasunggu Timur (Desa Bontobulaeng dan Bontobaru) pendapatan per kapita penerima *seed fund* sebesar Rp 378.755,-, sementara pendapatan rumah tangga mencapai sekitar Rp 1.256.163,-.

Meskipun dana bergulir jumlahnya relatif kecil, tetapi masih sangat diperlukan masyarakat untuk menambah modal usaha dan menciptakan mata pencaharian alternatif dengan tujuan meningkatkan pendapatan, memanfaatkan sumber daya lokal. Pentingnya dana bergulir dari COREMAP, masyarakat masih membutuhkan bantuan modal usaha seperti yang berasal dana simpan pinjam dari PNPM Mandiri dan dana pinjaman dana segar dari perbankan seperti BPR, sehingga dapat meningkatkan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono, Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo, 2006. *Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang di Kabupaten Selayar*, Jakarta, P2O- LIPI.
- Bandiyono, Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo. 2008. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II : Kasus Kabupaten Selayar*. Jakarta, LIPI Press.
- BPS Kabupaten Selayar 2005. *Kabupaten Selayar Dalam Angka 2004 dan 2005*, Selayar, Kerjasama Bainstada dengan BPS.
- CRITC-COREMAP-LIPI. 2007. *Monitoring Ekologi Selayar*. Jakarta . COREMAP LIPI
- CRITC-COREMAP II Kabupaten Kepulauan Selayar. 2010. Laporan Survey Kondisi Ekosistem Terumbu Karang (*Reef Health Monitoring*). Selayar CRITC Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Imron, Masyhuri (ed) 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Masyhuri, 1999. Ekonomi Nelayan dan Kemiskinan Struktural dalam Masyhuri (ed) : *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi : telaahan terhadap sebuah Pendekatan*. Jakarta, Puslitbang Ekonomi Pembangunan LIPI.
- Mubyarto, et. Al, 1984. *Nelayan dan Kemiskinan : Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai*. Jakarta. Rajawali.
- Nugroho, Heru, 1995, Kemiskinan, ketimpangan dan Pemberdayaan dalam Awan Setya Dewanta, dkk, (ed) : *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media.
- Zulfikar, Muh, dkk. 2002. *Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan di Kepulauan Sinjai*. Jakarta, COREMAP – LIPI.

Oleh : Suko Bandiyono dan Masyuri Imron .

A. Pengantar

Untuk mendukung pengelolaan sumberdaya terumbu karang yang berbasis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu pemberian *village grant* di dan program lainnya (*public awareness*, pengawasan) di tiap desa COREMAP II. *Village grant* adalah dana stimulan COREMAP II yang diberikan untuk berbagai keperluan desa terutama untuk pembangunan prasarana fisik dengan satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu dilakukan dengan asumsi bahwa pemberian bantuan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa khususnya program COREMAP II dan lebih lanjut dapat mempunyai dampak positif untuk mengurangi tekanan terhadap sumberdaya terumbu karang . Kegiatan *village grant* dan program lainnya tentunya terkait dengan adanya RPTK yang ada di masing-masing desa COREMAP dan program dari DKP di tingkat kabupaten.

Selain itu dalam program COREMAP II juga menekankan adanya pengawasan sumberdaya laut terutama keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang telah ditetapkan di masing-masing desa COREMAP. Penetapan tersebut berdasarkan rekomendasi hasil musyawarah desa dan telah ditindaklanjuti dengan hasil survei

tentang kondisi terumbu karang oleh CRITC Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengawasan sumberdaya laut untuk tingkat kabupaten dan tingkat desa tidak lepas dari UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut pemerintah provinsi berwenang sampai jarak 12 mil dan khusus untuk kabupaten kewenangannya antara 4-12 mil laut (jalur2) dan khusus tentang desa kewenangannya maksimal hanya 4 mil laut (jalur 1). Adapun wilayah laut di atas 12 mil (jalur 3) adalah kewenangan pemerintah pusat.

Dalam praktik, pengawasan penggunaan alat tangkap di jalur satu dan jalur dua sulit dilakukan oleh Pemda Tk II Kabupaten Kepulauan Selayar karena tidak adanya batas yang jelas di laut yang memisahkan antar jalur. Karena itu pelanggaran ketentuan jalur penangkapan ikan sulit dideteksi, kecuali pelanggaran itu sudah masuk lebih dalam ke jalur satu Selanjutnya dalam UU Perikanan No.31, Th.2004 pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumberdaya laut lingkungannya. Adapun dalam pasal 13 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan (LIPI-COREMAP. 2008: 25-27).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji manfaat prasarana fisik yang dibangun oleh COREMAP. Data yang digunakan untuk analisis bersumber dari penelitian tahun 2011 yang dikumpulkan melalui beberapa metode yaitu : (1) observasi ; (2) wawancara mendalam; (3) survei; dan (4) pengumpulan data sekunder. Penelitian tahun 2011 ini telah menggunakan metode survei dengan responden yang sama dengan responden pada saat survei tahun 2009. Manakala responden telah meninggal dunia atau telah pindah desa sebagai pengganti adalah penghuni rumah atau tetangga terdekat. Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif yaitu dengan pembuatan tabel sederhana, tabel silang maupun grafik dan diagram batang. Penentuan

manfaat village grant dan program lainnya dikelompokkan dalam 3 variabel utama yaitu (a) manfaat pembangunan sarana fisik dan lingkungan desa, (b) manfaat PA, (c) manfaat kegiatan pengawasan laut. Penilaian persentase kemanfaatan bagi masyarakat dilakukan dengan langkah sebagai berikut : (1) menggabungkan jumlah score sub variabel dari 3 variabel utama (X1); (2) menentukan jumlah sub variabel dari variabel utama (n); (3) membagi jumlah score sub variabel dari variabel utama dengan jumlah sub variabel ($X1/n$), (4) mengelompokkan hasil hitungan pada langkah 3 tersebut menjadi dua kategori yaitu : $<2,4$ = tidak bermanfaat; $>=2,5$ = bermanfaat.

B. Village Grant

Berikut ini akan disampaikan tentang pelaksanaan *village grant*, program lainnya dan persepsi tentang prasarana COREMAP tiap jenis kegiatan di masing-masing desa penelitian baik di kawasan daratan maupun di kawasan pulau. Dengan melakukan deskripsi dapat diketahui bagaimana implementasi COREMAP II, kendala dan persepsi masyarakat.

- **Desa Buki**

Penentuan jenis *village grant* di Desa Buki didasarkan musyawarah pada saat pembuatan RPTK (2006) yang menampung usulan dari masyarakat. Usulan masyarakat pemanfaatan dana *village grant* adalah untuk pembuatan joloro, WC keluarga dan perbaikan masjid. Selama dua tahun kegiatan COREMAP II di Desa Buki berjalan sangat lambat terutama karena tersendatnya turunnya dana program. Pada saat itu masyarakat dan pengurus desa bahkan mulai melupakan COREMAP II. Hal ini telah mempengaruhi semangat para pengurus COREMAP II di tingkat desa. Pada saat itu kurangnya

kegiatan telah dimanfaatkan oleh petugas FD untuk melanjutkan kuliah di Makassar.

Kegiatan mulai terjadi setelah turunnya dana *village grant* sebesar 50 juta rupiah dan *seed fund* tahap pertama sebesar 25 juta rupiah yang turun pada semester pertama tahun 2008. Pada tahun 2008, saat kegiatan implementasi COREMAP II berjalan Ketua LPSTK telah pengundurkan diri dan telah diganti dengan Ketua LPSTK yang baru. Pada tahun 2009 terjadi pergantian FD dan pada tahun 2010 jabatan FD dihentikan sementara, menunggu kebijakan baru yang akan ditentukan pada tahun 2011. Pergantian tersebut telah mempengaruhi kinerja kegiatan COREMAP II di Desa Buki yang cenderung mengalami kelesuan.

Joloro

Pemanfaatan dana *village grant* yang berkaitan langsung dengan penyelamatan terumbu karang adalah pembuatan joloro. Joloro adalah kapal atau perahu yang akan digunakan untuk pengawasan keberadaan DPL. Pada bulan Mei-Juni 2008 telah dibuat joloro "COREMAP II" yang dikerjakan oleh tukang perahu di desa Buki dan dikoordinir oleh ketua Pokmaswas. Joloro yang dibuat cukup besar dengan ukuran 9 x 2 m dan dilengkapi dengan mesin dalam. Setelah joloro dapat diselesaikan kurang lebih selama tiga bulan kemudian telah dimanfaatkan oleh Ketua Pokmaswas selain untuk pengawasan DPL juga untuk "kegiatan lain". Kegiatan lain oleh Ketua Pokmaswas tersebut nampaknya tidak disetujui oleh Kepala Desa Buki. Joloro pun sementara diambil alih pengelolaannya oleh Kepala Desa Buki.

Setelah joloro diserahkan ke desa, ternyata desa juga tidak mampu untuk mengelola joloro tersebut. Sementara itu nelayan Desa Buki enggan menggunakan joloro tersebut mengingat mereka adalah

nelayan tradisional yang biasa bekerja sendiri dan hanya melaut sekitar 3 jam baik pagi atau sore hari. Mereka tidak pernah bekerja sebagai nelayan, tangkap secara berkelompok padahal untuk mengoperasikan joloro perlu dana cukup besar sehingga perlu kerja kelompok. Joloro akhirnya dikembalikan lagi ketua Pokmaswas. Karena joloro masih layak dipakai, kemudian oleh Pokmaswas dipijamkan kepada beberapa nelayan di desa tetangga dengan perjanjian harus membayar sejumlah uang. Dalam kenyataan nelayan yang meminjam tidak pernah memberi imbalan uang bahkan kondisi fisik dan mesin joloro mengalami kerusakan.

Karena joloro rusak kemudian ditarik kembali ke Desa Buki. Ketua LPSTK yang baru kemudian mengambil inisiatif untuk memperbaiki baik fisik dan mesin joloro. Setelah joloro layak untuk digunakan kembali Ketua LPSTK mengambil kebijakan bahwa joloro boleh dimanfaatkan. Pada tahun 2010 joloro dipinjam oleh seorang nelayan tangkap asal Desa Buki, namun awal tahun 2011 joloro dikembalikan ke LPSTK dalam kondisi yang fisiknya (body) telah ada yang bocor, meskipun telah dicat ulang dan kondisi mesin masih dapat digunakan. Untuk mencegah kerusakan lebih parah kemudian joloro ditarik ke darat dan diletakkan di kebun kelapa sambil menunggu perbaikan kembali.

WC Keluarga

Di Desa Buki kegiatan pembuatan WC keluarga diperuntukkan bagi warga yang memerlukan. Dalam tahun 2006 LPSTK bersama MD dan FD telah melakukan inventarisasi keluarga yang memerlukan WC keluarga. Hasil inventarisasi dan kajian terdapat 40 keluarga yang layak untuk memperoleh bantuan WC keluarga. Dalam tahun 2008, setelah kegiatan dimulai, ditetapkan bahwa masing-masing keluarga dibantu dalam bentuk material yaitu 3 sak semen, 0,5 kubik pasir, dan 100 batako. Material untuk masing-masing keluarga

tersebut senilai 500 ribu rupiah. Tiap keluarga diwajibkan berpartisipasi tenaga dan menambah dana sendiri untuk menyelesaikan pembuatan WC keluarga. WC keluarga untuk 40 keluarga akhirnya dapat selesai.

Perbaikan Masjid

Kondisi masjid di Desa Buki telah mengalami kerusakan, antara lain atap seng yang mulai keropos dan beberapa bagian kayu telah mulai lapuk. Masjid yang mengalami kerusakan sebanyak 4 buah dan memerlukan renovasi. Sebagian dana *village grant* di Desa Buki telah dimanfaatkan untuk ikut menyumbang perbaikan 4 masjid. Kontribusi kegiatan tersebut diperuntukkan untuk membeli material bangunan seperti kayu, seng, paku dan cat. Dengan melakukan kegiatan secara gotong royong baik tenaga dan sebagian menggunakan dana masjid akhirnya perbaikan masjid dapat diselesaikan.

- ***Desa Bungaiya***

Di Desa Bungaiya dana *village grant* telah dimanfaatkan untuk membuat tembok pasar, WC keluarga sebanyak 6 unit dan membeli joloro. Penentuan jenis *village grant* tersebut didasarkan atas musyawarah desa terutama terdiri dari unsur pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, dan pengurus LPSTK.

Tembok Pasar

Pertimbangan utama pembuatan tembok pasar desa adalah untuk mencegah gangguan hewan dengan masuknyakelompok sapi dan kambing. Di daerah tersebut ternak sapi dan kambing sudah biasa dilepaskan bebas berkeliaran sehingga telah mengganggu tempat fasilitas umum. Tembok pasar dibuat permanen mengitari pasar dan ada pintu pasar dengan lebar 4 meter. Pada saat tidak ada kegiatan di

pasar desa kadangkala masih ada hewan yang masuk, karena pintu pasar tidak selalu ditutup.

Pembangunan tembok pasar tersebut dilaksanakan oleh LPSTK dengan biaya 35 juta rupiah. Dalam kompleks pasar dibangun dua los dan satu WC. Dalam kenyataan pembuatan tembok pasar tidak efektif karena pasar hanya buka 3 jam tiap hari Minggu. Pada saat hari pasar pedagang dari luar desa sering berjualan kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, tembakau, perkakas plastik dan hasil pertanian. Jumlah pembeli sangat sedikit, terbatas pada penduduk sekitar pasar. Manakala keluarga di Desa Bungaiya ada kebutuhan untuk berbelanja mereka biasa pergi ke pasar di desa lain sesuai dengan jadwal atau pergi ke pasar Benteng yang buka setiap hari.

WC Keluarga

Di Desa Bungaiya WC keluarga yang didanai dari *village grant* sebanyak 5 unit WC tersebut berukuran 2 x 2 m dengan biaya masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Distribusi WC berada di Dusun Polong (1 unit), Dusun Jenekiki (1 unit), Dusun Kasabumbung (2 unit), Dusun Benelohe (1 unit) dan di Dusun Tajuiya (1 unit). Keterbatasan air bersih di daerah tersebut telah menjadi kendala pemanfaatan WC. Sebelum ada WC keluarga, warga Bungaiya biasa membuang air besar di pantai atau di kebun. Dengan adanya program WC baik dari Plan, COREMAP dan PNPM-Perdesaan telah dapat menekan kebiasaan tersebut dan secara spontan dapat mendorong keluarga yang mampu membuat MCK sendiri. Di Desa Bungaiya selain ada 5 WC dari COREMAP II juga terdapat 9 unit WC dari dana PNPM Mandiri-Perdesaan dan ada 3 WC yang didanai LSM-Plan.

Joloro

Keberadaan Joloro di Desa Bungaiya diambil dari dana *village grant* pada tahun 2009. Pada akhir tahun 2010 kondisi fisik (*body*)

maupun mesinnya dengan 22 Pk sudah dalam keadaan rusak. Efektifitas pemanfaatan joloro tersebut sangat pendek karena dibeli dari tangan Pak Samsudin dalam keadaan setengah barudengan harga 17 juta rupiah. Keputusan Pokmaswas bersama LPSTK membeli joloro bekas karena dana yang tersedia tidak cukup untuk membeli atau membuat joloro baru. Selama satu tahun pengawasan DPI masih jalan, namun dengan rusaknya joloro maka praktis Pokmaswas tidak dapat optimal melakukan pengawasan.

- **Desa Bontobulaeng**

Di Desa Bontobulaeng dana *village grant* telah turun sebanyak dua kali, yaitu bulan Desember tahun 2007 sebesar Rp 50.000.000 dan tahun 2010 sebesar Rp 50.000.000. Jadi desa ini sudah menerima *danavillage grant* sebesar Rp 100.000.000. Dana tersebut langsung masuk ke rekening LPSTK, atas nama ketua LPSTK. Dana *village grant* tahap I di Desa Bontobulaeng sebesar Rp 25 juta digunakan untuk pembuatan 5 buah MCK senilai Rp 25 juta, dan pembuatan drainase sebesar Rp 25 juta. Adapun dana *village grant* tahap II sebanyak Rp 50 juta, keseluruhan digunakan untuk membuat bangunan perpustakaan.

Tabel 6.1.
Penggunaan dana Village Grant Desa Bontobulaeng

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah
2007 (tahap I):				
1	MCK	5	25.000.000	25.000.000
2	Drainase	1	25.000.000	25.000.000
Total tahap I				50.000.000
2010 (tahap II):				
1	Membuat bangunan perpustakaan	1	50.000.000	50.000.000
Total Tahap II				50.000.000

Sumber : Data primer, survey BME Coremap Tahun 2011

MCK

Ada 5 buah MCK yang dibuat di Desa Bontobulaeng, yang tersebar di empat dusun, yaitu masing-masing 1 di Dusun Mare Utara, Dusun Ujung dan Dusun Pandang, serta 2 di Dusun Mare Selatan, dengan jumlah dana setiap MCK sebesar Rp 5.000.000,-. Pembuatan MCK karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di dusun-dusun tersebut belum memiliki MCK, sehingga sebagian besar penduduk di wilayah itu membuang air besar di pinggir pantai atau di kebun.

Penentuan dusun-dusun yang memperoleh MCK dilakukan dengan cara musyawarah dengan warga. Begitu pula dengan penentuan banyaknya MCK yang dibangun dalam satu dusun. MCK yang dibuat berupa bangunan permanen yang terdiri dari kamar mandi dan WC. Pembuatan MCK dilakukan dengan membayar tukang. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pembuatan MCK sangat kecil, yaitu hanya membantu saja.

Drainase

Pembuatan drainase dilakukan di dua tempat, masing-masing sepanjang 205 m dan 50 meter, dengan dana sebesar Rp 25 juta. Pembuatan drainase dilakukan di dusun Pandang, dengan maksud agar air hujan dapat dialirkan menuju sungai, yang selanjutnya mengalir ke laut. Penentuan pembuatan drainase itu dilakukan dengan cara musyawarah warga. Pembuatan drainase dilakukan oleh tukang.

Bangunan Perpustakaan

Bangunan perpustakaan yang dibuat di Desa Bontobulaeng berupa bangunan yang bersifat permanen, dengan luas 70m persegi (10m x 7 m), dengan menggunakan genteng dari seng. Lantai

bangunan berupa plester. Pengerjaan bangunan tersebut dilakukan oleh tukang. Keterlibatan masyarakat hanyasekedar sebagai pembantu.

- **Desa Bontobaru**

Di Desa Bontobaru, dana *village grant* juga telah turun sebanyak dua kali, yaitu bulan Desember tahun 2007 sebesar Rp 50.000.000 dan tahun 2010 sebesar Rp 50.000.000. Jadi di desa ini jumlah dana *village grant* yang diterima juga sebesar Rp 100.000.000. Dana tersebut langsung masuk ke rekening LPSTK, atas nama ketua LPSTK. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, dana *village grant* tahap I di Bonto Baru digunakan untuk mengembangkan fasilitas TPA (tempat pendidikan Al-Qur'an) sebesar Rp 22 juta, pembuatan turap (penangkal ombak) sebesar Rp 25 juta dan pembuatan pipa air minum sebesar Rp 3 juta. Adapun dana *village grant* tahap II digunakan untuk pembuatan MCK sebesar Rp 20 juta dan untuk pembuatan kapal pengawasan sebesar Rp 30 juta.

Tabel 6.2.
Penggunaan dana Village Grant Desa Bontobaru

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah
2007 (tahap I):				
1	TPA	1	22.000.000	22.000.000
2	Turap	1	25.000.000	25.000.000
3	Pipa air minum	300 m	3.000.000	3.000.000
Total tahap I				50.000.000
2010 (tahap II):				
1	MCK	3	6.333.300	20.000.000
2	Membuat kapal pengawasan	1	30.000.000	30.000.000
Total Tahap II				50.000.000

Sumber : Data primer, survey BME Coremap Tahun 2011

TPA

Tempat pembuangan akhir (TPA) yang dibuat di Desa Bontobaru seluas 36 m persegi (6m x 6 m).TPA itu sebelumnya sudah ada fondasi yang dibuat melalui swadaya masyarakat. Jadi dana *village grant* digunakan untuk membangun baru di atas fondasi yang sudah ada. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan TPA terjadi pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat itu terwujud melalui rapat warga, untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana *village grant*. Jadi pengambilan keputusan bukan hanya ditentukan oleh mereka yang tergabung dalam Pokmas. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembangunan TPA dilakukan dengan cara memborongkan kepada tukang. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat tetap terjadi dengan cara membantu pelaksanaan kegiatan.

Turap

Pembuatan turap dilakukan di pinggir pantai sepanjang sekitar 50 meter dengan anggaran sebesar Rp 25juta.Turap itu dibuat karena pantai mengalami abrasi. Turap yang dibuat berupa tumpukan batu gunung, kemudian ditutup dengan anyaman kawat. Pembuatan turap dilakukan oleh tukang, dengan dibantu oleh masyarakat dengan cara bergotong-royong.

Pipa Air Minum

Keberadaan pipa air minum yang dibuat sepanjang 300 meter. Pembuatan pipa air minum yang menghabiskan dana Rp 3 juta itu dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Dana Rp 3 juta itu terutama untuk membeli pipa besi, sedangkan pengerjaannya dilakukan masyarakat secara bergotong-royong.

MCK

Ada tiga bangunan permanen untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) yang dibuat di Desa Bontobaru, dengan dana sebesar Rp 20 juta. Pembuatan MCK dilakukan dengan membayar tukang. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan MCK berupa pemikiran dan penyediaan lahan.

Joloro Pengawas

Pembuatan joloro pengawasan di Desa Bontobaru dilakukan pada tahun 2010, dengan menggunakan dana tahap dua sejumlah Rp 50.000.000. Joloro yang dibuat di Desa Bontobaru adalah perahu jolor yang memiliki ukuran panjang sekitar 8 meter dan lebar 2 meter. Joloro yang dibuat menggunakan mesin berkapasitas 26 PK. Joloro tersebut tidak dilengkapi peralatan teropong, GPS maupun radio komunikasi.

Joloro pengawasan tersebut selain digunakan untuk pemantauan DPL, juga digunakan untuk memantau kawasan lain di sekitar desa yang berada di luar DPL. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan joloro hanya pada tahap perencanaan. Hal itu karena untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana *village grant*, keputusannya ditetapkan melalui rapat warga. Jadi pengambilan keputusan bukan hanya ditentukan oleh mereka yang tergabung dalam pokmas-pokmas. Pada tahap pelaksanaan, pembuatan kapal pengawasan tidak ada partisipasi masyarakat, karena diborongkan kepada tukang.

Pengadaan joloro pengawasan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk mengawasi lokasi DPL. Dengan adanya joloro pengawasan, maka kegiatan patroli di DPL dan di perairan sekitar desa bisa dilakukan, sehingga bisa menekan terjadinya pelanggaran di kawasan perairan sekitar desa. Meskipun demikian

sangat disayangkan dalam perkembangannya joloro itu tidak dioperasikan lagi secara rutin, dengan alasan untuk menekan biaya operasional. Pada saat ini joloro tersebut pengelolaannya diserahkan pada satu orang yang merupakan anggota Pokmas konservasi. Anggota Pokmas tersebut aelalian merawat joloro juga memanfaatkan untuk mencari ikan. Oleh karena tempat mencari ikan tidak jauh dari desa, maka diharapkan bisa sambil mengawasi DPL.

Sebelumnya, di Kecamatan Pasimasunggu Timur pada tahun 2008 memang sudah ada kapal pengawasan yang dikelola oleh UPTD Perikanan. Akan tetapi, karena dalam satu kecamatan kapal untuk patroli itu hanya satu, dan dikelola oleh UPTD, maka dalam praktiknya pengoperasian kapal dapat disesuaikan dengan keperluan masing-masing desa COREMAP. Sejak tahun 2009, UPTD di Kecamatan Pasimasunggu Timur dibubarkan, sehingga akibatnya kapal pengawasan tersebut ditarik kembali ke kabupaten. Sejak saat itu maka dikawasan ini tidak ada lagi kapal pengawasan, sehingga mendorong Desa Bontobaru untuk membuat joloro pengawasan yang baru.

C. Program COREMAP II Lainnya

Dalam sub-bab ini uraian tentang program COREMAP II lainnya meliputi pengawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di tiap lokasi penelitian baik di P.Selayar bagian utara (Buki dan Bungaiya) serta di kepulauan yaitu di Pasimasunggu Timur.

- ***Desa Buki***

Di Desa Buki tanggung jawab pelaksanaan pengawasan dan konservasi DPL berada di tangan Pokmaswas yang beranggotakan nelayan yang berjumlah 9 orang. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan konservasi DPL sebenarnya telah diatur dalam

Peraturan Desa (Perdes), namun dalam kenyataan kegiatan pengawasan DPL hampir tidak pernah dilakukan. Padahal letak DPL tidak terlalu jauh dari pantai dan kondisinya telah mengalami kerusakan serius. Kerusakan tutupan karang di daerah tersebut antara lain adanya kebiasaan warga yang tinggal di perbukitan melakukan penangkapan ikan pada saat gelombang tenang dengan memanfaatkan akar tanaman tuba yang tumbuh di daerah tersebut. Kerusakan terumbu karang di Desa Buki yang sudah berlangsung lama juga disebabkan adanya pemanfaatan karang laut untuk pagar pekarangan dan untuk material bangunan. Peta DPL dan kualitas terumbu karang dapat dibaca di sub bab 1.4.

Lemahnya pengawasan terkait dengan masalah koordinas ipemangku kepentingan di desa tersebut dan keberadaan joloro yang kondisi fisiknya (*body*) sering rusak. Joloro tersebut dibuat di Desa Buki tahun 2008 dan mengalami kerusakan pada pertengahan tahun 2010. Joloro yang beberapa bagian telah bocor meskipun telah diperbaiki pada saat dipinjamkan kepada seorang nelayan. Pada saat penelitian tahun 2011 joloro tersebut telah ditarik ke darat dan ditempatkan di kebun kelapa. Meskipun kondisi fisik joloro perlu diperbaiki, namun mesin joloro yang berada di dalam sampan masih bisa dioperasikan. Menurut informasi Ketua LPSTK Buki, joloro tersebut tidak tersedia dana perawatan (*maintenance*).

Sebagai upaya untuk mencari dana perbaikan telah diambil kebijakan untuk membolehkan joloro tersebut dipinjam untuk menangkap ikan oleh nelayan Buki namun harus menyetor iuran 100 ribu rupiah setiap bulan. Dalam kenyataan iuran oleh para peminjam joloro tersebut tidak selancar seperti yang direncanakan. Dalam tahun 2011 Ketua LPSTK Buki mempunyai rencana untuk kembali memperbaiki joloro tersebut dengan meminta bantuan dana dari *illegal fishing* tahun 2011 yang dikelola oleh Kepala Desa Buki. Di Desa Buki sampai dengan tahun 2011 tidak ada pondok pengawas. Di

Desa Buki tidak diperlukan pondok pengawas mengingat kenyataan menunjukkan bahwa banyak pondok pengawas di Desa COREMAP yang tidak bermanfaat, misalnya di Desa Bungaiya, Desa Patikarya dan di Desa Laiyolo.

- ***Desa Bungaiya***

Peraturan Desa No.4 tahun 2009 telah mengatur pengawasan dan konservasi DPL di Desa Bungaiya. Di Desa Bungaiya lokasi DPL terletak kurang lebih 700 m dari pantai di depan Dusun Polong. Dalam waktu mendatang Kepala Desa Bungaiya akan mengusulkan penambahan lokasi DPL di Dusun Jenekiki, mengingat kondisi terumbu karangnya dinilai masih bagus dan telah ada pengembangan obyek pariwisata.

Tanggung jawab pengawasan DPL berada pada pengurus Pokmaswas dibantu oleh masyarakat nelayan. Dalam kenyataan pengawasan DPL telah terkendala dengan rusaknya joloro pada tahun 2010. Sebenarnya untuk mendukung pengawasan DPL pada tahun 2009 telah didirikan Pondok Pengawas. Sampai saat ini pondok pengawas berukuran 2,5x 3 m yang letaknya berada 200 m dari pantai ternyata tidak pernah difungsikan. Alasan tidak difungsikannya Pondok Pengawas adalah letaknya yang cukup jauh dari lokasi DPL, rusaknya joloro dan kelemahan koordinasi Pokmaswas. Oleh karena pondok pengawas tidak terawat maka telah mengalami kerusakan, walaupun belum parah.

Sebagai respons atas kondisi tersebut kepala Desa Bungaiya telah mengaktifkan pengawasan DPL dari kelompok program *illegal fishing* terutama mereka yang tinggal di Dusun Polong. Pengawasan DPL yang efektif dilakukan pada saat gelombang lemah dan pancaroba mengingat bahwa masyarakat nelayan di Dusun Polong mempunyai kegiatan di laut baik sebagai nelayan tangkap dan nelayan

budidaya rumput laut. Pada tahun 2010 bahkan telah ada warga Polong yang telah membuat keramba apung untuk pembesaran ikan.

Kendati Pokmaswas terkendala dalam pengawasan DPL, namun kegiatan pengawasan tetap dilakukan kelompok nelayan yang didanai dari *illegal fishing* sebesar 10 juta rupiah setahun, Selain itu adanya partisipasi masyarakat nelayan di Dusun Polong telah mampu menjaga kelestarian tutupan karang. Salah satu keberuntungan di Desa Bungaiya banyak terdapat karang darat sehingga tidak ada warga yang memanfaatkan karang laut untuk pagar dan bangunan. Karang darat di daerah tersebut bahkan telah dijual ke desa-desa lain, terutama ke Kota Benteng. Hal ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

- ***Desa Bontobulaeng***

Kegiatan pengawasan merupakan hal yang penting dilakukan, untuk mengetahui dan mencegah terjadinya perusakan terumbu karang. Sampai dengan tahun 2011 di desa Bontobulaeng, kegiatan pengawasan tidak berjalan, karena tidak adanya prasarana joloro yang dimiliki LPSTK. Joloro pengawasan hanya dimiliki oleh UPTD. Dengan demikian pengelolaan joloro dilakukan oleh Unit pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Kecamatan Pasimasunggu Timur. Meskipun demikian joloro tersebut dapat digunakan oleh COREMAP secara bersama-sama untuk kegiatan pengawasan di kawasan terumbu karang maupun di DPL yang telah ditentukan. Akan tetapi, oleh karena satu joloro itu digunakan untuk pengawasan di seluruh wilayah kecamatan, maka pemanfaatan joloro itu tidak hanya digunakan oleh Desa Bontobaru dan Bontobulaeng, melainkan juga oleh desa-desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Pada tahun 2009 UPTD dihapus, sehingga kapal pengawasan ditarik ke Dinas Perikanan dan Kelautan. Pengawasan di Desa

Bontobulaeng dilakukan menggunakan joloro milik warga, tetapi untuk pembelian minyaknya menggunakan dana *illegal fishing* milik desa, yang diperoleh dari dana APBD sebesar Rp 7.500.000 per tahun. Pengawasan yang direncanakan dilakukan sebulan dua kali tersebut dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara rutin, karena keluarnya dana dari desa tidak lancar. Pada saat ini pengawasan yang dilakukan lebih mengandalkan pada nelayan yang sedang melaut.

- **Desa Bontobaru**

Di Desa Bontobaru, pengawasan dilakukan dengan joloro yang berasal dari dana *village grant*. Pada awalnya pengawasan dilakukan satu minggu sekali, dengan menggunakan joloro pengawas yang sudah dibuat pada tahun 2010. Meskipun demikian dalam perkembangannya joloro itu hanya dioperasikan beberapa kali, kemudian berhenti. Terdapat kesepakatan antara LPSTK dengan aparat desa untuk menyisihkan dana *illegal fishing* yang diperoleh dari APBD, sebesar Rp 7.500.000. Oleh karena itu pengoperasian joloro menggunakan dana *illegal fishing* tersebut. Untuk sekali pengawasan dibutuhkan dana untuk membeli solar sekitar 10 – 20 liter dengan harga Rp 6.500 per liter. Jadi setiap kali pengawasan dibutuhkan dana sekitar Rp 65.000 sampai Rp 130.000. Saat ini pengawasan itu tidak dilakukan secara rutin, karena minimnya biaya. Pengawasan yang dilakukan lebih mengandalkan pada masyarakat yang sedang melaut, diminta untuk menurut masyarakat dikelola oleh satu orang, yang merupakan anggota kelompok konservasi.

D. Persepsi Masyarakat tentang Manfaat COREMAP

Telah diuraikan sebelumnya bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah program penyelamatan

sumberdaya terumbu karang yang didanai dari anggaran COREMAP II dan anggaran daerah. Daerah penelitian yang meliputi 4 desa, merupakan bagian dari 52 desa COREMAP di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selama program COREMAP II masuk ke daerah tersebut tentunya telah menimbulkan pengetahuan barudikalangan anggota masyarakat tentang kegiatan program tersebut baik melalui proses sosialisasi dan secara tidak langsung melalui alih pengetahuan diantara warga. Dengan pengetahuan yang mereka miliki telah terbentuk pula persepsi atau penilaian subyektif tentang kegiatan COREMAP II.

Persepsi yang dimiliki anggota masyarakat tersebut dapat bersifat positif dan sebaliknya bersifat negatif. Persepsi dikatakan positif manakala mereka menganggap kegiatan COREMAP II adalah bermanfaat atau mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraannya. Sebaliknya bila program COREMAP II dinilai tidak bermanfaat maka persepsi mereka masuk kategori negatif. Secara kuantitatif atas dasar hasil survei BME tahun 2011 dapat diketahui persentase persepsi responden baik yang positif dan yang negatif. Persepsi positif merupakan akumulasi dari kategori jawaban sangat bermanfaat, bermanfaat dan cukup bermanfaat. Program COREMAP II dikatakan berhasil bila paling sedikit 70 persen dari nelayan/penerima manfaat di lokasi program mempunyai persepsi bahwa COREMAP II berdampak positif terhadap kesejahteraannya. Sub bagian ini berisi uraian tentang persepsi responden tentang manfaat COREMAP II untuk masing-masing desa penelitian yang meliputi *village grant*, penyadaran masyarakat dan pengawasan laut.

- ***Desa Buki***

Persepsi *Village Grant*

Dari tiga kegiatan *village grant* yang dilaksanakan ternyata responden di Desa Buki mempunyai penilaian bahwa kegiatan

perbaiki masjid dan pembuatan WC keluarga mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat, meskipun tidak langsung berkaitan dengan penyelamatan terumbu karang. Kegiatan pembuatan joloro bahkan dinilai tidak bermakna. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 6.1 berikut ini menunjukkan hasil survei tentang persepsi penggunaan dana *village grant*.

Hasil survei menunjukkan bahwa responden yang menyatakan pendapat bahwa joloro bermanfaat atau mempunyai dampak positif hanya sebesar 29,8 persen. Hal ini memberi indikasi bahwa pemanfaatan joloro bagi kesejahteraan warga setempat pemanfaatannya belum optimal atau kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dalam hal ini bahkan ada responden yang tidak mengetahui adanya joloro yang didanai COREMAP II (1,7 persen). Rendahnya opini atau persepsi masyarakat terhadap keberadaan joloro melihat kenyataan bahwa joloro tidak optimal digunakan untuk pengawasan DPL. Telah diterangkan sebelumnya bahwa hal ini terkait dengan lemahnya pengelolaan joloro

Tabel 6.3.
Persepsi Tentang *Village Grant* menurut Jenis Pemanfaatan di Desa Buki, 2011

Jenis Pemanfaatan <i>village grant</i>	Persepsi Responden Tentang Pemanfaatan <i>Village Grant</i>					
	Sangat ber-manfaat	Ber-manfaat	Cukup ber-manfaat	Kurang Ber-manfaat	Tidak ber-manfaat	Tidak ada
Joloro	6,2	9,8	13,8	31,0	27,6	1,7
WC keluarga	12,1	32,8	15,5	32,8	5,2	1,7
Perbaiki masjid	72,4	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber : Data primer Survei BMETahun.2011

Berbeda dengan keberadaan joloro yang kurang bermanfaat, pengadaan WC keluarga ternyata banyak manfaatnya, meskipun dinilai belum optimal. Hasil survei menunjukkan bahwa 60,4 persen responden mempunyai aspirasi bahwa WC keluarga cenderung bermanfaat. Hasil opservasi dan wawancara menunjukkan pula

bahwa WC keluarga selesai dibuat dan banyak dimanfaatkan terutama bagi keluarga yang memperoleh bantuan. Meskipun demikian dua perlima responden cenderung menilai kurang bermanfaat. Ada WC keluarga yang tidak berfungsi karena mulai ada yang rusak dan ada yang kesulitan air serta masih ada yang memanfaatkan laut untuk buang air besar.

Masyarakat pesisir di Desa Buki yang sangat dominan beragama islam, tentu saja sangat menghargai nilai kehidupan spiritual yang sangat memerlukan prasarana masjid. Pembangunan masjid di Desa Buki dilakukan dengan suwadaya masyarakat meskipun mereka umumnya tergolong golongan menengah ke bawah. Oleh karena itu mereka sangat menghargai bantuan dana COREMAP II untuk perbaikan masjid, bahkan mereka juga telah menyumbangkan baik dana dan tenaga. Hasil survei 2011 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai persepsi tentang kegiatan *village grant* untuk perbaikan masjid, adalah sangat bermanfaat dan bermanfaat masing-masing sebesar 72,4 persen dan 27,6 persen.

Atas dasar hasil survey BME tentang pemanfaatan dana *village grant* untuk pembangunan prasarana pembangunan desa Buki ternyata masyarakat menilai bahwa umumnya belum bermanfaat sepenuhnya(63,4 persen). Nilai tersebut masih di bawah nilai indikator yang ditetapkan yaitu 70 persen. Kegiatan *village grant* yang dianggap mempunyai dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat adalah perbaikan masjid (100 persen).

Persepsi Pengetahuan Masyarakat

Telah dikemukakan dalam bab pertama bahwa proses sosialisasi di Desa Buki telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Kendati telah dilaksanakan sosialisasi dalam kenyataan program sosialisasi belum

dirancang secara memadai sehingga hasilnya belum optimal. Hasil survei BME-Mei 2011 menunjukkan bahwa persepsi responden dalam penyadaran pelestarian terumbu karang dan manfaat pondok informasi hasilnya masing-masing sebesar 46,5 persen dan 46,5 persen. Hal ini masih jauh dari indikator keberhasilan bahwa paling sedikit 70 persen penerima manfaat mempunyai persepsi bahwa COREMAP mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraannya.

Tabel 6.4.
Persepsi Responden Tentang Penyadaran Masyarakat Menurut Jenis Pemanfaatan di Desa Buki, 2011

Jenis Pemanfaatan	Persepsi Responden Tentang Pemanfaatan Sosialisasi					
	Sangat bermanfaat	Bermanfaat	Cukup bermanfaat	Kurang bermanfaat	Tidak bermanfaat	Tidak ada
Pelestarian Terumbu karang	10,3	13,8	22,4	15,5	19,0	19,0
Pondok Informasi	1,7	13,8	31,0	19,0	17,2	17,2

Sumber :Data primer. Survei BME Coremap. Tahun 2011

Salah satu kendala proses sosialisasi adalah keterbatasan dana. Selain itu kendala yang dihadapi tim sosialisasi dari DKP dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: keterbatasan materi sosialisasi, sementara diperlukan materi-materi baru yang menarik dan tidak membosankan. Selain itu, dalam COREMAP II terlalu banyak istilah-istilah asing yang sulit dimengerti, terutama oleh masyarakat desa. Proses sosialisasi yang jarang dilakukan serta interaksi petugas FD dan MD dengan warga yang juga tidak intensif menyebabkan pengetahuan masyarakat tidak sepenuhnya tahu. Akibat proses sosialisasi baik melalui pertemuan, tatap muka dan pemanfaatan pondok informasi yang tidak sepenuhnya dilakukan menyebabkan opini mereka baik terhadap pelestarian terumbu karang dan pondok informasi juga tidak optimal. Hasil survei menunjukkan bahwa

responden yang menjawab sangat bermanfaat, bermanfaat dan cukup bermanfaat masing masing hanya sebesar 46,5 persen dan 46,5 persen.

Persepsi Kegiatan Pengawasan

Di Desa Buki pada umumnya masyarakat telah mengetahui bahwa terumbu karang adalah “rumah ikan”, yaitu tempat ikan bersarang dan tempat ikan mencari makan. Oleh karena itu mereka mempunyai harapan agar terumbu karang tidak mengalami kerusakan. Oleh karena itu penetapan DPL sangat diperlukan agar ikan tidak mengalami kepunahan. Sejalan dengan pengetahuan tersebut mereka mempunyai persepsi atau pendapat bahwa penetapan DPL mempunyai nilai positif untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa 92,1 persen responden mempunyai opini yang signifikan bahwa DPL mempunyai nilai positif terhadap kesejahteraan.

Tabel 6.5.
Persepsi Responden Tentang Manfaat Pengawasan
Laut di Desa Buki, 2011

Jenis Kegiatan	Persepsi Responden Tentang Pengawasan Laut					
	Sangat bermanfaat	Bermanfaat	Cukup bermanfaat	Kurang bermanfaat	Tidak bermanfaat	Tidak ada
Penetapan DPL	1,7	44,8	46,6	3,4	1,7	1,7
Patroli Pokmaswas	0,0	0,0	1,7	5,2	8,8	84,5
Patroli Gabungan	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6	82,8
Pengawasan masyarakat	0,0	15,5	50,0	20,7	13,8	0,0

Sumber : Data primer Survei BME Coremap. Tahun 2011

Patroli Pokmaswas dan patrol gabungan dinilai oleh masyarakat sangat negative bahkan responden yang menjawab bahwa kegiatan tersebut tidak ada masing-masing 84,5 persen dan 82,8 persen. Pendapat tersebut menguatkan kenyataan bahwa kinerja Pokmaswas dan patrol gabungan sangat buruk. Sebagai respons atas lemahnya kinerja lembaga tersebut nampaknya masyarakat nelayan yang dibantu dengan dana *illegal fishing* telah melakukan kegiatan pengawasan keberadaan DPL meskipun dinilai oleh masyarakat belum optimal dimana mereka yang menjawab bermanfaat dan cukup bermanfaat masing-masing hanya 15,5 persen dan 50,0 persen. Nilai kinerja pengawasan masyarakat sebesar 65,5 persen tersebut masih di bawah nilai indikator sebesar 70 persen.

- ***Desa Bungaiya***

Persepsi Village Grant

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan joloro di Desa Bungaiya hanya satu tahun semenjak dibeli dari Pak Syamsuddin. Joloro yang dibeli tersebut bukan barang baru tetapi telah dipakai sebelumnya atau lazim disebut *second hand*. Karena joloro mengalami kerusakan, waktu efektif pemanfaatan joloro untuk pengawasan DPL relative juga singkat. Oleh karena itu adalah wajar manakala persepsi responden tentang pemanfaatan joloro cenderung negative atau tidak ada manfaatnya (73,4 persen) bahkan 7,8 persen responden menilai tidak pernah ada joloro di Desa Buki. Dengan kata lain masyarakat Desa Bungaiya mempunyai opini bahwa joloro yang dibeli seharga 17,5 juta rupiah ternyata tidak banyak manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 6.6.
Persepsi Responden Tentang *Village Grant* menurut Jenis Pemanfaatan di Desa Bungaiya 2011

Persepsi Responden Tentang Pemanfaatan <i>Village Grant</i>						
Jenis Pemanfaatan <i>village grant</i>	Sangat ber-manfaat	Ber-manfaat	Cukup ber-manfaat	Kurang ber-manfaat	Tidak ber-manfaat	Tidak ada
Joloro	0,0	17,2	0,0	1,6	73,4	7,8
WC keluarga	78,1	18,8	1,6	1,5	0,0	0,0
Pagar pasar	57,8	40,6	0,0	0,0	0,0	1,6

Sumber : Data primer Survei BME Coremap. Tahun 2011

Berbeda dengan pemanfaatan dana *village grant* untuk pengadaan joloro, pembangunan WC keluarga dan pembangunan pagar pasar desa ternyata responden menilai mempunyai dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Responden yang mempunyai opini positif tersebut untuk WC keluarga dan pagar pasar masing-masing 98,5 persen dan 98,6 persen. Kenyataan menunjukkan bahwa WC keluarga yang dibangun di Desa Bungaiya telah dimanfaatkan masyarakat sekitarnya. Karena dianggap bermanfaat maka pada tahun 2010 Desa Bungaiya telah membangun WC baru yang didanai dari PNPM Mandiri-Perdesaan.

Persepsi Penyadaran Masyarakat

Persepsi tentang penyadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan melalui kegiatan pondok informasi telah dinilai masyarakat pemanfaatannya belum optimal. Seperti terlihat pada tabel berikut ini responden yang menilai kegiatan tersebut positif masing-masing 89,1 persen 89,2 persen. Kegiatan penyadaran masyarakat tentang terumbu karang yang optimal tersebut terkait erat dengan kinerja kegiatan FD dan MD serta respons dari masyarakat di desa

tersebut yang juga optimal, meskipun FD sering dilakukan pergantian. Bahkan ada FD yang kegiatannya pernah merangkap dengan Desa Menara Indah. Salah satu kendala petugas COREMAP melakukan sosialisasi adalah letak dusun-dusun permukiman yang relative berjauhan sementara FD tidak tinggal di desa tersebut. Sementara itu MD juga disibukkan dengan pekerjaan pokok yang lain yaitu beternak ayam ras.

Tabel 6.7.
Persepsi Tentang Penyerahan Masyarakat menurut Jenis Pemanfaatan di Desa Bungaiya 2011

Jenis Pemanfaatan	Persepsi Responden Tentang Pemanfaatan					
	Sangat ber-manfaat	Ber-manfaat	Cukup ber-manfaat	Kurang ber-manfaat	Tidak ber-manfaat	Tidak ada
Sosialisasi	15,6	67,2	6,3	0,0	10,9	0,0
Pondok Informasi	18,8	64,1	6,3	0,0	10,9	0,0

Sumber :Data primer Survei BME Coremap. Tahun 2011

Keberadaan pondok informasi juga dinilai bermanfaat untuk masyarakat, meskipun pondok informasi yang dibuat tahun 2010 belum dimanfaatkan secara optimal. Pondok informasi yang baru tersebut rencananya akan dipakai juga untuk perpustakaan desa dan kantor Gapoktan. Pondok informasi tersebut menempati tanah hibah milik Pak M.Rosyid dan dibangun dengan biaya 50 juta rupiah. Pembangunan pondok informasi tersebut dilakukan oleh LPSTK Bungaiya dan telah melibatkan penduduk setempat. Sebelum pondok informasi selesai dibuat, lebih dahulu menempati bangunan di samping kantor deda, Pada saat itu pondok informasi telah dimanfaatkan untuk perpustakaan desa dan untuk berbagai pertemuan COREMAP bahkan untuk pertemuan desa.

Persepsi Kegiatan Pengawasan

Desa Bungaiya merupakan daerah karang, baik karang gunung di daratan dan terumbu karang yang berada di laut. Keberadaan karang gunung membuktikan bahwa tempo dulu daerah tersebut berada di laut dan kemudian karena mengalami proses pengangkatan maka terumbu karang di laut menjadi karang gunung. Karena daerahnya sangat tandus, tidak cocok untuk kegiatan pertanian maka mata pencaharian masyarakat terpusat pada kegiatan kenelayanan dan peternakan sapi atau kambing.

Tabel 6.8.
Persepsi Manfaat Pengawasan Laut Menurut Jenis Kegiatan di Desa Bungaiya 2011

Jenis Kegiatan	Persepsi Responden Tentang Pengawasan Laut					
	Sangat ber-manfaat	Ber-manfaat	Cukup ber-manfaat	Kurang ber-manfaat	Tidak ber-manfaat	Tidak ada
Penetapan DPL	26,6	68,8	3,1	0,0	0,0	1,6
Patroli	0,0	34,4	26,6	0,0	0,0	39,1
Pokmaswas						
Patroli	0,0	39,1	50,0	0,0	0,0	10,9
Gabungan						
Pengawasan masyarakat	53,1	45,3	0,0	0,0	0,0	1,6

Sumber : Data primer Survei BME Coremap. Tahun 2011

Sebagai daerah nelayan tangkap dan pengetahuan mereka tentang terumbu karang yang telah memadai maka semua kegiatan yang bertujuan untuk melindungi keberadaan sumberdaya ekosistem terumbu karang akan dinilai positif. Mereka menyadari manakala terumbu karang rusak maka akan berdampak negative terhadap kesejahteraan nelayan. Sejalan dengan pengetahuan mereka tentang terumbu karang penetapan DPL yang sekarang ada ternyata dinilai bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (98,4 persen).

Sementara itu kendati keberadaan joloro tidak optimal dapat dimanfaatkan karena rusak, namun masyarakat menilai bahwa kinerja kegiatan pengawasan oleh Pokmaswas cenderung positif (61 persen). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Desa Bungaiya telah terbentuk kelompok pengawasan yang kegiatannya dari sumber dana *illegal fishing*. Oleh karena itu pengawasan masyarakat nelayan terhadap keberadaan DPL dan pengawasan terhadap pelanggaran nelayan andon dinilai masyarakat sangat positif (98,6 persen). Di Desa Bungaiya masyarakat nelayan yang berasal dari Pokmaswas dan *illegal fishing* sudah biasa melakukan patroli bersama. Patroli gabungan tersebut oleh masyarakat juga dinilai bermanfaat untuk masyarakat (89,1 persen).

- ***Desa Bontobulaeng dan Desa Bontobaru***

Di Desa Bontobulaeng dan Desa Bontobaru tidak ada dana *village grant* yang digunakan untuk pembangunan ataupun perbaikan sarana ekonomi. Oleh karena itu ketika hal itu ditanyakan kepada masyarakat, sebagian besar responden juga menjawab tidak ada. Jumlah responden yang menjawab demikian sangat besar, yaitu mencapai 82,2%.

Dana *village grant* untuk pelestarian lingkungan adalah untuk pembuatan turap atau talud dan pembuatan kapal patroli, keduanya di Desa Bontobaru. Terkait dengan hal tersebut, sebagian besar responden juga tidak mengetahuinya, sehingga mayoritas menjawab tidak ada. Mereka yang menjawab demikian jumlahnya cukup besar, yaitu 56,6%. Mereka yang berpandangan bahwa pembuatan turap itu bermanfaat jumlahnya sangat kecil, yaitu hanya 18,6%. Atau jika digabung dengan yang menjawab sangat bermanfaat dan cukup bermanfaat, jumlahnya juga cukup kecil, yaitu hanya 34,1%.

Pembangunan/perbaikan sanitasi lingkungan yang dilakukan dengan menggunakan dana *village grant* adalah pembuatan MCK di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, drainase di Desa Bontobulaeng, dan perpipaan air minum di Desa Bontobaru. Berkaitan dengan pemanfaatan *village grant* untuk pembangunan sanitasi lingkungan tersebut, mereka yang menjawab sangat bermanfaat jumlahnya cukup besar, yaitu 45%, dan yang menjawab bermanfaat jumlahnya juga tergolong besar, yaitu 39,5%. Jadi jika responden yang menjawab sangat bermanfaat, bermanfaat dan cukup bermanfaat itu digabung, jumlahnya menjadi 87,5%.

Adapun pemanfaatan *village grant* untuk pembangunan/perbaikan sarana sosial adalah untuk pembangunan TPA di Desa Bontobaru, dan perpustakaan di Desa Bontobulaeng. Terkait dengan pemanfaatan tersebut, jumlah responden terbanyak menjawab bermanfaat, yaitu 48,1%. Meskipun demikian, yang menjawab sangat bermanfaat jumlahnya juga cukup besar, yaitu 30,2%. Jadi jika responden yang menjawab sangat bermanfaat, bermanfaat dan cukup bermanfaat itu digabung, jumlahnya menjadi 79,9%.

Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang, COREMAP melakukan melalui dua cara, yaitu melalui sosialisasi pelestarian terumbu karang seperti pemutaran film dan penyuluhan, dan melalui penyediaan pondok informasi. Berkaitan dengan kegiatan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi upaya pelestarian terumbu karang, sebagian besar responden (45%) berpandangan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat. Jika jumlah tersebut digabungkan dengan yang berpandangan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan cukup bermanfaat, maka secara riil mereka yang termasuk dalam kategori berpandangan bahwa kegiatan tersebut dianggap bermanfaat cukup besar, yaitu 72,9%.

Tabel 6.9.
Persepsi Tentang *Village Grant* menurut Jenis Pemanfaatan di Pasimasunggu Timur 2011

Jenis Pemanfaatan <i>village grant</i>	Persepsi Responden Tentang Pemanfaatan <i>Village Grant</i>					
	Sangat bermanfaat	Bermanfaat	Cukup bermanfaat	Kurang bermanfaat	Tidak bermanfaat	Tidak ada
Perbaikan sarana ekonomi	3,9	13,2	0,8	-	-	82,2
Pelestarian lingkungan (pembuatan turap, kapal patroli)	8,5	18,6	7,0	3,1	6,2	56,6
Pembangunan/perbaikan sanitasi (MCK, drainase, perpipaan)	45,0	39,5	3,1	0,8	3,1	8,5
Pembangunan/perbaikan sarana sosial (TPA, perpustakaan)	30,2	48,1	1,6	1,6	3,1	15,5

Sumber : Data primer, survei BME Coremap.Tahun 2011

Adapun berkaitan dengan kegiatan penyadaran masyarakat melalui pondok informasi, sebagian besar responden (48,1%) juga berpandangan bahwa hal tersebut bermanfaat. Jika jumlah tersebut digabungkan dengan yang berpandangan sangat bermanfaat dan cukup bermanfaat, maka secara riil mereka yang termasuk dalam kategori berpandangan bahwa pondok informasi tersebut dianggap bermanfaat cukup besar, yaitu 71,4%.

Walaupun jumlah responden yang tergolong berpandangan bahwa penyadaran masyarakat berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pelestarian terumbu karang dan penyadaran masyarakat melalui pondok informasi itu cukup besar, namun sebagian responden tetap

memiliki pandangan bahwa penyadaran pelestarian terumbu karang itu tidak ada, walaupun jumlah mereka yang berpandangan demikian relatif kecil, yaitu hanya 15,5%. Begitu pula, sebagian responden juga tetap memiliki pandangan bahwa penyadaran melalui pondok informasi itu tidak ada, walaupun jumlah mereka yang berpandangan demikian juga relatif kecil, yaitu hanya 17,8%.

Tabe 6.10.

Persepsi Tentang Penyadaran Masyarakat menurut Jenis Pemanfaatan di Pasimasunggu Timur 2011

Jenis Pemanfaatan	Persepsi Responden Tentang Pemanfaatan					
	Sangat ber-manfaat	Ber-manfaat	Cukup ber-manfaat	Kurang ber-manfaat	Tidak ber-manfaat	Tidak ada
Sosialisasi Pelestarian Terumbu karang	9,3	45,0	18,6	7,0	4,7	15,5
Pondok Informasi	7,0	48,1	16,3	1,6	9,3	17,8

Sumber : Data primer, Survei BME Coremap. Tahun 2011

Untuk pelestarian terumbu karang, di desa Coremap telah ditetapkan lokasi DPL. Berkaitan dengan itu, sebagian besar responden berpandangan bahwa penetapan DPL tersebut bermanfaat. Jumlah mereka yang berpandangan demikian sebanyak 59,7%. Bahkan mereka yang berpandangan sangat bermanfaat jumlahnya juga cukup besar, yaitu 12,4%. Adapun yang berpandangan bahwa penetapan DPL itu kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, jumlahnya sangat kecil, yaitu masing-masing 5,4% dan 3,1%.

Untuk menjaga DPL agar terhindar dari kegiatan yang merusak terumbu karang, di setiap desa Coremap diharapkan diadakan patroli rutin yang diadakan oleh Pokmaswas. Terkait dengan itu, mereka yang berpandangan bahwa patroli pokmaswas tersebut bermanfaat

jumlahnya tidak banyak, yaitu hanya 33,3%. Meskipun demikian, jika digabung dengan yang berpandangan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan cukup bermanfaat, maka jumlah keseluruhan adalah yang termasuk berpandangan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat cukup besar, yaitu 62%.

Selain patroli oleh Pokmaswas, diharapkan untuk menjaga DPL juga dilakukan patroli yang sifatnya gabungan. Terkait dengan itu, mereka yang berpandangan bahwa patroli gabungan tersebut bermanfaat jumlahnya tidak banyak, yaitu hanya 12,4%. Jika digabung dengan yang berpandangan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan cukup bermanfaat, maka jumlah keseluruhan juga tidak banyak, yaitu hanya 24,1%. Hal itu karena realitasnya patroli gabungan itu tidak pernah ada, sehingga sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa patroli gabungan itu selama ini tidak ada. Jumlah yang berpandangan demikian sangat besar, yaitu 73,6%.

Selain patroli oleh Pokmaswas dan patroli yang sifatnya gabungan, diharapkan untuk menjaga DPL juga diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. Terkait dengan itu, mereka yang berpandangan bahwa pengawasan oleh masyarakat tersebut bermanfaat jumlahnya tidak banyak, yaitu hanya 10,9%. Jika digabung dengan yang berpandangan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan cukup bermanfaat, maka jumlah keseluruhan juga tidak banyak, yaitu hanya 28%. Hal itu karena sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa pengawasan masyarakat itu selama ini tidak ada. Jumlah yang berpandangan demikian sangat besar, yaitu 54,3%.

Tabel 6.11.
Persepsi Manfaat Pengawasan Laut Menurut Jenis Kegiatan
di Pasimasunggu Timur 2011

Jenis Kegiatan	Persepsi Responden Tentang Pengawasan Laut					
	Sangat bermanfaat	Bermanfaat	Cukup bermanfaat	Kurang bermanfaat	Tidak bermanfaat	Tidak ada
Penetapan DPL	12,4	59,7	10,9	5,4	3,1	8,5
Patroli	10,1	33,3	18,6	2,3	2,3	33,3
Pokmaswas						
Patroli Gabungan	7,8	12,4	3,9	2,3	-	73,6
Pengawasan masyarakat	10,1	10,9	7,0	10,9	7,0	54,3

Sumber : Data primer, Survey BME Coremap.Tahun 2011

Manfaat Prasarana COREMAP II di Tingkat Kabupaten

Hasil survei dari 252 responden tentang persepsi manfaat prasarana COREMAP II telah dikemukakan secara rinci sampai dengan tataran desa penelitian. Kemudian untuk memperoleh data yang sifatnya lebih ringkas yaitu pada tataran kabupaten telah dilakukan tabulasi silang tentang variabel jenis prasarana menurut variabel manfaat dan kawasan (lihat Tabel 6.12). Atas dasar data empirik tersebut dapat diketahui secara jelas tentang manfaat bantuan prasarana COREMAP II di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat prasarana COREMAP II secara keseluruhan yang merupakan gabungan prasarana *village grant*, *public awareness* dan pengawasan menunjukkan secara signifikan bahwa bantuan tersebut untuk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bermanfaat. Manfaat tersebut ternyata lebih dirasakan untuk kawasan pulau daripada di kawasan daratan P.Selayar. Pendapat responden di kawasan daratan

dan untuk kawasan pulau yang menyatakan bahwa prasarana COREMAP II adalah bermanfaat masing-masing 85,25 persen dan 93,85 persen. Apabila persepsi tersebut dikaitkan dengan indikator keberhasilan COREMAP II, dapat disimpulkan bahwa COREMAP II di Kabupaten Kepulauan Selayar masuk kategori berhasil karena di atas 70 persen.

Tabel 6.12.

Manfaat Jenis Prasarana COREMAP II Menurut Kategori Manfaat dan Menurut Kategori Kawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011

Jenis Prasarana	Kategori manfaat	Kawasan		Kabupaten
		Daratan	Pulau	
Village Grant(VG)	Tidak bermanfaat	4,10	3,85	3,97
	Bermanfaat	95,90	96,15	96,03
	Total	100,00	100,00	100,00
Public Awareness (PA)	Tidak bermanfaat	33,61	22,31	27,78
	Bermanfaat	66,39	77,69	72,22
	Total	100,00	100,00	100,00
Pengawasan	Tidak bermanfaat	12,30	14,62	13,49
	Bermanfaat	87,70	85,38	86,51
	Total	100,00	100,00	100,00
Gabungan (VG, PA dan Pengawasan)	Tidak bermanfaat	14,75	6,15	10,32
	Bermanfaat	85,25	93,85	89,68
	Total	100,00	100,00	100,00
N		122	130	252

Sumber :Data primer, Survei BME Coremap. Tahun 2011

Mereka menyatakan tersebut terkait erat dengan kenyataan bahwa keberadaan bantuan prasarana COREMAP II di Kabupaten

Kepulauan Selayar secara langsung dirasakan dampaknya yaitu positif terhadap kesejahteraan mereka, terutama mereka yang tinggal di kawasan pulau. Kawasan pulau yang selama ini miskin terhadap prasarana publik, kehadiran prasarana COREMAP II di desanya sangat dirasakan manfaatnya. Adapun untuk kawasan daratan P. Selayar, kendati prasarana COREMAP II juga dianggap bermanfaat, namun alternatif pilihan prasarana publik lebih banyak dinikmati daripada di kawasan pulau. Secara umum bantuan prasarana COREMAP II tersebut bagi masyarakat pesisir dianggap bermanfaat karena dalam kehidupan sehari-hari mereka bekerja sebagai nelayan tangkap dan kehidupan mereka sebelum sejahtera.

E. Penutup

Dari uraian di atas nampak bahwa kegiatan *village grant* di masing-masing desa tidaklah seragam, tergantung dari hasil musyawarah masyarakat desa. Dalam kenyataan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan *village grant* masih terbatas pada tahap penentuan jenis *village grant*. Dalam pelaksanaan fisik ternyata sebagian besar dikerjakan oleh tukang yang ada di desa. Pengawasan keberadaan DPL oleh Pokmaswas pada umumnya terkendala oleh lemahnya koordinasi, rusaknya joloro dan keterbatasan dana untuk operasional. Pondok pengawas direncanakan sebagai tempat markas pemantauan DPL. Dalam kenyataan bangunan pondok pengawas tidak pernah digunakan. Pada umumnya masyarakat di pulau kecil dan di daratan pulau Selayar merasakan manfaat besar adanya bantuan prasarana COREMAP II (*village grant*, *public awareness*, pengawasan) dalam menunjang kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2005). Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang. Jakarta: Dep. Kelautan dan Perikanan
- Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. (2003). "Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan". Kerjasama Coremap dan DFW Indonesia.
- Bandiyono Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo. (2006). Aspek Social Ekonomi Terumbu Karang di Kabupaten Selayar. Jakarta : P3O-LIPI/
- _____ (2008). Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di lokasi Coremap II : Kasus Kabupaten Selayar. Jakarta : COREMAP-LIPI
- Bandiyono Suko, Toni Soetopo. Ngadi, Masyuri Imron. 2008. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap Kabupaten Selayar. Hasil BME, Jakarta: COREMAP-LIPI
- Bandiyono Suko. Ngadi, Tony Soetopo, Masyuri. (2009). Implementasi Coremap di Kabupaten Selayar: Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi. Jakarta : COREMAP-LIPI

*Oleh: Suko Bandiyono, Ngadi, Toni Soetopo,
Masyhuri Imron*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam konteks kondisi daerah tersebut dan dinamika pelaksanaan COREMAP II. *Pertama*, Kabupaten Kepulauan Selayar secara geografis merupakan wilayah maritim karena sebagian besar luas wilayahnya adalah laut dan terdapat ratusan pulau. Kendati wilayah tersebut mempunyai sumberdaya laut yang menjanjikan, namun telah terjadi proses degradasi sumberdaya laut akibat adanya pemanfaatan oleh nelayan yang kurang memperhatikan aspek konservasi. Banyak nelayan andon yang mengkondisikan daerah Selayar sebagai fishing ground, sehingga mereka melakukan eksploitasi berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya laut. Degradasi sumberdaya laut, terutama terumbu karang, telah berdampak berkurangnya populasi ikan yang telah bermuara pada kesejahteraan nelayan, terutama di pulau-pulau kecil.

Kedua, nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum masih berpendidikan rendah dan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu bersaing dengan nelayan andon yang lebih maju. Sebagian besar nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan nelayan tradisional yang masih subsisten,

sehingga mempunyai produktivitas yang rendah. Mereka hanya melaut selama lima jam dalam sehari, pada pagi hari dan/atau pada petang hari. Nelayan setempat hanya menangkap ikan tidak jauh dari pantai serta mengandalkan alat tangkap sederhana seperti pancing, jaring dan sero. Hal ini sesuai dengan budaya nelayan setempat yang biasa bekerja sendiri dan tidak terbiasa bekerja secara berkelompok. Ketiga, COREMAP merupakan program baru bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga implementasinya masih mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten sampai desa masih belum sepenuhnya mempunyai pemahaman tentang COREMAP sehingga muncul permasalahan koordinasi dan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan tujuan penelitian COREMAP II tahun 2011 terdapat beberapa kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perkembangan Pelaksanaan COREMAP II (*Seed Fund, Village Grant, Pengawasan*)

- Dana *seed fund* di dua kawasan (daratan pulau besar-Selayar dan kawasan pulau kecil) sudah disalurkan sebanyak dua kali, masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Pengaliran dana di dua kawasan tersebut sudah dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Peminjaman dana tidak diberikan secara berkelompok, melainkan perorangan karena disesuaikan dengan budaya masyarakat yang tidak terbiasa bekerja secara berkelompok. Kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk masyarakat hanya bersifat administratif.
- Pemberian pinjaman dari dana *seed fund* kepada masyarakat tidak selalu terkait langsung dengan kegiatan COREMAP yang menekankan penyelamatan ekosistem terumbu karang. Dalam kenyataannya *seed fund* telah menambah pilihan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana segar untuk menambah modal usaha maupun kebutuhan yang lain,

meskipun masih pada skala terbatas. Keberadaan dana *seed fund* belum mampu menggerakkan roda perekonomian desa.

- Meskipun jumlah dana *seed fund* terbatas, tetapi sebagian kecil penerima dana *seed fund* dan anggota masyarakat lain, ada yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal itu menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan anggota masyarakat bukan terjadi karena kegiatan *seed fund* COREMAP II saja, tetapi ada peserta program yang lain seperti : PNPM, BRI, dan BPR yang nilai pinjamannya lebih besar. Selain itu, peningkatan pendapatan juga terjadi karena subsidi bantuan mesin joloro, dan paket rumput laut dari DKP dan Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Walaupun pelaksanaan kegiatan *village grant* sudah melibatkan masyarakat, tetapi partisipasi masyarakat masih terbatas dan banyak kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh tukang.
- Kegiatan pengawasan DPL di kawasan daratan pulau besar dan di pulau kecil belum berjalan secara efektif. Hal itu karena keterbatasan dana dan prasarana pengawasan yang disediakan oleh COREMAP II serta lemahnya koordinasi. Memang di dua kawasan tersebut dana untuk pengawasan telah disepakati dengan menggunakan dana *illegal fishing* yang diterima oleh desa melalui APBD setiap tahunnya, tetapi pengeluaran dana dari desa tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

2. Perkembangan Pendapatan Masyarakat Selama Fase COREMAP II

- Secara umum selama empat tahun terakhir (2006-2011), terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga di Desa Buki

dan Bungaiya dari 798 ribu (tahun 2006) menjadi 1,04 juta (tahun 2011) atau 5,99 persen per tahun. Permasalahan distribusi pendapatan terjadi di kedua desa tersebut karena terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi antara pendapatan terendah dan tertinggi. Tahun 2006 pendapatan minimum rumah tangga sebesar 16 ribu rupiah per bulan sementara itu pendapatan tertinggi pada tahun tersebut mencapai 2,7 juta rupiah. Kesenjangan yang sama terjadi pada tahun 2011, dimana pendapatan terendah sebesar 40 ribu rupiah per bulan dan pendapatan tertinggi mencapai 5,21 juta/bulan. Pendapatan terendah tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar harus didapat dari bantuan orang lain maupun kiriman. Perbedaan pendapatan penduduk tersebut dapat terjadi karena perbedaan akses pengelolaan sumber daya alam. Daerah Bungaiya dan Buki merupakan daerah yang sebagian besar berupa bebatuan tandus yang tergantung pada air hujan. Beberapa jenis tanaman yang biasa ditanam penduduk adalah tanaman keras seperti mede, kelapa, serta sukun dan tanaman musiman seperti jagung, tomat, cabe dan kacang hijau.

- Perubahan rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan Pasimasunggu Timur tahun 2006-2008 sebesar 21,47 persen atau 7,13 persen per tahun. Pada tahun 2008-2011 terjadi peningkatan pendapatan sebesar 31,5 persen atau sekitar 10,4 persen per tahun dan tahun 2006-2011 sebesar 26,9 persen atau 5,5 persen per tahun. Peningkatan pendapatan tersebut belum memperhatikan inflasi di tingkat kabupaten yang dalam dua tahun terakhir mencapai 20 persen. Meskipun tidak ada perubahan teknologi alat tangkap, sarana dan prasarana yang terbatas, namun masih terjadi peningkatan pendapatan

masyarakat. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah digulirkan pemerintah kepada masyarakat, seperti PEMP, bantuan pengadaan kapal untuk nelayan (DKP Kabupaten Kepulauan Selayar), program COREMAP.

3. Pendapatan Penerima Dana Bergulir

- Secara umum rata-rata pendapatan rumah tangga yang mendapat dana bergulir lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan dana bergulir. Di Desa Buki dan Bungaiya pendapatan perkapita penerima dana bergulir anggota pokmas sekitar 237.054 rupiah, sementara rata-rata pendapatan rumah tangga mencapai 914 ribu rupiah.
- Di kawasan Pasimasunggu Timur (Desa Bontobulaeng dan Bontobaru) pendapatan per kapita penerima seed fund sebesar 378.755 rupiah, sementara pendapatan rumah tangga mencapai sekitar 1.256.163 rupiah.

4. Persepsi Masyarakat Tentang Manfaat COREMAP II

- Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai persepsi bahwa prasarana COREMAP II (*village grant*, *public awareness* dan pengawasan) telah berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka. Responden di kawasan daratan dan di kawasan pulau kecil yang menyatakan bahwa prasarana COREMAP II bermanfaat masing-masing sebesar 85,25 persen dan 93,85 persen. Apabila persepsi tersebut dikaitkan dengan indikator keberhasilan COREMAP II, dapat disimpulkan bahwa COREMAP II di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum masuk kategori berhasil karena di atas

70 persen. Keberhasilan tersebut lebih dirasakan di kawasan pulau kecil daripada di kawasan daratan Pulau Selayar. Terdapat variasi persepsi masyarakat tentang manfaat prasarana COREMAP II di tingkat desa (Buki, Bungaiya, Bontoharu dan Bontobulaeng), karena ada kendala pelaksanaan kegiatan Pokmas di masing-masing desa.

Rekomendasi

Atas dasar kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas dan hasil penelitian sebelumnya dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Berkaitan dengan prasarana fisik yang dibangun dengan dana *village grant*, yang sebagian kurang dimanfaatkan dan cenderung mengalami kerusakan. Agar prasarana tersebut tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik, maka masyarakat perlu didorong untuk memanfaatkan sekaligus memeliharanya dengan didukung alokasi dana baik oleh pemerintah daerah maupun dana mandiri masyarakat desa. Prasarana seperti pondok informasi dan pondok pengawas dapat dikembangkan dan dikelola oleh desa menjadi perpustakaan desa maupun kegiatan di tingkat desa yang lain seperti Gapoktan, PKK, sekretariat sepakbola tanpa menghilangkan esensi dari program COREMAP.
- *Seed fund* telah bergulir di masyarakat, meskipun sebagian dana bergulir tersebut macet (tidak dapat dikembalikan). Dana *seed fund* dapat menjadi embrio sebagai alternatif sumber dana untuk pengembangan ekonomi mikro di perdesaan pesisir. Dana tersebut telah dikelola lembaga keuangan tingkat desa (LKM) dan berpotensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu, management kelembagaan keuangan mikro perlu dikembangkan lebih modern. Kontrol oleh masyarakat dan pemerintah desa

perlu terus dikembangkan agar dana bergulir terus berkembang sehingga dapat menjadi salah satu alternatif sumber dana di masyarakat.

- Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kegiatan nelayan tradisional dalam upaya meningkatkan produktivitas antara lain melalui pelatihan, bantuan peralatan, prasarana pelabuhan dan membentuk warung nelayan. Meskipun demikian, upaya tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan sekaligus memelihara agar masyarakat tidak menjadi tergantung pada bantuan pemerintah.
- Secara formal COREMAP II telah berakhir pada tahun 2011. Program ini telah merintis upaya penyelamatan terumbu karang dan kinerja kegiatan sudah cukup berhasil berdasar indikator yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa COREMAP mempunyai tujuan jangka panjang dalam penyelamatan terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka program tersebut dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai dengan visi Kabupaten Kepulauan Selayar, program yang menyangkut pembangunan sektor kelautan perlu mendapat prioritas utama yang dicerminkan dalam alokasi anggaran pembangunan daerah (APBD). Adapun pada tataran nasional, program COREMAP perlu ditindaklanjuti dengan mencari alternatif sumber dana yang lain.

